

**UPAYA PEMERINTAH KOTA BLITAR DALAM PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO KECIL dan MENENGAH (UMKM) GUNA
MENCIPTAKAN MASYARAKAT YANG MANDIRI
(Studi Pada Pemerintah Kota Blitar)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**ANDY SOFIAN
NIM. 0810310008**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2012**

MOTTO

*“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan
tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap
kali jatuh.....”*

(Confusius)

Jadikan kejujuran pedoman dalam hidupmu.....

Selalu berusaha keraslah dalam mencapai tujuan

hidup yang kamu inginkan, Karena jalan

hidupmu, dirimu sendiri yang menentukan.....”

(Andy Sofian)

PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN KARYAKU BUAT AYAHANDAKU TERCINTA BAPAK SLAMET
TUKIYAN DAN IBUKU YANG AKU SAYANGI IBU RAMINAH, SERTA KAKAK-
KAKAKKU TERBAIK SEPANJANG HIDUPKU DWI RAHAYU, TRIANTO, PURWANTI,
JONI, SUSENO HANDOYO YANG SELAMA INI MEMBIMBINGKU DAN ADA DI SAAT
AKU SEDIH DAN SENANG, DOSEN PEMBIMBINGKU YANG MENYANYANGIKU
SEPERTI KEDUA ORANG TUAKU DI MALANG INI BAPAK IMAM HARDJANTO DAN
BAPAK RIYANTO YANG SELALU KU REPOTKAN DENGAN SKRIPSIKU, BUAT
SAHABAT KARIBKU RIO GATRA RAHARJA YANG SELALU MENOLONGKU HINGGA
AKU BISA MASUK UNIVERSITAS BRAWIJAYA INI, BUAT ORANG YANG PERNAH
MASUK DALAM HATIKU, EVANIA DWANTORO, AYU FARIDA RAHMAWATI, DWI
KARTIKA SARI, FUANA FUA LINDISARI, EKA PUTRI ISTIARI, EVI WIDYANA SARI
DAN WORO PUSPITO WULAN YANG TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN MORIL DAN
SPIRITUAL SELAMA AKU DUDUK DI BANGKU PERKULIAHAN INI, BUAT TEMAN-
TEMAN KULIAHKU DAN TEMAN TOURING Se-JAWA TIMUR-YOGYAKARTA KU,
SEDOYO SEDULURAN GOTARDO/ HURU-HARA ASKBH, DAN BULUKS 2008 :
ARINDRA HADI SUGIANTO, CATUR DEDY PRIHANTO, ASRAWANI TAMBUNAN,
DESYKA WIENETASARI, DIAN YULIANSYAH, APREGI IMARUNDA, ALVIAN PRIO
RATMOKO, BAYU MITRA ADYHATMA KUSUSMA, DEBI TISTA MAULINIAN, DWI
APRILIANI, ALFIAN KUSUMA WARNDANI, AYU PUSPITA SARI, BAGUS ANANDA
KURNIAWAN, BAGUS SANJAYA, SULISTIONO NUGROHO, ARYA SURYA
SUMANTRI, AGUNG DWI YULIANTO, DAN SELURUH KERABAT KELAS A FIA
PUBLIK 2008 YANG SELAMA INI MENGHIASI KEHIDUPANKU....TERIMA KASIH

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : Upaya Pemerintah Kota Blitar Dalam Pemberdayaan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Guna Menciptakan
Masyarakat Yang Mandiri (Studi Pada Pemerintah Kota Blitar)

DISUSUN OLEH : ANDY SOFIAN

NIM : 0810310008

FAKULTAS : ILMU ADMINISTRASI

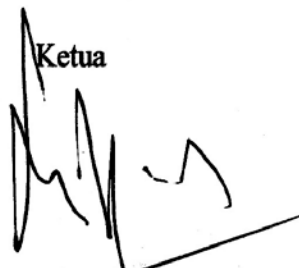
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

KONSENTARSI : Non Konsentrasi

Malang, 2 April 2012

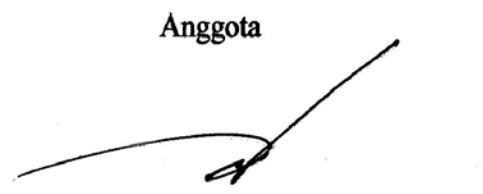
Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Imam Hardjanto, MAP
NIP: 19460619174121 001

Anggota



Drs. Riyanto, M.Hum
NIP : 19600430 198601 1 001

TANDA PENGESAHAN

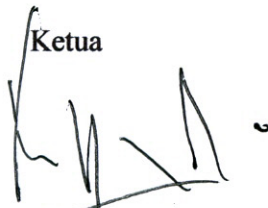
Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 7 Mei 2012
Jam : 10.00-11.00 WIB
Skripsi atas nama : Andy Sofian
Judul : Upaya Pemerintah Kota Blitar Dalam
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Guna Menciptakan Masyarakat Yang Mandiri (
Studi Pada Pemerintah Kota Blitar).

dan Dinyatakan Lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Imam Hardjanto, MAP
NIP. 194606191974121001

Anggota



Drs. Riyanto, M.Hum
NIP. 1960043011986011001

Anggota



Drs. Romula Adiono, MAP
NIP. 196204011987031003

Anggota



Ike Wanusmawatie, S.Sos, MAP
NIP. 197701012005022001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 12 April 2012



Andy Sofian
NIM. 0810310008

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **UPAYA PEMERINTAH KOTA BLITAR DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) GUNA MENCIPTAKAN MASYARAKAT YANG MANDIRI** (Studi Pada Pemerintah Kota Blitar) dengan baik.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administasi Universitas Brawijaya Malang.

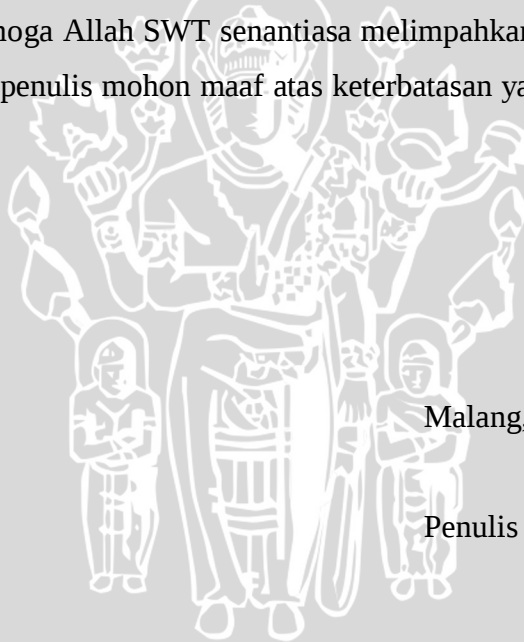
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. M.R. Khairul Muluk, S.Sos.M.Si selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Administrasi Publik.
3. Bapak Dr. Imam Hardjanto, MAP selaku Ketua Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Riyanto, M.Hum selaku Anggota Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Romula Adiono, MAP selaku Dosen Penguji I saya yang telah memberikan masukan kepada perbaikan skripsi saya
6. Ibu Ike Wanusmawatie, S. Sos, MAP selaku Dosen Penguji II saya yang telah memberikan masukan kepada perbaikan skripsi saya.
7. Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar yang telah membantu selama penelitian.

8. Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar yang telah membantu selama penelitian.
9. Bapak/Ibu pelaku UMKM yang ada di Kota Blitar
10. Keluarga saya tercinta yang selalu dan terus memberikan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih sayangNya untuk kita semua, dan penulis mohon maaf atas keterbatasan yang terdapat dalam skripsi ini.



Malang, 12 April 2012

Penulis

SUMMARY

Andi Sofian. 2012, Blitar Government's Effort in Empowering *Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)* in Order to Create Independen Society (Study in Government of Blitar City), Dr. Imam Hardjanto, MAP, Drs. Riyanto, M.Hum, 156 Pages + xii.

Empowerment is a process where people become quite strong to participate in various activities from respective institution and influence every event and institution that affects life. Empowerment emphasizes people to gain enough skill, knowledge and power to influence its own life and others which is concerned. Empowerment aims at improving power of weak or unlucky people to have more meaning in life.

Empowerment program of *Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)* is one of programs made by government of Blitar that is charged by respective instance namely Cooperation and UKM Official of Blitar and Industrial and Trade Official of Blitar, where this program is intended to assist people of Blitar city to have prosperity. The research has some objectives, they are to find put, describe and analyze development condition of UMKM in Blitar city, to find out, describe and analyze the activity process of UMKM empowerment done by Industrial dan trade official of Blitar city and Cooperation and UKM official of Blitar city, to find out, describe and analyze the impact of UMKM empowerment done by Industrial and trade Official of Blitar city and Cooperation and UKM official of Blitar for the respective people so these may create independent society. The researcher employed descriptive research with qualitative approach which would explain how is the Blitar government's effort in empowering *Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)* in order to create independen society. The steps employed to analyze data within the research is the researcher try to find information source and data as many as possible then collect it and draw conclusion from any data gained in terms of Blitar government effort in empowering *Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)* in order to create independen society.

Based on finding of the research, it is found that the program of UMKM empowerment made by Blitar government that is stated in *Renstra* of Cooperation and UKM Official of Blitar city and *Renstra* of Industrial and Trade Official of Blitar city has run well. It is related to the program has made some UMKM actors reach their successful in running their business. In addition it is also found that there are some impeding factors for the program, such as low productivity, limited access of UMKM to productive resources, low quality of institution and cooperation organization, undeveloped cooperation performance and bad cooperation image, and business climate in Blitar that is less conducive.

Tracing back to those impeding factor, it is necessary to have further action from Blitar government in handling the problem. The government of Blitar city has less effort to socialize that empowerment program so that most of people

in Blitar have no idea about the program; hence it is needed to reorder done by the government of Blitar. Therefore unemployment and poverty rate in Blitar can be pressed so finally prosperity of people in Blitar can be reached. And if economic of Blitar people is increased, it definitely adds the rate of pure income of Blitar and those may be used to develop Blitar city in the future.



RINGKASAN

Andy Sofian. 2012, Upaya Pemerintah Kota Blitar Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Guna Menciptakan Masyarakat Yang mandiri (Studi Pada Pemerintah Kota Blitar), Dr. Imam Hardjanto, MAP, Drs. Riyanto, M.Hum, 156 hal + xi.

Pemberdayaan adalah sebuah proses yang mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang berasal dari pengaruh lembaga yang memberdayakannya dan mempengaruhi setiap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan orang untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung menjadi lebih mempunyai arti dalam hidup.

Program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu program yang di buat Oleh Pemerintah Kota Blitar dalam hal ini di jalankan oleh instansi terkait yakni Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, yang mana program ini dibuat bertujuan untuk membantu masyarakat Kota Blitar untuk melepaskan dari jurang ketidaksejahteraan. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisa kondisi perkembangan UMKM di Kota Blitar, untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisa proses kegiatan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar serta Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar, untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisa dampak pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar serta Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar bagi masyarakat Kota Blitar sehingga bisa menciptakan masyarakat yang mandiri. Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mana akan menjelaskan tentang Bagaimana Upaya Pemerintah Kota Blitar dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Guna Menciptakan Masyarakat Yang Mandiri. Langkah yang di gunakan dalam menganalisa data dalam penelitian ini adalah peneliti berusaha mencari sumber informasi dan data sebanyak-banyaknya lalu mengumpulkannya serta menarik kesimpulan dari data yang diperoleh dalam hal ini kaitannya dengan Upaya Pemerintah Kota Blitar Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Guna Menciptakan Masyarakat Yang Mandiri.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Program pemberdayaan UMKM yang dibuat Oleh Pemerintah Kota Blitar dalam hal ini yang tertuang pada Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar dan Juga pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar sudah berjalan dengan cukup apik. Hal ini mengingat program pemberdayaan tersebut telah mengantarkan beberapa para pelaku UMKM dalam mencapai kesuksesannya dalam menjalani kegiatan usaha

yang digelutinya. Dari hasil penelitian juga diketemukan beberapa faktor penghambat diantaranya rendahnya produktivitas, terbatasnya akses UMKM kepada Sumber Daya Produktif, masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi, tertinggalnya kinerja koperasi dan kurang baiknya citra koperasi, dan kurang kondusifnya iklim usaha di Kota Blitar

Dengan melihat beberapa faktor penghambat diatas maka perlu adanya tindak lanjut dari Pemerintah Kota Blitar dalam menangani permasalahan tersebut. Karena dirasa selama ini Pemerintah Kota Blitar kurang melakukan sosialisasi terhadap program-program pemberdayaan yang dibuat, dan akhirnya membuat kebanyakan masyarakat Kota Blitar sendiri tidak mengetahui adanya program tersebut. Tentu saja hal ini perlu adanya pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Blitar. Sehingga angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Blitar bisa ditekan sebisa mungkin sehingga kesejahteraan masyarakat Kota Blitar pun dapat tercapai. Dan juga apabila perekonomian masyarakat Kota Blitar meningkat tidak kita pungkiri pula jika akan menambah angka Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar sendiri dan akhirnya hal tersebut dapat dipergunakan untuk membangun Kota Blitar kedepannya.



DAFTAR ISI

MOTTO.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
TANDA PERSETUJUAN	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
SUMMARY	vii
RINGKASAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kontribusi Penelitian	14
E. Sistematika Pembahasan	15
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A.KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	17
1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat	17
2. Strategi Utama Pemberdayaan Masyarakat	19
3. Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat	21
B. KONSEP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH.....	23
1. Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	23
2. Asas Usaha Mikro Kecil dan Menengah	24
3. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM.....	25
4. Kriteria UMKM	26
5. Strategi Pemberdayaan UMKM.....	27
C. KONSEP MASYARAKAT MANDIRI	33
1. Definisi Masyarakat Mandiri	33
2. Aspek-aspek Keterjaminan Sosial yang Dapat Dikatakan Masyarakat Mandiri.....	36
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	39
B. Fokus Penelitian.....	40
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Instrumen Penelitian.....	45

G. Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kota Blitar	
1. Letak Geografis dan Batas Wilayah	48
2. Topografi.....	51
3. Pemerintahan Daerah.....	51
4. Penduduk.....	56
5. Potensi Pariwisata	58
B. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar	
1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	60
2. Visi Misi dan Tujuan Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar.....	74
C. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar	
1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	76
2. Visi Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar.....	79
D. Gambaran Umum UMKM di Kota Blitar.....	80
E. Penyajian Data dan Fokus Penelitian	
1. Upaya Pemerintah Kota Blitar dalam Pemberdayaan UMKM yang ada di Kota Blitar yang tertuang pada Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar	82
a. Program Kerja Pemberdayaan UMKM Oleh Pemerintah Kota Blitar yakni :	
1) Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar	82
2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar.....	88
b. Kegiatan Pemberdayaan	
1) Pemberdayaan MSDM Pelaku UMKM.....	96
2) Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pelaku UMKM	101
3) Pemberdayaan Sarana Prasarana UMKM	105
2. Dampak Pelaksanaan Program Pemberdayaan UMKM di Kota Blitar	109
a. Pemberi Program Pemberdayaan UMKM	109
1) Dampak Positif	109
2) Dampak Negatif.....	113
b. Penerima Program Pemberdayaan UMKM	115
1) Dampak Positif	115
2) Dampak negatif.....	120
3. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan UMKM di Kota Blitar	123
a. Faktor Penghambat	123
b. Faktor Pendukung	128
F. Analisis Data	
1. Analisis Upaya Pemerintah Kota Blitar Mengenai Pemberdayaan UMKM yang ada di Kota Blitar yang tertuang pada Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar	130
a. Program Kerja Pemberdayaan UMKM Oleh Pemerintah Kota Blitar yakni:	
1. Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar	131

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar.....	133
b. Kegiatan Pemberdayaan	
1. Pemberdayaan MSDM Pelaku UMKM	135
2. Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pelaku UMKM	137
3. Pemberdayaan Sarana Prasarana UMKM.....	139
2. Analisis Dampak Pelaksanaan Program Pemberdayaan UMKM di Kota Blitar	141
a. Pemberi Program Pemberdayaan UMKM	141
1) Dampak Positif	141
2) Dampak Negatif.....	142
b. Penerima Program Pemberdayaan UMKM	144
1) Dampak Positif	144
2) Dampak Negatif.....	146
3. Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan UMKM di Kota Blitar.....	148
a. Faktor Penghambat	148
b. Faktor Pendukung	149

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	151
B. Saran	155

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	1	Misi Dan Penjabaran Tujuan Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar Tahun 2011	6
Tabel	2	Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Blitar 2010	9
Tabel	3	Angkatan Kerja Yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Kota Blitar 2006-2010	10
Tabel	4	Perbedaan Konsep Masyarakat Dalam Pemerintahan Daerah	35
Tabel	5	Luas Wilayah Menurut Kelurahan (Km ²) Kota Blitar 2010	50
Tabel	6	Kelurahan, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga menurut Kecamatan Kota Blitar 2010	52
Tabel	7	Kelahiran, Kematian, Datang dan Pindah per Kecamatan Kota Blitar Tahun 2011	58
Tabel	8	Strategi Dan Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar 2011	82
Tabel	9	Rencana Strategis Tahun 2011-2012	89
Tabel	10	Rencana Strategis Tahun 2011-2015	91
Tabel	11	Rencana Strategis Tahun 2011-2015	93
Tabel	12	Rencana Strategis tahun 2011-2015	94
Tabel	13	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar 2011	99
Tabel	14	Kebutuhan Hidup Layak Pekerja Per Orang Per Bulan Tahun 2007-2010	103
Tabel	15	Pemberdayaan Sarana Prasarana PK5 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2011-2012	107
Tabel	16	Pemberdayaan Sarana Prasarana Penunjang UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar tahun 2011-2012	108
Tabel	17	Perkembangan Data UMKM Kota Blitar Menurut Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2007-2011	115
Tabel	18	Data UKM dan LKM Menurut Kelurahan dan Kecamatan Di Kota Blitar Tahun 2011	125
Tabel	19	Peserta dan Lulusan Ujian Akhir nasional SMA/SMK Menurut Kecamatan Di Kota Blitar Tahun 2010/2011	129

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1	Komponen-komponen analisis data: Model Interaktif (Sumber Miles dan Huberman, diterjemahkan oleh Sugiyono)	47
Gambar	2	Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar 2011	73
Gambar	3	Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar 2011	78



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keterangan Melakukan Penelitian/Survey/Research Dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
- Lampiran 2. Surat Keterangan Untuk Melakukan Penelitian/Survey/ Research Dari Pemerintah Kota Blitar
- Lampiran 3. Surat Keterangan Survey di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Pemerintah Kota Blitar
- Lampiran 4. Surat Keterangan Survey di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Pemerintah Kota Blitar



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketika Indonesia dilanda krisis, pemerintah baru tersadar bahwa usaha besar yang dibangga-banggakan justru sebagian besar bangkrut/gulung tikar dan memberikan beban berat bagi negara dan bangsa, sebaliknya usaha kecil dan koperasi yang selama ini dipandang sebelah mata malah mampu bertahan, bahkan berkembang. Namun demikian, walau usaha kecil mempunyai daya juang luar biasa, untuk bertahan hidup dan berkembang perlu diberikan lingkungan berusaha dan dukungan-dukungan lain untuk meningkatkan daya saing dan daya tumbuhnya. Untuk itu, isu pembinaan dan pengembangan usaha kecil (termasuk mikro), menengah semakin digalakkan. Identifikasi kebutuhan dan masalah usaha kecil dan koperasi perlu terus dilakukan dalam upaya meningkatkan daya tumbuh dan daya saingnya.

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 (pasal 5) Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan

pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Berdasarkan tujuan di atas maka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan bangsa yang berdaya saing serta menciptakan pembangunan yang merata dan adil. Dalam hal ini Koperasi dan UMKM hendaknya diarahkan untuk berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja baru dan penumbuh daya saing. Ketentuan ini juga telah tercantum secara tegas dalam dokumen RPJPN 2005-2025. Selanjutnya, penjabaran rencana jangka menengah harus disusun dengan landasan berpikir bahwa pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan upaya strategis yang berkesinambungan di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Program jangka menengah seperti yang dijabarkan dalam RPJMN 2010-2014 yang mencerminkan strategi pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam lingkup makro, meso, maupun mikro.

Pada tataran makro, RPJMN 2010-2014 memuat kebijakan perbaikan lingkungan usaha yang diperlukan dalam rangka peningkatan daya saing (*competitiveness*) Koperasi dan UMKM. Dalam hal ini, tantangan untuk lima tahun ke depan antara lain persaingan usaha yang makin ketat, biaya transaksi yang makin tinggi, serta semakin mahalnya sumber daya yang diperlukan oleh Koperasi dan UMKM.

Pada tataran meso, dokumen rencana jangka menengah memuat upaya peningkatan akses Koperasi dan UMKM terhadap sumber daya produktif guna meningkatkan permodalan dan perluasan usaha mereka. Fokusnya tentu terkait

dengan masalah pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas untuk mendukung perluasan jaringan usaha dan pemasaran, peningkatan akses terhadap modal dan advokasi, serta peningkatan intensitas penerapan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM.

Lalu pada tataran mikro dokumen RPJMN memiliki sasaran yang jelas tentang upaya untuk mengatasi persoalan yang terkait dengan karakteristik dan perilaku pelaku usaha. Rancangan jangka menengah menekankan bahwa pelaku usaha Koperasi dan UMKM tidak lagi bisa menjalankan bisnis seperti pola yang selama ini diterapkan (*business as usual*). Mereka harus benar-benar dibantu untuk menumbuhkan kewirausahaan, budaya kerja, dan mengembangkan lingkungan yang kondusif bagi usaha yang memiliki daya saing yang tinggi.

Mengingat semakin kompleknya tantangan dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Peran pemerintah diharapkan benar-benar tepat dan mampu membantu usaha yang sangat penting bagi penciptaan lapangan kerja ini pada saat diperlukan. Agar mampu memainkan peran dalam jangka menengah di atas, pemerintah harus berani mengubah paradigma pemberdayaan yang selama ini dipakai. Salah satunya adalah mengubah asumsi masyarakat yang selama ini kita ketahui yang mana memandang Koperasi dan UMKM sebagai lembaga usaha yang skalanya remeh, lemah, terbelakang dan pantas dikasihani. Program-program pemberdayaan hendaknya jangan seperti program *charity* (amal), yang menganggap bahwa anggaran yang dikeluarkan semata-mata merupakan alokasi dana sosial tanpa adanya upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kedewasaan berpikir para pelaku usaha tersebut. Untuk itu, program pemberdayaan hendaknya

dirumuskan dengan terlebih dahulu memahami secara utuh perubahan lingkungan strategis dalam usaha Koperasi dan UMKM.

Program pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai salah satu *instrument* untuk menaikkan daya beli masyarakat, pada akhirnya akan menjadi katup pengaman dari situasi krisis moneter. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi sangat strategis dalam mengerakan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Untuk itu, peran pemerintah daerah dalam memberdayakan ekonomi sangat diperlukan yakni membuat kebijakan yang berkenaan dengan pemberdayaan ekonomi terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Wujud keterlibatan pemerintah daerah terhadap investor lokal atau Usaha Mikro Kecil Dan Menengah mesti lebih nyata, yang tak semata pada penciptaan iklim (*eksternal*) tetapi juga memberdayakan potensi (*internal*) mereka.

Otonomi daerah merupakan fenomena politis yang menjadikan penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik birokratik ke arah desentralistik partisipatoris. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang telah diamandemen menjadi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 telah melahirkan paradigma baru dalam melaksanakan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi penuh, luas dan bertanggung jawab pada daerah kota maupun kabupaten. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas pelayanan

masyarakat, menumbuhkan semangat demokratis dan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan jauh diharapkan akan menjamin tercapainya keseimbangan kewenangan dan tanggung jawab antara pusat dan daerah. Lahirnya Undang-undang ini membuka jalan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) disuatu pihak dan pemberdayaan ekonomi rakyat dipihak lain. Karena dengan otonomi daerah, pemerintah kota maupun kabupaten memiliki kewenangan yang menandai untuk mengembangkan program-program berbasis masyarakat. Jika selama ini yang masyarakat ketahui jika program-program pemberdayaan ekonomi didesain dari pusat, tanpa daerah memiliki kewenangan untuk berkreasi, mulai sekarang pemerintah daerah baik kota ataupun kabupaten dituntun untuk bisa mengembangkan kemampuannya dalam pemberdayaan masyarakatnya. Karena hal tersebut perlu dilakukan sebagai dasar untuk menjalankan pelaksanaan otonomi daerah yang baik, yang mana sudah diamanatkan sesuai undang-undang pemerintahan daerah yang berlaku pada saat sekarang ini.

Kota Blitar adalah salah satu daerah yang sedang giat membangun perekonomian lokal, yakni potensi perekonomian lokal yang berbasis Koperasi dan UMKM menjadi salah satu faktor pendongkrak perekonomian lokal yang ada di Kota Blitar itu sendiri. Hal ini tercantum melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM yang dituangkan pada rencana strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar yang mana mempunyai tujuan sebagai berikut :

Tabel 1.
Misi Dan Penjabaran Tujuan
Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar Tahun 2011

NO	MISI	TUJUAN
1	Meningkatkan SDM koperasi melalui penerapan standar kompetensi kerja	1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya koperasi 2. Meningkatkan skala usaha/optimalisasi pengelolaan koperasi
2	Meningkatkan daya saing UMKM melalui penerapan manajemen partisipatif	1. Meningkatkan skala usaha/optimalisasi pengelolaan UMKM 2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya UMKM
3	Mewujudkan lembaga koperasi yang berkualitas dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip koperasi	1. Peningkatan kemampuan kelembagaan koperasi dan UMKM 2. Membangun citra koperasi dan UMKM sebagai lembaga yang memiliki struktur kelembagaan yang baik (<i>best practice</i>)
4	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kinerja sumber daya aparatur.	1. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana UMKM 2. Peningkatan kualitas SDM aparatur

Sumber : Dinas Koperasi Dan UKM Kota Blitar 2011

Berdasarkan tujuan diatas jelas terbukti bahwa Pemerintah Kota Blitar melalui Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar tetap berusaha untuk mengembangkan perekonomian lokal dengan berbasis pada Koperasi serta Usaha Mikro Kecil Dan Menengah yang mana dalam tujuan dalam Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar sendiri adanya poin mengenai meningkatkan skala/optimalisasi pengelolaan UMKM serta meningkatkan profesionalisme sumber daya UMKM hal ini menjadi bukti kesungguhan Pemerintah Kota Blitar sendiri untuk menumbuh kembangkan UMKM yang ada di Kota Blitar sendiri. Mengingat poin penting dalam peningkatan pengelolaan UMKM benar-benar diberdayakan oleh Pemerintah Kota Blitar yang tercantum pada Renstra Dinas

Koperasi dan UKM Kota Blitar maka hal ini dapat menjadi nilai lebih bagi masyarakat Kota Blitar sendiri dalam mengembangkan UMKM guna peningkatan taraf hidup masyarakatnya, yang mana kita ketahui selama ini masyarakat Kota Blitar masih tergolong kurang sejahtera karena terbatasnya lapangan kerja yang ada di Kota Blitar. Hal tersebut juga diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kemiskinan Kota Blitar yang mana dalam pasal 5 dijelaskan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil yang mana dalam hal ini melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar sebagai tim pelaksana di lapangan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat Kota Blitar sendiri, yang mana pemerintah sendiri ingin menjadikan masyarakat Kota Blitar yang lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhannya dengan memfasilitasi berbagai kegiatan mengenai kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hal-hal yang bisa kita lihat pula yang terjadi di Kota Blitar sendiri adalah pola pikir pemerintahannya yang mana berpedoman untuk mengembangkan perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan, hal tersebut tentunya berbanding terbalik yang mana banyak daerah membangun mal dan minimarket, tetapi Pemerintah Kota Blitar justru membatasinya keberadaanya tersebut. Alasannya demi menjaga keberlangsungan hidup usaha kecil seperti toko kecil ataupun pedagang kaki lima yang ada di Kota Blitar. Kebijakan itulah yang mengantarkan Kota Blitar meraih

otonomi award 2008 untuk daerah dengan terobosan paling inovatif pemberdayaan ekonomi lokal.

Selain membatasi pedagang besar, Pemerintah Kota Blitar berkomitmen mengendalikan investasi ritel menengah (minimarket). Yakni, agar hanya membuka gerai di kelurahan-kelurahan di wilayah kota. Dengan demikian, potensi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dan pasar tradisional yang tersebar di pinggiran Kota Blitar tidak dimatikan. Tahun 2008 adalah ambang batas akhir keluarnya izin usaha untuk pendirian minimarket, yang di daerah lain justru menjamur. Sejak tahun 2008, Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) tidak memproses izin ritel menengah hal ini dilakukan untuk melindungi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari persaingan industri moderen. Untuk memperkuat jaminan bagi perkembangannya UMKM, Pemerintah Kota Blitar kini merancang perda tata ruang (RT/RW) bersama DPRD. Bila selesai, perda itu akan mengamankan keberpihakan pada pasar tradisional dan semimoderen hingga 20 tahun mendatang ke depan (www.kotablitar.go.id)

Kota Blitar merupakan kota kecil yang terdiri atas tiga kecamatan yakni Kecamatan Kepanjenkidul, Kecamatan Sanawetan, Kecamatan Sukorejo. Pertumbuhan jumlah penduduk Kota Blitar dapat dikategorikan sebagai kota yang tingkat pertumbuhan penduduknya cukup pesat. Hal ini bukan berarti kegagalan program Keluarga Berencana, tetapi pertumbuhan pesat ini disebabkan oleh besarnya arus urbanisasi di Kota Blitar. Sedangkan pertumbuhan yang disebabkan oleh adanya kelahiran bayi sesungguhnya sangat rendah. Hal ini dapat kita lihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Blitar 2010

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	6.102	5.549	11.651
5 – 9	6.134	5.610	11.774
10 – 14	6.197	5.507	11.704
15 – 19	5.620	6.157	11.777
20 – 24	4.872	4.836	9.708
25 – 29	6.332	6.022	12.354
30 – 34	5.689	5.346	11.035
35 – 39	5.373	5.332	10.705
40 – 44	5.302	5.491	10.793
45 – 49	4.558	5.054	9.612
50 – 54	4.204	4.204	8.408
55 – 59	3.327	3.285	6.612
60 – 64	2.120	2.329	4.449
65+	4.323	5.699	10.022
Kota Blitar	70.153	70.421	140.574

Sumber : BPS Kota Blitar 2011

Dengan melihat tabel tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk usia produktif, jumlahnya separuh lebih banyak dari penduduk Kota Blitar sendiri yakni mencapai 75.984 jiwa yang dihitung mulai umur 15 - 49 tahun yang mana pada usia tersebut penduduk masih mampu untuk melakukan aktivitasnya dengan baik. Data ini juga diperkuat dengan banyaknya pelajar di Kota Blitar yang lebih memilih Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dibandingkan dengan Sekolah Menengah Umum (SMU). Berdasarkan data BPS Kota Blitar tahun 2011 yang mana Sekolah Menengah Kejuruan memiliki jumlah siswa sebanyak 10.425 dan Sekolah Menengah Umum memiliki 3.749 siswa pada tahun 2010, hal ini membuktikan bahwa masyarakat Kota Blitar lebih memilih sekolah yang lebih mengutamakan lulusan yang siap kerja dibandingkan sekolah dengan lulusan yang perlu dilanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini juga selaras dengan

program pemerintah yang lagi gencar mengkampanyekan sekolah kejuruan untuk menghasilkan lulusan yang langsung siap kerja sehingga diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran. Dari sisi kesejahteraan masyarakat, salah satu indikator yang dapat dipergunakan adalah jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Blitar sendiri. Berdasarkan data dari BPS Kota Blitar yang telah divalidasi melalui Program Pendataan Layanan Sosial (PPLS), pada tahun 2009 terdapat sebesar 4.288 KK miskin dengan jumlah jiwa sebesar 13.182 orang. Dalam artian, angka ini sama dengan hasil validasi data BPS Kota Blitar pada tahun 2008. Dan juga hal ini akan diperjelas lagi dengan melihat angka angkatan kerja yang terdaftar di Kota Blitar sendiri yakni sebagai berikut:

Tabel 3.
Angkatan Kerja Yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan
Kota Blitar 2006-2010

Tingkat pendidikan	2006	2007	2008	2009	2010
Belum tamat SD	-	-	-	-	-
SD	18	5	27	1	14
SMTU Umum	54	41	72	44	35
SMTU kejuruan	-	-	-	-	-
SMTA Umum	788	234	553	121	261
SMTA Kejuruan	667	289	605	150	280
Akademi (D1-D3)	275	101	714	52	459
Perguruan Tinggi	881	308	728	64	1064

Sumber: Dinas Sosnaker Daerah Kota Blitar 2011

Dengan melihat tabel tersebut, maka jumlah angkatan kerja yang terdaftar di Kota Blitar begitu sangat tinggi, belum lagi jumlah angkatan kerja yang belum terdaftar yang belum terserap pada dunia kerja maka diharapkan pemberdayaan UMKM dapat menjadi solusi untuk menciptakan wirausaha-wirausaha baru yang mana dari kegiatan UMKM tersebut dapat menciptakan lapangan kerja dan

membuat mereka para wirausaha baru tersebut dapat mandiri dalam hal ini dari segi perekonomiannya. Sementara itu, berdasarkan angka lulusan dilihat dari sisi ketenagakerjaan dan potensi lapangan kerja di Kota Blitar pada tahun 2008 sesuai dengan data dari Dinas Sosnakerda Kota Blitar, jumlah perusahaan sebagai salah satu potensi lapangan kerja mengalami kenaikan sebesar 4,27% hingga berjumlah 257 perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja sebesar 7.659 orang. Dengan banyaknya jumlah usia produktif dan serta banyaknya orang tua yang ada di Kota Blitar yang mensekolahkan anaknya pada sekolah kejuruan, menjadi modal besar bagi Pemerintah Kota Blitar sendiri untuk mengembangkan potensi UMKM, yang mana pemberdayaan UMKM tersebut dapat menjadi solusi bagi para usia produktif dan lulusan SMK pada umumnya untuk menjadi wirausaha-wirausaha baru atau pun terserap pada sektor UMKM tersebut, yang mana hal ini dapat menciptakan kemandirian (segi ekonomi) pada penduduk usia produktif di Kota Blitar sendiri, mengingat jumlah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan begitu besar dibandingkan Sekolah Menengah Umum.

Kemandirian dalam hakekatnya adalah suatu keadaan yang mana masyarakat bisa melakukan suatu kegiatan dengan sendiri. Dalam hal ini masyarakat di Kota Blitar diharapkan mampu menjadi masyarakat yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, yang mana kebutuhan dasar seperti sandang pangan papan bisa tercukupi. Karena yang kita ketahui selama ini dilapangan, masih banyak masyarakat Kota Blitar sendiri yang belum bisa dikatakan sejahtera dalam hidupnya, karena disebabkan juga jumlah lapangan kerja yang terbatas. Untuk itu, penciptaan masyarakat mandiri di Kota Blitar yang

mana dalam hal ini masyarakat dengan bantuan dari Pemerintah Kota Blitar sendiri diharapkan mampu menciptakan lapangan-lapangan kerja baru dalam hal ini mengembangkan potensi UMKM yang ada di Kota Blitar sendiri. Karena posisi Kota Blitar sendiri yang telah kita ketahui pula selain sebagai jembatan penghubung yang strategis antar daerah di selatan seperti Tulungagung, Kediri, Malang juga sebagai tempat yang berpotensi untuk pariwisata, karena telah banyak kita ketahui pula banyak tempat-tempat wisata yang ada di Kota Blitar, yakni seperti Makam Bung Karno, Taman Air Sumber Udel, dan masih banyak lagi tempat wisata lain yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Untuk itu diharapkan potensi UMKM yang ada di Kota Blitar sendiri dapat dimanfaatkan dengan cukup apik mengingat beberapa potensi yang dimiliki tersebut, sehingga masyarakat Kota Blitar sendiri dapat mandiri dalam hal perekonomiannya pada khususnya dan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar pada umumnya. Hal tersebut tercantum juga dalam dokumen RPJMD daerah Kota Blitar tahun 2005-2025 yang mana didalamnya memuat tujuan untuk mewujudkan Koperasi dan UMKM yang tangguh, mandiri dan berdaya saing. Dengan tujuan tersebutlah maka diharapkan pengembangan UMKM sebagai dasar untuk penciptaan suatu kegiatan masyarakat yang mandiri dalam berwirausaha begitu didukung oleh pemerintah Kota Blitar sendiri guna meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di Kota Blitar tersebut.

Kondisi Kota Blitar yang seperti inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menguak lebih jauh mengenai pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mampu mengangkat perekonomian rakyat Kota Blitar serta dapat

menciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul **“Upaya Pemerintah Kota Blitar Dalam Pemberdayaan UMKM Guna Menciptakan Masyarakat Yang Mandiri. (Studi Pada Pemerintah Kota Blitar)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Blitar dalam pemberdayaan UMKM guna menciptakan masyarakat yang mandiri ?
2. Bagaimana dampak yang terjadi dimasyarakat dari upaya Pemerintah Kota Blitar dalam pemberdayaan UMKM sehingga bisa menciptakan masyarakat yang mandiri?
3. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dengan adanya pemberdayaan UMKM bagi masyarakat Kota Blitar sendiri yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal apa yang akan dituju dari kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Dan penelitian dapat bertujuan untuk menjajaki, menguraikan, menerangkan, dan menguji suatu gejala yang terjadi. Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisa kondisi perkembangan UMKM di Kota Blitar.

2. Untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisa proses kegiatan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar serta Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar.
3. Untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisa dampak pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar serta Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar bagi masyarakat Kota Blitar sehingga bisa menciptakan masyarakat yang mandiri.

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan dan gambaran bagi kalangan pemerintah dan pelaku (*stakeholder*) yang terlibat pada pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah guna menciptakan masyarakat yang mandiri.
- b. Dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Blitar sendiri yang dapat dipergunakan sebagai dasar, atau pedoman pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lebih lanjut guna memperbaiki kekurangan-kekurangan yang selama ini dilakukan dalam hal ini kaitannya tentang pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah guna menciptakan masyarakat yang mandiri.

2. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan atau sumber informasi bagi pihak lain khususnya pihak akademisi yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah guna menciptakan masyarakat yang mandiri
- b. Sebagai bahan kajian dan menambah wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu administrasi publik

E. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab I pendahuluan terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab II ini diuraikan tentang teori-teori atau temuan ilmiah dari buku, jurnal maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kajian tentang konsep pemberdayaan masyarakat, konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan konsep masyarakat mandiri.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab III ini diuraikan mengenai langkah-langkah penelitian diawali dari : jenis penelitian, fokus penelitian,

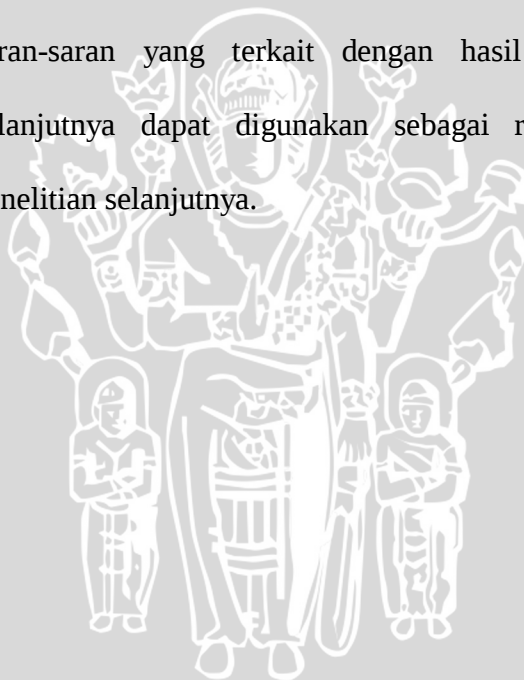
situs penelitian atau lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan tehnik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV ini diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data serta analisis dan interpretasi data.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab V ini akan diuraikan tentang kesimpulan yaitu temuan pokok penelitian sesuai dengan tujuan penlitian serta saran-saran yang terkait dengan hasil penelitian yang selanjutnya dapat digunakan sebagai rekomendasi pada penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Parson (Suryono, 2007:25) menyatakan bahwa “konsep *power* dalam masyarakat adalah variabel jumlah”. Menurut perspektif tersebut *power* masyarakat adalah kekuatan anggota masyarakat secara keseluruhan yang disebut tujuan kolektif. Logikanya pemberdayaan masyarakat miskin dapat tercapai bila ditunjang oleh struktur sosial yang tidak berpengaruh negatif terhadap kekuasaan (*powerful*). Dengan kata lain, kelompok miskin dapat diberdayakan melalui ilmu pengetahuan dan kemandirian sehingga dapat menjadi agen pembangunan.

Menurut Wahyono (Suryono, 2007:25) menyatakan bahwa “pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (*self-reliant communities*) sebagai suatu sistem yang mengorganisasikan diri mereka sendiri”. Pendekatan pemberdayaan masyarakat seperti itu diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai objek tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup mereka.

Menurut Suharto (2005:58) menyatakan pendapat beberapa definisi pemberdayaan menurut beberapa ahli yang dilihat dari tujuan, proses, dan cara pemberdayaan diantaranya:

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995).
- b. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang

mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parson,et.al, 1994).

- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987).
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas kehidupannya (rappaport, 1984).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Pemberdayaan masyarakat tentunya sangat penting untuk membina, membimbing serta mengarahkan masyarakat untuk bisa lebih mandiri. Hal ini tentunya menjadi modal kuat untuk merubah nasib masyarakat miskin untuk lebih bisa berkreasi dan menjadikan kehidupannya lebih mandiri lagi (segi ekonomi) bisa mencukupi sandang, pangan dan papan agar mampu bertahan hidup di era

persaingan bebas ini. Konsep pemberdayaan merupakan suatu sistem yang dapat digunakan sebagai agen pembangunan. Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Sebaiknya orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak keterampilan yang dimiliki oleh seseorang semakin baik pula kemampuan berpartisipasi.

2. Strategi Utama Pemberdayaan Masyarakat

Proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Strategi pemberdayaan begitu dirasa sangat penting guna mencapai suatu tujuan dari pemberdayaan itu sendiri. Tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan *link* dalam *setting* pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan dari *klien*, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam kontek pekerjaan sosial, Parson dalam (Suharto, 2005:66) menyatakan bahwa pemberdayaan dapat dilakukan melaui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empower setting*) : mikro, mezzo, dan makro, antara lain akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Aras mikro.

Pemberdayaan dilakukan terhadap *klien* secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih *klien* dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*Task Centered Approach*)

b. Aras mezzo.

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok *klien*. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap *klien* agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

c. Aras makro.

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang *klien* sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Dengan berpedoman pada strategi utama tersebut diharapkan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik, sehingga tujuan akhirnya pun dapat tercapai. Untuk itu penting sekali, suatu proses pemberdayaan masyarakat akan berjalan dengan baik jika diawali dengan penciptaan pemikiran-pemikiran ataupun konsep-konsep tentang strategi pemberdayaan itu sendiri. Karena tidak terpungkiri juga apabila suatu kegiatan berjalan tanpa dilandasi oleh strategi-strategi yang matang maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Untuk itu penerapan strategi yang tepat terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Blitar sangat diharapkan guna tercapainya tujuan dari pemerintah daerah sendiri dalam hal ini perbaikan taraf hidup masyarakatnya.

3. Tahap-Tahap Pemberdayaan

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat tentunya berjalan melalui proses-proses yang tidak cukup sederhana. Menurut Sulistiyani (2004:82) tahap-tahap pemberdayaan meliputi:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Dari poin tersebut dimaksudkan bahwa pada tahap ini pihak pemberdayaan/aktor/pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan afektifnya untuk mencapai kesadaran yang diharapkan. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan, agar mampu terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan.

Pada poin ini dimaksudkan bahwa proses transformasi pengetahuan, kecakapan, keterampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif, jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan

menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan keterampilan mereka yang membutuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang terendah yaitu sekedar menjadi pengikut atau obyek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan.

- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Pada poin ini dimaksudkan bahwa tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan keterampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi didalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan-pembangunan. Dalam konsep pembangunan masyarakat pada kondisi seperti ini seringkali kedudukan sebagai subyek pembangunan atau pemeran utama. Dalam hal ini pemerintah tinggal sebagai fasilitator saja.

Sejalan dengan pendapat Sumodiningrat (Sulistiyani, 2004:84) maka masyarakat yang sudah mandiri tidak dapat dibiarkan begitu saja. Dalam artian masyarakat tersebut tetap memerlukan perlindungan, supaya dengan kemandirian yang dimiliki dapat melakukan dan mengambil tindakan nyata dalam pembangunan. Disamping itu kemandirian mereka perlu dilindungi supaya dapat terpupuk dan terpelihara dengan baik dan selanjutnya dapat membentuk kedewasaan sikap masyarakat. Untuk itu, perlunya peran pemerintah dalam hal ini memberikan perlindungan terhadap masyarakat tersebut sehingga masyarakat mempunyai rasa aman untuk ikut dalam proses pembangunan itu sendiri.

B. KONSEP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

1. Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Berdasarkan bab I pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, maka yang dimaksud dengan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah adalah :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- c. Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Berdasarkan definisi diatas maka pada intinya Usaha, Mikro, kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

2. Asas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut Leonardus Saiman (2009 :7) berdasarkan bab II pasal II UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM, maka asas-asas Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah di antaranya:

- a. Asas kekeluargaan, yaitu yang menandai upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
- b. Asas demokrasi ekonomi, yaitu pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
- c. Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

- d. Asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- e. Asas keberlanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.
- f. Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- g. Asas kemandirian, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM.
- h. Asas keseimbangan kemajuan, adalah asas pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga kesinambungan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
- i. Asas kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

3. Prinsip Dan Tujuan Pemberdayaan

Berdasarkan bab II, pasal 4 dan pasal 5 UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM sebagai berikut.

a. Prinsip Pemberdayaan UMKM:

- 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- 2) Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- 3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM;
- 4) Peningkatan daya saing UMKM; dan
- 5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

b. Tujuan pemberdayaan UMKM

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- 3) Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

4. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan pasal 6 beserta penjelasannya, pada UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, kriteria UMKM antara lain:

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak (lima puluh milyar rupiah).

5. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Strategi yang dimaksud dalam pemberdayaan masyarakat berkenaan dengan metode atau cara yang digunakan. Melalui metode yang diupayakan ditemukan cara yang sederhana tetapi terorganisir dan berdaya guna dalam membangkitkan kemauan, kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat agar terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan. Strategi yang matang akan membuat proses pemberdayaan akan berjalan lebih baik. Menurut Situmorang (2008:87) strategi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah diantaranya:

a. Peningkatan Kualitas SDM

Poin tersebut dimaksudkan bahwa peningkatan kualitas SDM merupakan kegiatan sentral yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mencerdaskan bangsa. Namun demikian berbagai indikasi menunjukkan bahwa bentuk pendidikan formal tidak semua dapat menjamin peningkatan pengetahuan dari kelompok UMKM. Sebaliknya ada indikasi, bahwa sebagian UMKM tumbuh motivasi keterpaksaan karena mereka tidak mendapat lapangan kerja atau belum mendapatkan lapangan pekerjaan yang sesuai. Dengan demikian nampaknya dari aspek pendidikan formal sebagian UMKM sudah cukup baik tetapi dari keterampilan atau profesionalisme kondisi mereka masih perlu dipertanyakan. Dari sebab itu berbagai upaya yang telah dilakukan sendiri oleh UMKM antara lain adalah dengan belajar sendiri-sendiri (otodidak) atau ikut magang pada usaha sejenis yang telah ada sebelumnya.

b. Perijinan Usaha UMKM

Sulitnya mendapatkan perijinan merupakan masalah kedua yang tidak dapat dipecahkan sendiri oleh UMKM. Masalah ini semakin rumit dengan diberlakukannya otonomi daerah yang menyebabkan pemerintah daerah mengeluarkan berbagai peraturan daerah yang tidak semua sejalan dengan peraturan pemerintah. Penataan dan penyempurnaan peraturan daerah (Perda) perlu dilakukan dalam rangka mendukung pemberdayaan UMKM. Peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM merupakan satu-satunya solusi yang dapat disarankan, karena UMKM tidak dapat melakukan upaya apapun selain mengeluarkan biaya (yang relatif tinggi) untuk mengatasi masalah perijinan ini.

c. Peningkatan Permodalan

Peningkatan permodalan bagi UMKM dilakukan antara lain melalui program pengembangan berbagai skim perkreditan untuk UMKM dan program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro. Dalam hal ini Pemerintah Kota Blitar diharapkan mampu untuk memberikan bantuan modal bagi jalannya kegiatan pemberdayaan UMKM yang ada di Kota Blitar sendiri. Pemberian modal tersebut diupayakan mampu membantu para masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Karena telah kita ketahui pula kebanyakan UMKM yang ada di Kota Blitar sendiri banyak mengalami permasalahan dalam hal permodalan usaha. Untuk itu peran dalam penyediaan modal bagi usaha UMKM oleh Pemerintah Kota Blitar sendiri sangat diharapkan guna menjaga keberlangsungan usaha yang dilakukan oleh para masyarakat tersebut.

d. Peningkatan Kualitas Teknologi

Program ini sudah direncanakan dan mungkin sudah dilaksanakan di tempat lain tetapi di lokasi sampel belum ditemukan, walaupun

sudah dinyatakan ada. Salah satu faktor yang menghambat program ini adalah prosedur pengajuan dan pengiriman barang ke daerah yang banyak memakan waktu (terlalu lama) dengan banyak pos pemberhentian. Untuk mempercepat proses pengiriman sebaiknya diberikan dalam bentuk uang karena harga barang yang dikirim bisa lebih mahal dari pada dibeli di lokasi UMKM calon pengguna. Demikian juga kesiapan SDM pengguna (operator), persiapannya harus dilakukan jauh-jauh hari, tetapi ini semua memang sangat sulit karena untuk proses pengajuannya saja sudah memakan waktu yang cukup panjang. Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah teknologi yang digunakan tidak mematikan teknologi tradisional dari pengusaha lain (yang juga UMKM) sehingga tidak memperbesar pengangguran (misal sewaktu huller dan traktor masuk desa banyak orang yang jadi pengangguran). Dari hasil pengamatan lapang juga perlu dikemukakan bahwa pengembangan teknologi produksi tidak harus selalu diorientasikan pada perkembangan teknologi introduksi, tetapi juga harus dipertimbangkan adanya pengembangan teknologi oleh masyarakat lokal, yang jika difasilitasi oleh pemerintah mungkin hasilnya bisa lebih baik dari teknologi yang diintroduksi. Demikian juga penelitian dan pengembangan teknologi produksi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian perlu mendapat dorongan dan fasilitasi dari pemerintah, misalnya dengan melakukan lomba dan

sayembara. Hasil pengamatan lapang memperlihatkan kelompok UMKM yang mendapatkan bantuan perkuatan hampir semuanya belum melakukan pergantian teknologi. Alasan yang paling banyak dikemukakan adalah bahwa mereka tidak mendapatkan informasi tentang adanya teknologi yang lebih bagus. Mereka juga mengatakan bahwa teknologi yang mereka gunakan masih cukup efisien dan mereka tidak memiliki modal untuk mengganti teknologi yang digunakan sekarang ini.

e. Pengembangan Pasar UMKM

Salah satu masalah besar yang dihadapi dalam pemberdayaan UMKM adalah rendahnya akses UMKM terhadap pasar. Teori ekonomi menjelaskan bahwa konsep pemasaran meliputi 4 unsur pendukung yaitu produk, harga, tempat atau lokasi dan promosi produk. Keempat aspek ini saling terkait dalam meningkatkan fungsi pemasaran. Dari keempat unsur tersebut promosi dalam upaya memperkenalkan produk dan mengembangkan jaringan pasar merupakan kegiatan yang telah banyak dilakukan oleh UMKM baik secara mandiri maupun dengan bantuan para *stakeholder* terutama pemerintah. Kegiatan ini memang memiliki posisi strategis sebagai faktor kunci yang menghubungkan atau memperkenalkan produk yang dihasilkan UMKM kepada konsumen atau pasar. Pengertian promosi adalah kegiatan yang ditujukan untuk memperkenalkan UMKM dan produknya kepada

konsumen, sehingga UMKM dapat eksis dan permintaan terhadap produknya meningkat. Dengan dikenalnya produk UMKM tersebut diharapkan dapat meningkatkan volume usaha UMKM. Dari adanya peningkatan volume usaha diharapkan UMKM dapat meningkatkan laba. Meningkatnya laba akan berdampak pada meningkatnya tabungan (*saving*) yang dapat mendukung upaya perluasan skala usaha yang pada akhirnya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, promosi harus dilakukan secara profesional dalam artian pelakunya (pengusaha) harus dapat memilih bentuk promosi yang memiliki efektifitas dan efisiensi tinggi. Untuk tujuan tersebut produsen harus mengalokasikan sejumlah sumber daya baik dana, waktu maupun tenaga yang jumlahnya bisa cukup besar. Oleh sebab itu, untuk ikut dalam kegiatan promosi, UMKM sejak awal harus memperhitungkan kelayakan, keikutsertaannya dalam program promosi. Beberapa faktor yang harus diperhitungkan oleh UMKM sebagai produsen adalah kelayakan penggunaan dana, jenis barang yang akan dipasarkan, peluang pasar, pesaing, barang substitusi dan komplementer, selera konsumen atas barang tersebut, trend atau mode serta faktor-faktor eksternal lainnya. Beberapa kegiatan promosi yang paling banyak dilakukan baik oleh UMKM maupun para *stakeholder* adalah berupa pameran, *trading board*, misi dagang dan temu bisnis, baik di dalam maupun di luar negeri. Pada

kegiatan ini, UMKM memperkenalkan berbagai jenis produknya dengan tujuan utama untuk memperoleh pembeli (buyers). Dalam berbagai jenis pameran/festival, banyak terbuka peluang bagi UMKM untuk menjual produknya secara langsung, tetapi penjualan langsung ini umumnya kurang menguntungkan karena laba yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Beberapa hasil pengamatan empiris menunjukkan bahwa pada kesempatan pameran, UMKM lebih cenderung menjual produknya secara retail. Kebiasaan ini menandakan bahwa UMKM masih terobsesi pada kesempatan pameran lokal yang menjadi ajang penjualan langsung, dan belum berorientasi kepada sistem bisnis modern, yang mengutamakan relasi dan kesinambungan pasar.

C. KONSEP MASYARAKAT MANDIRI

1. Definisi Masyarakat Mandiri

Konsep masyarakat mandiri merupakan penggabungan dari dua kata yang yakni antara masyarakat dan mandiri. Pemikiran mengenai masyarakat mandiri tentunya terbayang suatu keadaan masyarakat yang mampu melakukan segala macam hal kegiatan dengan hasil usahanya sendiri. Masyarakat menurut Korten (Muluk, 2009:74) menggambarkan sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama. Mengutip Leach & Percy (Muluk, 2009:75) menawarkan dua pendekatan untuk mendefinisikan masyarakat:

- a. Pendekatan yang merumuskan masyarakat dari pola kehidupan dan pekerjaan orang-orang (*effective community*).

Maksudnya pendekatan ini menyiratkan adanya perbedaan antara masyarakat kota dan desa. Dengan demikian, masyarakat lebih diartikan sebagai sekelompok orang yang memiliki kesamaan. Ini berarti menunjuk pada penduduk dalam wilayah geografis tertentu dan diasumsikan mereka tinggal dalam batas-batas teritorial pemerintah daerah tertentu.

- b. Pendekatan yang memusatkan perhatian pada cara orang mengidentifikasi dirinya dan cara mereka merasakan loyalitas tertentu (*affective community*).

Maksudnya masyarakat tidak dihubungkan dengan wilayah, tetapi lebih dihubungkan dengan konteks tertentu yang mempengaruhi identitas dan loyalitasnya. Jadi pendekatan ini dipengaruhi oleh mobilitas sosial dan geografis dan banyak orang yang memiliki beragam identitas dan loyalitas.

Dan dari hasil pengertian masyarakat dari konsep Leach & Percy maka dapat ditarik suatu bentuk perbedaan. Yang mana hal tersebut dapat kita lihat dari Pendekatan yang memusatkan perhatian pada cara orang mengidentifikasi dirinya dan cara mereka merasakan loyalitas tertentu (*affective community*) dan Pendekatan yang merumuskan masyarakat dari pola kehidupan dan pekerjaan orang-orang (*effective community*). Seperti yang dapat kita lihat dalam gambar dibawah ini:

Tabel 4.
Perbedaan Konsep Masyarakat Dalam Pemerintahan Daerah

Perbedaan Konsep Masyarakat	
<i>Affective Community</i>	<i>Effective Community</i>
a. Pengaruh budaya dan pola kehidupan komplek	a. Pola kehidupan dan pekerjaan masyarakat
b. Merujuk pada identitas dan loyalitas	b. Merujuk pada batas teritorial
c. Pengaruh mobilitas sosial dan geografis	c. Perbedaan masyarakat desa-kota
d. Konsep masyarakat lebih elastis	d. Konsep masyarakat bisa lebih rigid

Sumber : Muluk (2009)

Dari dua pengertian tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dengan memiliki kepentingan yang sama antara individu satu dengan yang lain.

Sedangkan kata mandiri menurut Saefudin (2003:19) definisi dari mandiri adalah sebagai kemampuan sendiri, artinya menggunakan sumber daya sendiri, kerja sendiri, dan dalam lingkungan yang diciptakan sendiri (tertutup). Dan juga konsep mandiri sendiri menurut Suyono (2003:7) merupakan perimbangan kekuatan antara masyarakat lokal (daerah) dan negara dalam menentukan arah dan tujuan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Jadi intinya mandiri adalah suatu keadaan dimana seseorang dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain guna mencapai arah dan tujuan sosial yang terjadi dalam suatu kehidupan masyarakat. Dari dua kata tersebut maka dapat dikatakan bahwa masyarakat mandiri sendiri memiliki pengertian sekelompok individu yang mendiami suatu wilayah tertentu yang memiliki kepentingan yang sama namun tidak tergantung

satu sama lain antar individu guna mencapai arah dan tujuan sosial yang terjadi dalam suatu kehidupan bermasyarakat.

2. Aspek-Aspek Keterjaminan Sosial Yang Dapat dikatakan Masyarakat

Mandiri.

Kemiskinan merupakan bentuk ketidaksejahteraan yang paling nyata dalam kehidupan manusia. Fungsi dari dibentuknya suatu individu/masyarakat mandiri adalah guna tercapainya suatu keadaan dimana individu/masyarakat tersebut dapat terpenuhinya keterjaminan sosial (kesejahteraan sosial) dalam hidupnya. Menurut Soemarjan (Saefudin, 2003:27) mengungkapkan bahwa indikator keluarga sejahtera pada dasarnya disusun untuk menilai taraf pemenuhan kebutuhan keluarga yang dimulai dari kebutuhan yang sangat mendasar sampai dengan pemenuhan kebutuhan yang diperlukan untuk pengembangan diri dan keluarga. Ukuran taraf pemenuhan kebutuhan dibagi dalam tiga kelompok dan masing-masing kelompok dibagi dalam variabel yang masing-masing ditetapkan rincian variabelnya sebagai kumpulan dari indikator keluarga sejahtera yang mandiri, sebagai berikut:

a. Kebutuhan dasar atau *basic needs*, yang terdiri dari variabel:

- 1) Pangan
- 2) Sandang
- 3) Papan
- 4) Kesehatan

b. Kebutuhan sosial psikologis atau *social-psychological needs* yang terdiri

dari :

- 1) Pendidikan
- 2) Rekreasi
- 3) Transportasi
- 4) Interaksi sosial internal dan eksternal

c. Kebutuhan pengembangan atau *development needs* yang terdiri dari:

- 1) Tabungan
- 2) Pendidikan khusus/kejuruan
- 3) Akses terhadap informasi

Berdasarkan uraian diatas, aspek-aspek keterjaminan sosial yang akan dibangun perlu mencakup: ketahanan pangan, kesehatan, sandang, kerja, dan usaha, perumahan dan pendidikan. Menurut Saefudin (2003:28) urutan tersebut diperkirakan merupakan urutan kepekaan masyarakat terhadap krisis. Artinya, jika krisis melanda maka pertama kali akan dikorbankan adalah pendidikan dan jika telah mencapai krisis pangan maka kondisi yang terjadi sudah merupakan bencana yang sangat serius.

Upaya untuk mengembangkan kelembagaan jaminan sosial ditingkat masyarakat didorong untuk senantiasa berkembang atas nilai-nilai tolong-menolong dan gotong-royong. Untuk mengatasi masalah tersebut tidak harus seluruhnya tergantung kepada negara, tetapi bisa diselenggarakan oleh organisasi lain. Dalam kaitanya dengan masyarakat mandiri, bukan berarti negara tidak boleh mengintervensi golongan kurang beruntung, tetapi lebih dimaksudkan, agar

mereka jangan tergantung kepada negara, namun mereka dapat hidup mandiri guna mencapai kesejahteraan hidup yang mana kesejahteraan hidup itu dapat tercapai jika telah terpenuhinya indikator keluarga sejahtera tersebut diatas.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana menurut Narbuko dan Achmadi (1997:44) penelitian deskriptif adalah "penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi". Jadi penelitian deskriptif bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu teori. Maka, dari penelitian deskriptif kualitatif yang menjadi jenis penelitian peneliti sangat berguna dalam mendeskripsikan, menguraikan, menginterpretasikan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, sehingga dapat mengambil kesimpulan dari permasalahan tersebut yang disajikan dalam bentuk tulisan secara sistematis tentang upaya Pemerintah Kota Blitar dalam

pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) guna menciptakan masyarakat yang mandiri

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai bagian dari sebuah penelitian merupakan batasan-batasan masalah yang ingin diteliti oleh peneliti dalam penelitiannya, sehingga dengan adanya fokus penelitian masalah-masalah, data, informasi, dan hasil yang dikumpulkan, diamati, diolah, dan dianalisis oleh peneliti tidak melebar ke permasalahan lain yang bukan menjadi fokus penelitian yang telah ditentukan.

Menurut pendapat Moleong (2006:12) bahwa penelitian kualitatif menghendaki ditetapkan adanya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal, yaitu: batas menentukan kenyataan jamak yang kemudian mempertajam fokus, dan penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus. Adapun fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya Pemerintah Kota Blitar mengenai Pemberdayaan UMKM yang ada di Kota Blitar yang tertuang pada Renstra Instansi terkait permasalahan UMKM di Kota Blitar.
 - a. Program Kerja Pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah Kota Blitar
 - 1) Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar
 - 2) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Blitar
 - b. Kegiatan Pemberdayaan meliputi:
 - 1) Pemberdayaan Manajemen Sumber Daya Pelaku UMKM
 - 2) Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pelaku UMKM

3) Pemberdayaan Sarana Prasarana UMKM

2. Dampak pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di Kota Blitar bagi masyarakat pelaku UMKM itu sendiri.

a. Pemberi Program Pemberdayaan UMKM

1) Dampak Positif

2) Dampak Negatif

b. Penerima Program Pemberdayaan UMKM

1) Dampak Positif

2) Dampak Negatif

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di Kota Blitar

a. Faktor Penghambat

b. Faktor Pendukung

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dari peneliti akan dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan terhadap rumusan masalah yang menjadi penelitian peneliti. Lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Pemerintah Kota Blitar

Situs penelitian adalah lokasi atau tempat dimana peneliti menangkap atau fenomena yang sebenarnya dari obyek yang diteliti guna memperoleh data. Adapun situs penelitian dalam penelitian ini adalah di Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, serta UMKM yang ada di Kota Blitar sendiri.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber-sumber data yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu orang-orang, peristiwa-peristiwa, dokumen-dokumen, dan data-data. Menurut Lofland, sebagaimana dikutip Moleong (2006: 157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Hal ini karena dalam penelitian kualitatif cenderung mengutamakan wawancara dan pengamatan langsung (observasi) dalam memperoleh data yang bersifat tambahan. Sumber data yang tidak tepat akan mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan.

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh secara langsung dari sumbernya berupa kata-kata, tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar serta pelaku UMKM Kota Blitar itu sendiri.
2. Data Sekunder, merupakan data pendukung yang berasal dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, serta arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian tentang upaya Pemerintah Kota Blitar dalam Pemberdayaan UMKM guna menciptakan masyarakat yang mandiri yang ada Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar di antara lain:

- a. Data yang berupa dokumen-dokumen resmi dan arsip-arsip dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar
- b. Media Massa, *website*, makalah atau *paper*, laporan dari hasil penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam kegiatan penelitian cara untuk memperoleh atau mengambil data atau informasi disebut teknik pengumpulan data. Sehingga dapat menggunakan cara-cara yang tepat untuk mengumpulkan data yang akurat dalam menjawab permasalahan yang ada. Maka teknik pengumpulan yang dapat dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistemik gejala-gejala yang diselidiki (Narbuko dan Achmadi, 1997:70). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap upaya Pemerintah Kota Blitar dalam pemberdayaan UMKM guna menciptakan masyarakat yang mandiri. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung pada dinas terkait yakni Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dan juga pelaku UMKM sendiri guna memperoleh data yang peneliti harapkan sesuai dengan topik penelitian tersebut.

2. Interview (wawancara)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Tujuan wawancara untuk mengumpulkan informasi dan bukannya untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden (Narbuko dan Achmadi, 1997:83). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara menanyakan terhadap Upaya Pemerintah Kota Blitar dalam Pemberdayaan UMKM guna Menciptkan Masyarakat yang Mandiri, serta faktor pendukung dan penghambatnya kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar agar supaya diharapkan peneliti memperoleh jawaban terhadap apa saja permasalahan yang akan diteliti tersebut yang terfokus pada fokus penelitian tersebut.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. (Usman dan Akbar, 2006: 73). Dalam hal ini peneliti akan mencari data-data tertulis dari dinas terkait yang berkenaan dengan fokus yang akan diteliti yakni pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipergunakan untuk mengumpulkan data atau informasi. Dalam suatu penelitian, alat pengambil data atau instrumen menentukan kualitas data yang dapat dikumpulkan dan kualitas itu menentukan kualitas penelitiannya, Oleh karena itu dalam suatu penelitian, instrumen yang digunakan atau dibuat harus cermat (Wisadirana, 2005: 59). Jenis instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri, peneliti sendiri dapat menggunakan panca indera dalam melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang terjadi di tempat penelitian (Moleong, 2006:168).
2. Pedoman wawancara (*interview guide*), peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk mengarahkan peneliti dalam rangka mencari data. Pedoman wawancara itu sendiri merupakan serangkaian pokok-pokok pertanyaan yang hendak diajukan kepada responden dalam penelitian.
3. Catatan lapangan (*field notes*), merupakan catatan penting yang digunakan untuk mencatat hasil wawancara dan pengamatan di lapangan.
4. Alat tulis dan alat-alat lain yang diperlukan untuk mengumpulkan data, seperti *tape recorder* atau kamera, yang digunakan untuk mendokumentasikan dan mencatat berbagai informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.

G. Analisis Data

Kegiatan analisis adalah tahapan yang penting dan menentukan dalam kegiatan penelitian, karena pada tahap ini dengan melalui penggunaan data dan

akan diperoleh kesimpulan-kesimpulan kebenaran ilmiah sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan dengan menggunakan imajinasi dan kreativitas peneliti. Menurut Wisadirana (2005:101) analisis data sebenarnya adalah suatu proses kegiatan penyederhanaan data ke dalam bentuk tertentu agar lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Karena sesuai untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang akan diteliti dan sesuai dengan fokus serta teknik pengambilan data yang ada dalam penelitian peneliti.

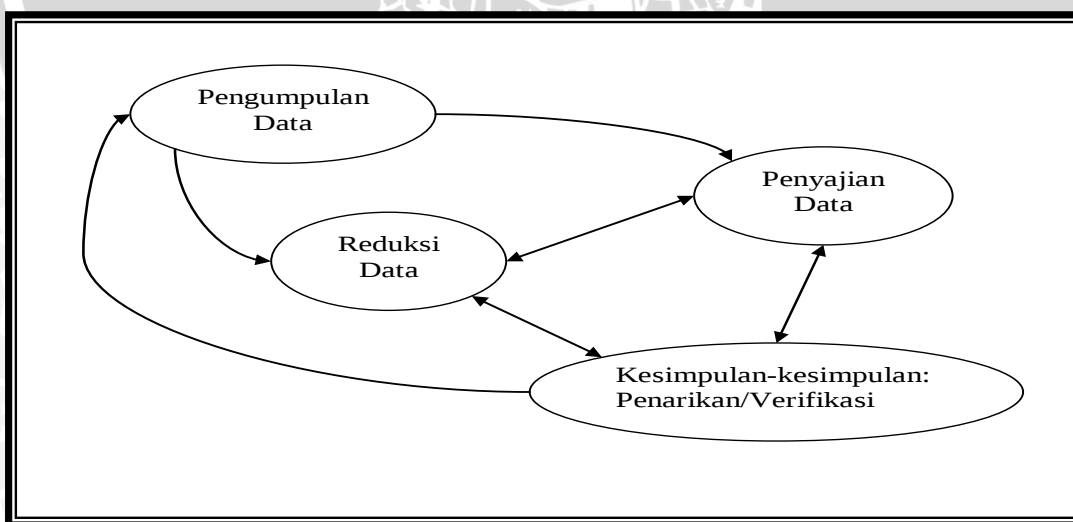
Data kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), dan biasanya diproses kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyutitan), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.

Analisis data yang digunakan peneliti selama penelitian dilakukan, memiliki alur kegiatan yang mengambil model analisis data dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan dalam analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut Miles dan Huberman diterjemahkan oleh (Sugiyono, 2009: 247):

1. Reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan (verifikasi), merupakan dari pengumpulan data, penganalisis mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi, sehingga diharapkan peneliti dapat menarik kesimpulan.

Telah dikemukakan tiga hal utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi) sebagai suatu jalinan saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi) menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul. Namun dua hal lainnya senantiasa merupakan bagian dari lapangan. (Miles dan huberman diterjemahkan oleh Sugiyono, 2009:247). Hubungan analisis data dari Miles dan Huberman terdapat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1.
Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif
(Sumber: Miles dan Huberman, diterjemahkan oleh Sugiyono).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Blitar.

1. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kota Blitar yang dikenal dengan sebutan Kota PATRIA, Kota Lahar dan Kota Proklamator secara legal formal di dirikan pada tanggal 1 April 1906. Dalam perkembangannya kemudian momentum tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kota Blitar. Walaupun status pemerintahannya adalah Pemerintah Kota, tidak serta merta menjadikan mekanisme kehidupan masyarakatnya seperti yang terjadi di kota-kota besar. Memang ukurannya pun tidak mencerminkan sebuah kota yang cukup luas. Level yang dicapai Kota Blitar adalah sebuah kota yang masih tergolong klasifikasi kota kecil dan kota besar. Secara faktual sudah bukan kota kecil lagi, tetapi juga belum menjadi kota besar.

Membicarakan Kota Blitar, tidaklah lengkap kalau tidak menceritakan semangat perjuangan yang tumbuh berkembang dan kemudian terus menggelora serta menjiwai seluruh proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di kota ini. Di kota ini tempat disemayamkannya Bung Karno, Sang Proklamator, Presiden Pertama RI, idolog dan pemikir besar dunia yang dikagumi baik oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Kota Blitar juga merupakan salah satu tempat bersejarah bagi Bangsa Indonesia, dimana sebelum dicetuskannya proklamasi di tempat ini, telah diserukan kemerdekaan Indonesia yang diikuti dengan pengibaran Sang Merah Putih yang kemudian berujung pada Pemberontakan PETA oleh Soedanco Supriyadi.

Masyarakat Kota Blitar sangat bangga sebagai pewaris Aryo Blitar, pewaris Supriyadi dan pewaris Soekarno, yang *nationalistic - patriotic*. Pemerintah Kota Blitar sadar akan hal ini, semangat itu dilestarikan dan dikobarkan, dimanfaatkan sebagai modal pembangunan ke depan. Tidak heran kalau akronim PATRIA dipilih sebagai semboyan. Kata PATRIA ini disusun dari kata PETA, yang diambil dari legenda Soedanco Supriyadi yang memimpin pemberontakan satuan Pembela Tanah Air (PETA) di Blitar pada Jaman Penjajahan Jepang, serta dari kata Tertib, Rapi, Indah, dan Aman. Selain itu, kata PATRIA memang sengaja dipilih karena didalamnya mengandung makna "cinta tanah air". Sehingga dengan menyebut kata PATRIA orang akan terbayang kobaran semangat nasionalisme.

Kota Blitar terletak ± 160 km sebelah barat daya Kota Surabaya dan berada di tengah wilayah Kabupaten Blitar. Kota ini terletak pada koordinat $112^{\circ}14'$ - $112^{\circ}28'$ Bujur Timur dan $8^{\circ}8'$ - 8° Lintang Selatan. Kota Blitar hanya berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar karena posisinya yang berada di tengah-tengah Kabupaten Blitar. Adapun Kecamatan di Kabupaten Blitar yang berbatasan dengan wilayah Kota Blitar adalah sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Nglegok, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Garum, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kanigoro, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sanankulon.

Luas Kota Blitar yang hanya mencapai $32,58 \text{ km}^2$, Kota Blitar terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan dan masing masing-masing kecamatan terbagi menjadi 7 (tujuh) kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sananwetan dengan luas $12,15 \text{ km}^2$ kemudian Kecamatan Kepanjenkidul $10,50 \text{ km}^2$ dan

Kecamatan Sukorejo 9,93 km². Dari 21 kelurahan yang ada, kelurahan terluas adalah Kelurahan Sentul yang terletak di Kecamatan Kepanjenkidul yaitu 2,68 km². Sementara Kelurahan dengan luas terkecil adalah Kelurahan Turi. Kecamatan Sukorejo yaitu 0,51 km². Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat tabel berikut:

Tabel 5.
Luas Wilayah Menurut Kelurahan (Km²) Kota Blitar 2010

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah Km ²
Sukorejo		9.9246
	Tlumpu	1.0153
	Karang Sari	0.8824
	Turi	0.5086
	Blitar	1.3321
	Sukorejo	1.4662
	Pakunden	2.2620
	Tanjungsari	2.4581
Kepanjenkidul		10.5023
	Kepanjenkidul	0.8670
	Kepanjenlor	0.6133
	Kauman	0.6803
	Bendo	1.5185
	Tanggung	2.2300
	Sentul	2.6830
	Ngadirejo	1.9102
Sananwetan		12.1516
	Rembang	0.8443
	Klampok	1.5307
	Plosokerep	1.2481
	Karangtengah	1.7954
	Sananwetan	2.1279
	Bendogerit	1.9552
	Gedog	2.6500

Sumber : BPS Kota Blitar 2011

Dilihat dari kedudukan dan letak geografisnya, Kota Blitar tidak memiliki sumber daya alam yang berarti, karena seluruh wilayahnya adalah wilayah

perkotaan, yang berupa pemukiman, perdagangan, layanan publik, sawah pertanian, kebun campuran dan pekarangan. Oleh karena itu, sebagai penggerak ekonomi Kota Blitar mengandalkan potensi diluar sumber daya alam, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

2. Topografi

Rata-rata ketinggian Kota Blitar dari permukaan air laut sekitar 156 m. ketinggian di bagian utara sekitar 245 m dengan tingkat kemiringan 2° sampai 15°, bagian tengah 175 m dan bagian selatan 140 m dan dari permukaan air laut dengan tingkat kemiringan 0° sampai 2°. Dilihat dari topografi wilayah Kota Blitar masih termasuk dataran rendah. Satu-satunya yang mengalir di Kota Blitar adalah sungai Lahar dengan panjang $\pm 7,84$ km. Hulu sungai lahar berada di gunung Kelud menuju ke sungai Brantas. Keadaan tanah di Kota Blitar berupa tanah regusol dan litusol. Jenis tanah regusol berasal dari gunung Kelud (Vulkan) sedang jenis tanah litusol mempunyai konsistensi gembur, korositas tinggi dan tahan terhadap erosi.

3. Pemerintahan Daerah

Kota Blitar dipimpin oleh seorang Walikota dan Wakil Walikota. Secara administratif wilayah Kota Blitar terbagi menjadi dalam 3 kecamatan dan 21 kelurahan. Sepanjang tahun 2010 tidak terjadi pemekaran ataupun penggabungan RW maupun RT. Dengan demikian jumlah RW dan RT masih sama dengan tahun 2009 yaitu 186 RW dan 634 RT. Hal ini dapat kita per jelas dengan melihat tabel berikut:

Tabel 6.
Kelurahan, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga menurut Kecamatan Kota Blitar 2010

Kecamatan	Kelurahan	Rukun Warga (RW)		Rukun Tetangga (RT)
1. Sukorejo	7	49		176
2. Kepanjenkidul	7	63		209
3. Sananwetan	7	74		249
Kota Blitar	2010	21	186	634
	2009	21	186	634
	2008	21	186	634
	2007	21	183	617
	2006	21	183	617

Sumber : BPS Kota Blitar 2011

Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa, pernah terjadi peningkatan jumlah RT pada tahun 2007 tahun 2008 yang mana hal ini menunjukkan bahwa terjadi pemekaran tingkat RT sehingga diharapkan semua kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan bisa terlayani dengan cepat. Mengingat jumlah penduduk Kota Blitar tiap tahun selalu meningkat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pengertian Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berangkat dari data dan informasi saat ini serta analisis isu-isu strategis yang berkembang dengan memperhitungkan potensi sumber daya dan faktor strategis yang dimiliki oleh masyarakat Kota Blitar, maka visi Kota Blitar ditetapkan sebagai berikut :

a. Visi Pemerintah Kota Blitar :

“Menuju masyarakat Kota Blitar sejahtera yang berkeadilan dan religius melalui APBD pro rakyat pada tahun 2015”. Adapun makna visi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohaniah dalam berbagai aspek kehidupan sebagai individu dan anggota masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat, serta semakin kondusifnya lingkungan kehidupan sosial masyarakat.
- 2) Berkeadilan merupakan suatu sikap dan tindakan yang memperlakukan orang lain sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya serta memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat. Dengan demikian proses pembangunan harus memperhatikan asas pemerataan sehingga manfaat dan hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
- 3) Religius adalah kondisi masyarakat yang menjunjung norma-norma agama, berpegang teguh kepada ajaran agama sebagai landasan moral dan etika yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) APBD Pro Rakyat mengandung makna bahwa APBD Kota Blitar dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

b. Misi Pemerintah Kota Blitar:

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Atas dasar makna misi dimaksud serta

berlandaskan kepada makna visi kota yang telah ditetapkan, Misi Kota Blitar periode 2011 – 2015 sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan Berketuhanan Yang Maha Esa.

Mengandung makna bahwa keseluruhan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan didasarkan pada fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika serta diarahkan pada terwujudnya suatu tatanan sosial masyarakat yang memiliki karakter Nasionalis-Religius sebagai pengejawentahan nilai-nilai luhur yang bersumber dari agama, nasionalisme, dan kearifan lokal.

- 2) Meningkatkan sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Pada hakekatnya sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan diarahkan pada upaya peningkatan kualitas serta pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkeadilan sehingga akan tercapai derajat kesehatan dan tingkat pendidikan masyarakat yang lebih baik.

- 3) Memantapkan pelaksanaan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan.

Mengandung makna bahwa pembangunan perekonomian daerah dilaksanakan dengan mengembangkan potensi ekonomi terutama dibidang pariwisata, perdagangan dan jasa serta harus berpihak kepada masyarakat menengah dan miskin dengan menitikberatkan pengembangan sektor koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta pelaku usaha informal

untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mampu mandiri dalam memenuhi segala macam barang kebutuhannya.

- 4) Memantapkan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan yang Partisipatif berdasar prinsip-prinsip Otonomi Daerah.

Berarti bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan di Kota Blitar harus mampu mensinergikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup serta memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat didalam pelaksanaan proses pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip otonomi daerah yang didukung oleh aparaturnya profesional dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan melihat Visi dan Misi Pemerintah Kota Blitar tersebut maka sudah terbukti bahwa Pemerintah Kota Blitar benar-benar berpihak pada sistem perekonomian berbasis kerakyatan yang mana dapat kita lihat dengan jelas misi pada poin ke-3 Memantapkan pelaksanaan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan. Hal itu jelas terbukti jika pengembangan sektor perekonomian pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah sangat ditekankan oleh Pemerintah Kota Blitar sendiri.

c. Sapta Program Prioritas

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dengan menempatkan sekolah sebagai basis pendidikan masyarakat dan puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Pengembangan ekonomi lokal dengan titik berat kepada pemberdayaan pelaku ekonomi mikro, terutama kalangan pengusaha kecil dan

menengah sebagai prasyarat perwujudan Kota Blitar sebagai kota perdagangan dan jasa.

3. Peningkatan semangat kejuangan dan cinta tanah air yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai prasyarat perwujudan Blitar sebagai Kota PATRIA.
4. Peningkatan kualitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan mengedepankan cara-cara persuasif didalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
5. Peningkatan kualitas kebersihan kota dan penataan lingkungan hidup menuju kota Blitar sebagai kota yang nyaman untuk ditinggali dan menarik untuk dikunjungi.
6. Peningkatan kualitas pelayanan prima pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai muara dari proses reformasi dan reformasi pembangunan kota.
7. Peningkatan kualitas penerapan tata ruang kota untuk mengantisipasi perkembangan wilayah pembangunan regional, nasional dan global.

4. Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi penduduk, jumlah penduduk Kota Blitar pada tahun 2010 meningkat sebesar 0,79 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika tahun 2009 jumlah penduduk mencapai 139.471 jiwa, maka pada tahun 2010 mencapai 140.574 iwa. Sedangkan rasio jenis kelaminnya masih tetap dibawah 100 yang artinya jumlah penduduk perempuan masih lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki

Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Sananwetan dengan jumlah penduduk sebesar 52.742 jiwa, diikuti Kecamatan Sukorejo sebesar 47.750 jiwa, dan yang terkecil adalah penduduk Kecamatan Kepanjenkidul sebesar 40.082 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk Kota Blitar pada tahun 2010 mencapai 4.135 jiwa/km² atau sekitar 4 orang/m². Sedangkan kecamatan terpadat adalah Kecamatan Sukorejo yaitu 4.811 jiwa/km². Diikuti Kecamatan Sananwetan yaitu 4.340 jiwa dan Kecamatan Kepanjenkidul yaitu 3.816 jiwa/km².

Masih seperti tahun-tahun sebelumnya, kelurahan dengan penduduk terpadat adalah Kelurahan Sukorejo dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 9.622 jiwa/km², diikuti dengan Kelurahan Kepanjenlor 9.410 jiwa/km² dan Kelurahan Kepanjenkidul 9.258 jiwa/km². Ketiga Kelurahan tersebut merupakan sentra kegiatan ekonomi di Kota Blitar sehingga wajar jika tingkat kepadatannya sangat tinggi. Sehingga banyak sekali penduduk yang memilih tinggal disekitar kelurahan tersebut.

Tingkat kelahiran di Kota Blitar sepanjang tahun 2010 naik 25% dibandingkan dengan tahun 2009. Total sepanjang tahun 2011 ada 1.861 bayi yang dilahirkan hidup atau rata-rata 155 bayi per bulan. Tingkat kelahiran bayi laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan bayi perempuan yaitu 943 bayi laki-laki dan 918 bayi perempuan. Sebaliknya kejadian kematian selama tahun 2010 lebih rendah dibandingkan tahun 2009 yaitu 1.184 jiwa menjadi 1.169 jiwa. Hal tersebut dapat kita lihat seperti tabel dibawah ini:

Tabel 7.
Kelahiran, Kematian, Datang dan Pindah per Kecamatan
Kota Blitar Tahun 2011

Kecamatan	Kelahiran	Kematian	Penduduk Datang	Penduduk Pindah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sukorejo	544	397	1.060	844
Kepanjenkidul	416	370	986	947
Sananwetan	901	402	1.382	1.226
Kota Blitar	2010	1.861	1.169	3.428
	2009	1.486	1.184	2.805
	2008	1.617	1.119	3.318
	2007	1.497	1.168	4.986
	2006	1.214	1.152	2.908

Sumber : BPS Kota Blitar 2011

Dengan melihat tabel tersebut terlihat jelas jika pertumbuhan penduduk di Kota Blitar sendiri cukup pesat. Tingkat laju urbanisasinya pun juga cukup tinggi, maka hal ini membuktikan bahwa Kota Blitar dapat menjadi magnet bagi para penduduk di luar Kota Blitar untuk mencari penghidupan dan bertempat tinggal di Kota Blitar tersebut.

5. Potensi Pariwisata

Potensi pariwisata Kota Blitar tidak lepas dari nilai-nilai sejarah yang masih kental tergarut di kota yang pernah menjadi salah satu tempat berkecamuknya semangat kepahlawanan pejuang bangsa Indonesia. Nama-nama besar seperti Adipati Aryo Blitar, Proklamator Bung Karno, Soedanco Suprijadi, dan lain sebagainya menjadi inspirasi yang ikut mewarnai dinamika, arah, dan kemajuan kota yang sedang tumbuh ini.

Dalam upaya membangun iklim yang kondusif, didukung oleh sistem perdagangan barang dan jasa unggulan, Pemerintah Kota Blitar memilih sektor

pariwisata sebagai primadona untuk mengembangkan ekonomi daerah. Beberapa tempat tujuan wisata yang ada di Kota Blitar, dari waktu ke waktu kian dibenahi dan diperkaya guna meningkatkan potensi wisata di Kota Blitar.

Tempat tujuan wisata di Kota Blitar antara lain:

- a. Makam Bung Karno, tempat dimakamkannya presiden pertama sekaligus proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Makam ini terletak di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, sekitar 2 kilometer sebelah utara pusat kota.
- b. Perpustakaan dan Museum Bung Karno merupakan perpustakaan yang selain berisi segala bentuk memorabilia Bung Karno, juga dikembangkan sebagai pusat studi terpadu. Beberapa koleksi yang ada saat ini adalah lukisan hidup Bung Karno yang dapat berdetak tepat pada bagian jantungnya, uang bergambar Bung Karno yang dapat menggulung sendiri, dan koleksi sumbangan dari Yayasan Idayu.
- c. Istana Gebang atau lebih dikenal dengan sebutan *Ndalem Gebang*, merupakan rumah tempat tinggal orang tua Bung Karno. Istana ini bertempat di Jl. Sultan Agung 69. Di rumah ini pada setiap bulan Juni ramai didatangi pengunjung, baik dalam rangka peringatan hari ulang tahun Bung Karno maupun karena adanya kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Pemkot Blitar, seperti Grebeg Pancasila.
- d. Petilasan Arya Blitar merupakan sebuah makam dari Adipati Arya Blitar yang terletak di Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo. Makam ini ramai dikunjungi pada bulan Sura (Muharam) dan juga setiap malam Jumat legi.

- e. Monumen Supriyadi merupakan sebuah monumen untuk mengenang jasanya. Pada tahun 1945, Kota Blitar menjadi pusat pemberontakan tentara PETA yang dipimpin oleh Soedanco Supriyadi melawan tentara Jepang. Monumen ini terletak di depan bekas markas PETA dan Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya. Selain itu, juga dibangun sebuah patung setengah dada Supriyadi yang terletak di depan Pendapa Kabupaten Blitar.
- f. Kebon Rojo, yaitu taman hiburan dan rekreasi keluarga yang berada di belakang komplek rumah Dinas Walikota Blitar yang disediakan untuk masyarakat umum maupun wisatawan secara cuma-cuma. Di taman tersebut, terdapat beberapa jenis hewan peliharaan, fasilitas bermain anak-anak, tempat bersantai, panggung apresiasi seniman, air mancur, dan juga berbagai jenis tanaman langka yang berfungsi sebagai paru-paru kota.
- g. Taman Air Sumber Udel adalah taman air paling megah se-Karesidenan Kediri. Taman air ini diresmikan kembali oleh Walikota Blitar pada tanggal 10 Oktober 2007 setelah direnovasi selama kurang lebih satu setengah tahun. Fasilitas yang dimilikinya cukup lengkap bila dibandingkan dengan taman-taman air lain di Jawa Timur.

B. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar nomor 48 tahun 2008, Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pembinaan koperasi dan UMKM. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Dinas Koperasi dan UKM Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b. Pelaksanakan bimbingan teknis pelayanan perijinan;
- c. Pelaksanakan kajian dan penerapan dan penetapan badan hukum Koperasi;
- d. Pelaksanakan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- e. Peningkatan pendapatan asli daerah
- f. Penyusunan evaluasi dan pelaporan

Selanjutnya menurut Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 pasal 2, disebutkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Daerah terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekertaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Program
3. Bidang Kelembagaan, membawahi:
 - a. Seksi Organisasi dan Manajemen Koperasi
 - b. Seksi Organisasi dan Manajemen UKM
4. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi:
 - a. Seksi Penguatan Permodalan
 - b. Seksi Fasilitas Usaha
5. Bidang Pemberdayaan UKM membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan Modal

b. Seksi Peningkatan Kualitas Usaha

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekertaris sedangkan masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah

Uraian tugas dari masing-masing struktur adalah sebagai berikut

a. Kepala Dinas

Tugas

Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas maupun antara dinas organisasi dalam Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Fungsi

Merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Blitar, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Blitar. Sedang secara administratif bertanggung jawab dan mengkoordinasikan bawahannya. Memberikan bimbingan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan dan wajib mengawasinya, apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan ketentuan yang berlaku.

b. Sekertaris

Sekertaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi internal dan eksternal penatausahaan dan penatalaksanaan urusan kantor secara umum, pengelolaan administrasi dan pembinaan pegawai, perencanaan program serta perencanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka

memperlancar mekanisme organisasi Dinas Koperasi dan UKM Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian internal dan eksternal dalam rangka memperlancar penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah;
- b. Pengelolaan urusan dalam (rumah tangga) dan tata usaha Dinas Koperasi dan Usaha kecil Daerah;
- c. Pengelolaan administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- e. Pengkoordinasian, fasilitasi dan advokasi administrasi kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah Daerah;
- f. Pengkoordinasian, pembinaan dan penyelenggaraan administrasi keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah daerah;
- g. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan administrasi program Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah;
- h. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah;

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dimaksud, sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah dibantu oleh:

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas mengelola sarana prasarana, perlengkapan dan keamanan kantor, penyelenggaraan rapat dinas, pengurusan surat menyurat, pembinaan dan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- 1) Pengelolaan administrasi umum perkantoran yang mencakup urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan pengarsipan;
- 2) Pengelolaan, penatausahaan dan pengendalian pemanfaatan sarana, prasarana serta perlengkapan kantor;
- 3) Penyelenggaraan keamanan kantor yang mencakup keamanan sarana dan prasarana serta perlengkapan kantor maupun keamanan kantor selama sebelum, pada saat dan sesudah jam kerja;
- 4) Penyelenggaraan dan fasilitasi rapat-rapat dinas baik yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah maupun rapat-rapat dinas yang harus diikuti oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah;
- 5) Pengkoordinasian dan fasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi pengangkatan, kenaikan pangkat dan pensiun pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah.

b. Kepala Sub bagian Keuangan dan Program

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program bertugas mengelola urusan keuangan yang mencakup kegiatan perencanaan, penatausahaan dan

pertanggungjawaban keuangan serta mengkoordinasikan penyusunan rencana program tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi:

- 1) Pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang mencakup rencana anggaran operasional dan rencana anggaran kegiatan masing-masing unit kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah;
- 2) Pengkoordinasian kegiatan penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan seluruh unit kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 3) Pengelolaan urusan gaji pegawai Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah;
- 4) Penyiapan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah;
- 5) Penyusunan Neraca Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah;
- 6) Pengkoordinasian penyusunan laporan dan bertanggungjawaban keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Daerah;
- 7) Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah;
- 8) Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah;
- 9) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah;

10) Pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan insidental Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah Daerah;

11) Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan rencana program dan kegiatan serta kegiatan insidental Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Daerah;

12) Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan rencana program dan kegiatan serta kegiatan insidental Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah;

3. Bidang Kelembagaan

Bidang kelembagaan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian lembaga koperasi dan UKM, pelaksanaan kegiatan penyuluhan, penetapan badan hukum koperasi, pembinaan organisasi dan pengelolaan data informasi.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Bidang Kelembagaan mempunyai tugas:

- a. Pengelolaan dan perumusan bahan bimbingan teknis, pembinaan organisasi dan keberadaan usaha kecil menengah serta badan hukum koperasi;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis, penyuluhan dan penetapan badan hukum koperasi;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan organisasi koperasi dan usaha kecil menengah;

d. Pelaksanaan pengolahan data dan pelayanan informasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dimaksud, kepala Bidang dibantu oleh:

a. Kepala Seksi Organisasi dan Manajemen Koperasi:

Kepala Seksi Organisasi dan Manajemen Koperasi mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, identifikasi, penyuluhan, pengawasan, penetapan badan hukum, klasifikasi dan pembinaan organisasi koperasi. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Seksi Organisasi dan Manajemen Koperasi mempunyai fungsi:

- 1) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan penyuluhan, pengawasan, pengendalian, penetapan proses badan hukum koperasi dan pembinaan organisasi;
- 2) Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan kelembagaan, keanggotaan dan cara pendirian koperasi;
- 3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan pemeriksaan administrasi;
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis pertimbangan dan penetapan badan hukum koperasi;
- 5) Pelaksanaan monitoring kepengurusan, pergantian antar waktu dan hak, kewajiban serta penggajian;
- 6) Pelaksanaan monitoring dan pembinaan mekanisme kerja dan kesesuaian hak, kewajiban serta penggajian;
- 7) Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja koperasi dan penyelenggaraan rapat anggota tahunan (RAT);
- 8) Penyusunan pedoman dan pengklasifikasian koperasi

b. Kepala Seksi Organisasi dan Manajemen UKM

Kepala Seksi Organisasi dan Manajemen UKM mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pengolahan data dan pelayanan informasi usaha kecil menengah. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Seksi Organisasi dan Manajemen UKM mempunyai fungsi:

- 1) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan pembinaan, pengolahan data dan pelayanan informasi UKM;
- 2) Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan dan pelayanan informasi UKM;
- 3) Perencanaan pengawasan dan pengendalian UKM;
- 4) Pelaksanaan pengolahan data keanggotaan UKM;
- 5) Pelaksanaan penyampaian dan pelayanan data dan informasi.

4. Bidang Pemberdayaan Koperasi

Bidang Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, pembinaan permodalan, pelaksanaan tugas peningkatan sumber daya manusia Koperasi serta pengembangan jaringan usaha koperasi. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan bimbingan teknis pembinaan, pengawasan, pengendalian, pendampingan peningkatan sumber daya manusia koperasi;

- b. Penyiapan rencana dan program bahan perumusan dan penjabaran teknis serta pemberian bimbingan di bidang pengembangan usaha koperasi dan permodalan;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pembinaan pemanfaatan modal usaha koperasi;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi pendampingan usaha serta mengembangkan kerjasama jaringan usaha antar koperasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dimaksud, Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dibantu oleh:

a. Kepala Seksi Penguatan Permodalan

Kepala Seksi Penguatan Permodalan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis di bidang perolehan, pengumpulan, pemanfaatan dan pengendalian modal usaha. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Seksi Penguatan Permodalan mempunyai fungsi:

- 1) Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data bahan pembinaan, pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan dan pengendalian permodalan koperasi;
- 2) Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan perolehan modal usaha koperasi;
- 3) Pelaksanaan bimbingan teknis pengawasan dan pengendalian simpan pinjam koperasi;
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan modal usaha koperasi;

- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

b. Kepala Seksi Fasilitas Usaha

Kepala Seksi Fasilitas Usaha mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan, pengendalian dan peningkatan sumber daya manusia serta pengembangan jaringan usaha koperasi. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Seksi fasilitas usaha melaksanakan fungsi :

- 1) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan pembinaan pelaksanaan bimbingan teknis fasilitas pendampingan jaringan usaha serta peningkatan sumber daya manusia;
- 2) Pelaksanaan bimbingan teknis jaringan usaha antar usaha Koperasi;
- 3) Pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitas dan pendampingan usaha;
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan SDM Koperasi.

5. Bidang Pemberdayaan UKM

Bidang Pemberdayaan UKM dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian pembinaan permodalan, pengembangan manajemen UKM serta pelaksanaan tugas peningkatan SDM UKM dan pengembangan jaringan usaha. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Bidang Pemberdayaan UKM melaksanakan fungsi:

- a. Pengolahan dan perumusan bahan bimbingan teknis pembinaan, pengawasan, pengendalian, pendampingan dan peningkatan sumber daya manusia UKM;

- b. Penyiapan rencana program, bahan perumusan dan pembinaan teknis serta pemberian bimbingan dibidang pengembangan usaha UKM;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan perolehan dan pemanfaatan modal UKM;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi pendampingan usaha serta mengembangkan kerja sama jaringan usaha antar UKM.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dimaksud, Kepala Bidang Pemberdayaan UKM dibantu oleh:

a. Kepala Seksi Pengembangan Modal

Kepala Seksi Pengembangan Modal mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan, pendampingan dan pengembangan modal usaha. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Seksi Pengembangan Modal melaksanakan fungsi:

- 1) Pengumpulan, pengolahan dan perencanaan, perumusan bahan binaan, dan bimbingan teknis pengembangan permodalan UKM;
- 2) Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan permodalan UKM;
- 3) Pembinaan, penyuluhan, dan bimbingan teknis pendampingan perolehan permodalan UKM;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan.

b. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Usaha

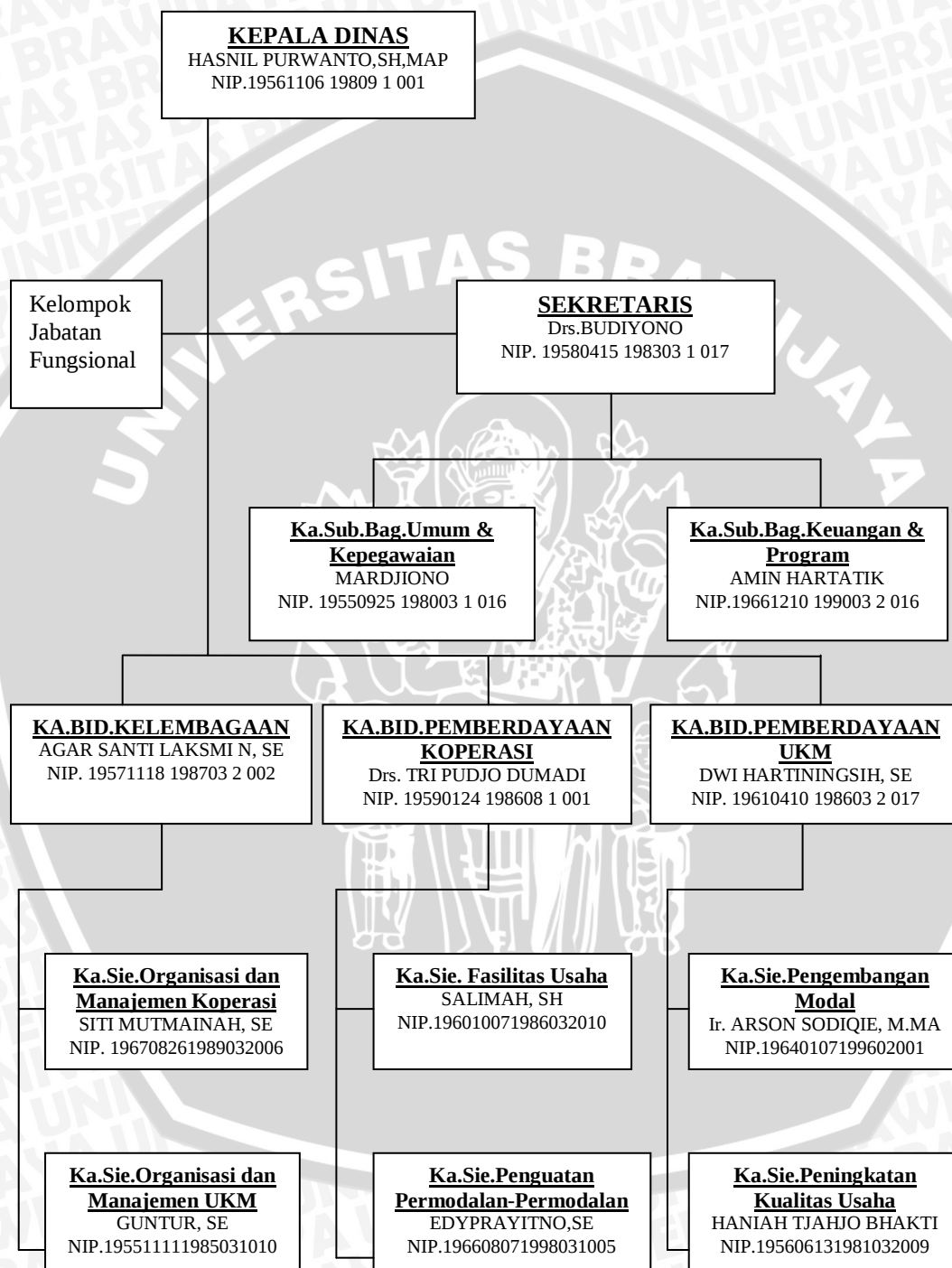
Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Usaha mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan pengawasan dan pengendalian peningkatan

pengembangan UKM. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Usaha melaksanakan fungsi:

- 1) Pengumpulan, pengolahan dan perencanaan perumusan bahan bimbingan teknis, pengawasan, pengendalian, peningkatan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah;
- 2) Pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan magang serta kemitraan dan promosi;
- 3) Pelaksanaan fasilitasi pendampingan usaha dan mengembangkan kerjasama jaringan usaha antar UKM;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan.

Dari tata kinerja tersebut jelas terbukti bahwa adanya bidang Pemberdayaan UKM yang mempunyai tugas tentunya ikut memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di Kota Blitar. Mengingat potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di Kota Blitar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat dijadikan pilar perekonomian Kota Blitar yang mana telah kita ketahui pula jika dalam data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pendapatan terbesar berasal dari pemasukan dari bidang perdagangan dan jasa, hal ini mengingat jumlah lahan yang tidak terlalu luas dengan sumber daya alam yang terbatas pula yang dimiliki oleh wilayah Kota Blitar tentu saja bidang perdagangan dan jasa sebagai penyumbang salah satu Pendapatan Asli Daerah Terbesar di Kota Blitar. Untuk lebih mengetahui lebih jelasnya bagaimana upaya Pemerintah Kota Blitar dalam memberdayakan UMKM dapat kita lihat dari gambar berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2011



Gambar 2.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi Dan UKM Daerah Kota Blitar Tahun 2011

2. Visi, Misi, Tujuan Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar

a. Visi

Visi merupakan cara pandang ke depan yang mencerminkan apa yang ingin dicapai arah dan program yang akan datang yang ditetapkan pada batas waktu yang ditentukan. Untuk itu ditentukan visi Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar sebagai berikut “mewujudkan koperasi dan UMKM yang berkualitas dan berbasis kompetensi sebagai pilar pembangunan ekonomi kerakayatan”.

Visi tersebut mengandung makna bahwa Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah Daerah Kota Blitar berkewajiban baik secara normatif maupun moral, untuk memberikan daya dukung yang optimal bagi kinerja Pemerintah Kota Blitar sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM baik dari sisi kelembagaan maupun permodalan sehingga terwujudnya Koperasi dan UMKM yang mandiri dan berkualitas serta didukung tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidangnya.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kota Blitar mendukung program dan kebijakan perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pembangunan ekonomi berbasis kerakayatan dengan menekankan pada aspek *Pro Poor Budgeting* sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Visi ini juga dapat dipandang dari perspektif eksternal yang berarti Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kota Blitar memiliki *concern* terhadap kualitas SDM yang berbasis masyarakat sehingga peran dan upaya-upaya

berskala nasional yang selama ini telah dilakukan akan terus ditumbuh kembangkan.

b. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kota Blitar mengemban misi sebagai berikut

- 1) Meningkatkan SDM koperasi melalui penerapan standar kompetensi kerja;
- 2) Meningkatkan daya saing UMKM melalui penerapan manajemen aplikatif;
- 3) Mewujudkan kelembagaan koperasi yang berkualitas dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip koperasi;
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kinerja sumber daya aparatur.

Misi yang diemban oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kota Blitar sebagai berikut:

Misi pertama, meningkatkan SDM koperasi melalui penerapan standar kompetensi kerja.

Misi tersebut mengandung makna bahwa dengan meningkatkannya kualitas SDM koperasi melalui pelatihan dan pembinaan kepada pengurus dan pengelola koperasi berdasarkan SKKNI mampu meningkatkan kinerja koperasi yang lebih professional;

Misi kedua, meningkatkan daya saing UMKM melalui penerapan manajemen aplikatif.

Misi tersebut mengandung makna dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen aplikatif dalam pengelolaan UMKM akan terwujud peningkatan produktifitas dan tercipta keunggulan kompetitif sehingga UMKM mampu bersaing dalam menghadapi persaingan global;

Misi ketiga, yaitu mewujudkan kelembagaan koperasi yang berkualitas dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip koperasi.

Misi tersebut mengandung makna bahwa dengan penguatan aspek kelembagaan dan penerapan prinsip-prinsip koperasi akan terbangun citra koperasi Indonesia sesuai jati diri koperasi yang diamanati dalam undang-undang;

Misi keempat, meningkatkan kualitas pelayanan perencanaan pembangunan. Mengandung makna bahwa peningkatan pelayanan perencanaan pembangunan merupakan upaya terwujudnya pelayanan prima dalam proses perencanaan pembangunan.

C. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar

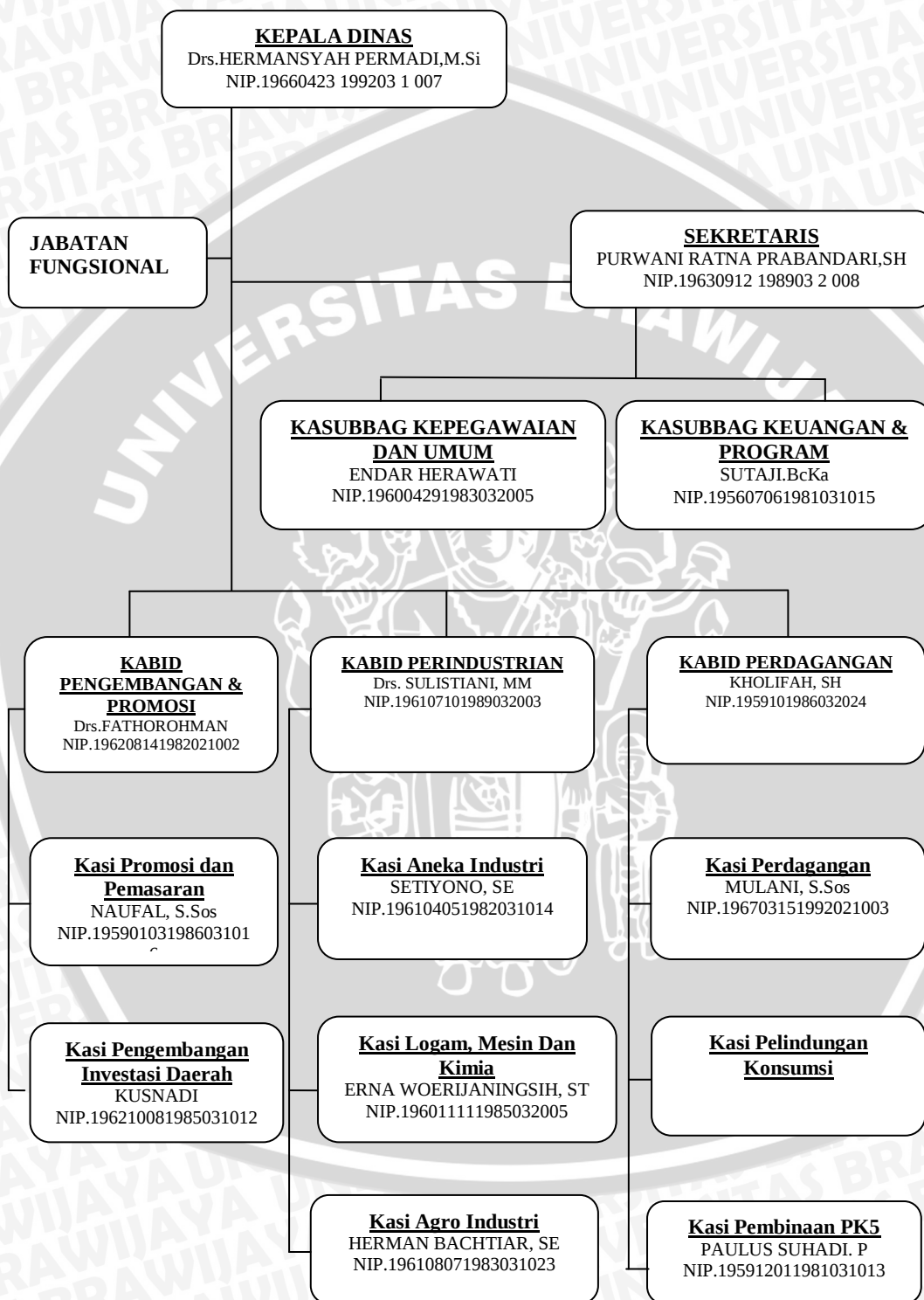
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Blitar, sebagai Dinas Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Blitar yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah dengan tugas pokoknya, menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- b. Pelaksanaan pemberian rekomendasi perijinan.
- c. Pelaksanaan penyediaan, penyaluran barang dan jasa dan promosi.
- d. Pelaksanaan kemotrologian dan perlindungan konsumen
- e. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
- f. Penyusunan evaluasi dan pelaporan

Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Blitar, terdiri dari Kepala Dinas, 1 Sekertaris dan 3 Kepala Bidang yaitu Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan serta Bidang Pengembangan Investasi dan Promosi. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar mempunyai tugas penting dalam hal peningkatan kualitas barang-barang ataupun produk-produk asli dari Kota Blitar, khususnya produk-produk UMKM dari Kota Blitar yang mana mutu dan kualitas Produk UMKM dari Kota Blitar diharapkan mampu bersaing dengan produk-produk UMKM daerah lain. Untuk itu kebijakan ataupun program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM sebagai salah satu sektor pendongkrak perekonomian masyarakat Kota Blitar yang mana diharapkan kegiatan tersebut dapat menyerap tenaga kerja. Untuk itu, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan diharapkan kegiatan perindustrian dan perdagangan dapat diperhatikan. Hal ini dapat kita lihat dalam gambar di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2011



Gambar 3.
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah
Kota Blitar Tahun 2011

2. Visi, Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar

a. Visi

Berdasarkan kondisi daerah saat ini, prediksi atau perkiraan yang dihadapi serta memperhatikan isu strategis yang dimiliki oleh Kota Blitar maka visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Blitar tahun 2011-2015 adalah “Berkembangnya IKM serta meningkatnya iklim perdagangan dan pemasaran yang kondusif di tahun 2015”. Dengan penetapan visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Blitar sebagaimana tersebut diatas, merupakan akumulasi dari potensi, kendala serta kemauan semua pihak untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui berkembangnya sektor ekonomi riil, penambahan lapangan pekerjaan baru pada akhirnya dapat pula mendukung terwujudnya visi Kota Blitar yaitu APBD Pro Rakyat.

b. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, sesuai dengan misi yang ditetapkan. Dengan demikian dapat terwujudnya apabila instansi mempunyai misi yang jelas, sehingga pada gilirannya dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Dengan memperhatikan keterpengaruhan dan korelasi eksternal dan internal serta upaya menyelaraskan tuntutan peran dan kemampuan sumber daya aparatur dan mekanisme organisme yang dimiliki maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatnya kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa
2. Pemantapan pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan kluster industri serta kualitas SDM
3. Mengoptimalkan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk.

D. Gambaran Umum UMKM di Kota Blitar

Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Blitar berkembang dengan begitu apik. Hal ini karena didukung oleh letak Kota Blitar sendiri yang begitu strategis dimana terletak di tengah-tengah Kabupaten daerah lain, yakni Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Malang. Hal ini menjadi poin penting ketika hal tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Kota Blitar sendiri juga menjadi pusat tujuan wisata religi maupun buatan seperti Makam Bung Karno, Perpustakaan Bung Karno, Taman Air Sumber Udel, dan masih banyak lagi tempat yang menarik untuk dikunjungi, hal ini tentunya akan banyak mendatangkan para wisatawan baik lokal maupun mancanegara mengingat Kota Blitar adalah Kota yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia.

Keberagaman jenis usaha UMKM yang ada di Kota Blitar yang mana kualitas dan mutu produk yang dihasilkan juga tidak kalah dengan produk-produk UMKM daerah lain, yakni seperti Kain batik khas Blitar, sambel pecel, kendang sentul, manik-manik dari batok kelapa, opak gambir, ikan koi, wajik kletik, madu mongso, buah blimbing dan masih banyak lainnya produk-produk UMKM yang unggulan yang dihasilkan para pelaku UMKM yang ada di Kota Blitar itu sendiri. Dengan adanya sumber bahan baku yang mudah didapat dalam pemenuhan

kebutuhan produksi UMKM yang ada di Kota Blitar membuat UMKM di Kota Blitar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dengan banyaknya keberagaman jenis produk yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM di Kota Blitar tersebut maka perlu adanya tindak lanjut dari Pemerintah Kota Blitar sendiri, yang mana dengan mengakomodir para pelaku UMKM tersebut, agar mereka mampu untuk bertahan dan mampu berkembang di era perdagangan bebas seperti sekarang ini. Yang mana mulai sekarang para pelaku UMKM tersebut haruslah dibina dengan cukup matang dan terlatih sehingga pemerintah tidak boleh memandang sebelah mata para pelaku UMKM tersebut. Hal ini mengingat bahwa ketahanan para pelaku UMKM itu sendiri ketika menghadapi krisis ekonomi yang melanda Indonesia dikira mereka mampu bertahan dengan cukup baik.

Kota Blitar sendiri merupakan tempat yang banyak dikunjungi para wisatawan tentunya UMKM di Kota Blitar tersebut dapat diberdayakan. Hal ini mengingat bahwa masyarakat Kota Blitar sendiri, masih banyak yang hidup di bawah garis ketidak sejahteraan. Masih banyaknya masyarakat miskin dan kurang banyaknya tersedia lapangan kerja di Kota Blitar membuat tingginya angka pengangguran di Kota Blitar sendiri, mengingat jumlah usia produktif yang ada di Kota Blitar sendiri cukup tinggi. Untuk itu, penciptaan masyarakat mandiri dalam hal ini diberdayakan melalui kegiatan pemberdayaan UMKM diharapkan mampu mendorong tingkat kreatifitas serta kemandirian dalam jiwa masyarakat Kota Blitar sendiri, sehingga selain mampu untuk meningkatkan taraf hidupnya dan juga mereka dapat membantu pemerintah untuk membangun daerah Kota Blitar.

E. Penyajian Data Dan Fokus Penelitian

1. Upaya Pemerintah Kota Blitar dalam Pemberdayaan UMKM yang ada di Kota Blitar yang tertuang pada Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar serta Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar.

a. Program Kerja Pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah Kota Blitar yakni :

1) Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Di bawah Strategi dan Kebijakan yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar tahun 2011 mengenai pemberdayaan masyarakat Kota Blitar dalam bidang UMKM:

Tabel 8.
Strategi Dan Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar 2011

Sasaran	Cara Mencapai Tujuan Dan Sasaran	
	Kebijakan	Program
Misi Pertama: 1. Meningkatkan Kapasitas SDM koperasi sesuai dengan standar	Peningkatan kualitas SDM koperasi	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Lanjutan..

Lanjutan...

Sasaran	Cara Mencapai Tujuan Dan Sasaran	
	Kebijakan	Program
kompetensi yang berlaku.		
2. Meningkatkan kualitas SDM koperasi berdasarkan prinsip-prinsip manajemen aplikatif	Peningkatan kualitas SDM koperasi	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
3. Mengembangkan sistem pendukung untuk menunjang tercapainya iklim usaha yang sehat	Fasilitasi bantuan permodalan untuk koperasi	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
4. Menciptakan iklim usaha yang kondusif berbasis jaringan usaha	Pengembangan pemasaran terpadu bagi pelaku usaha	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
Misi Kedua: 1. Mengembangkan sistem pendukung untuk menunjang terciptanya iklim usaha yang sehat	1. Fasilitasi bantuan permodalan untuk UMKM	Program pengembangan sistem pendukung bagi UMKM
	2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk peningkatan pendapatan masyarakat	Program pengembangan sistem pendukung bagi UMKM
2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif berbasis jaringan usaha	Peningkatan keberadaan dan ketersediaan sarana prasarana penunjang perekonomian daerah	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
3. Fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan secara manajerial	Peningkatan kualitas SDM UMKM	Program pengembangan sistem pendukung UMKM

Lanjutan ..

Lanjutan...

Sasaran	Cara Mencapai Tujuan Dan Sasaran	
	Kebijakan	Program
4. Meningkatkan kualitas SDM pelaku UMKM berdasarkan prinsip-prinsip manajemen aplikatif	Pengembangan wirausaha mandiri sektor informal dan tenaga kerja terdidik	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
Misi Ketiga: 1. Fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi badan hukum koperasi daerah	Pengembangan organisasi dan manajemen	Program pengembangan sistem pendukung bagi UMKM
2. Mewujudkan pengelolaan koperasi dan UKM sesuai dengan prosedur standar dan norma-norma	Penerapan prinsip, jati diri koperasi dalam pengelolaan koperasi	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
3. Pengawasan standar kualitas pelayanan jasa keuangan bagi anggota koperasi	Pengawasan pengelolaan usaha koperasi	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
4. Penyediaan data dan informasi koperasi dan UMKM sebagai dasar penyusunan perencanaan	Ketersediaan data base yang akurat	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
Misi Keempat: 1. Meningkatkan pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana perkantoran secara memadai	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang koperasi dan UMKM	1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan		2. Program peningkatan sarana prasarana aparatur 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan

Lanjutan..

Lanjutan..

Sasaran	Cara Mencapai Tujuan Dan Sasaran	
	Kebijakan	Program
masyarakat		
3. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang koperasi dan UMKM	Program pelayanan administrasi perkantoran
4. Meningkatkan jumlah SDM aparatur yang memiliki kompetensi		

Sumber :Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar 2011

Pembuatan kebijakan tersebut sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan mengingat masyarakat Kota Blitar sendiri sangat membutuhkan peran serta dari Pemerintah Kota Blitar. Berikut ini hasil petikan wawancara dengan Kepala Bidang Kelembagaan Ibu Agar Santi Laksmi N, SE, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam hal ini kami selaku Dinas Koperasi dan UKM menjadikan RPJMD sebagai pedoman untuk membuat kebijakan-kebijakan apa saja yang harus kami buat, hal itu juga dikaji dengan melihat kenyataannya di lapangan, apakah hal-hal yang dibutuhkan atau diperlukan masyarakat sekarang ini. Tentunya hal yang kami harapkan pembuatan kebijakan ataupun program-program tentang pemberdayaan masyarakat khususnya dalam hal ini pemberdayaan Koperasi dan UMKM menjadi prioritas yang penting sekali guna membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya” (wawancara tanggal 15 Febuari 2012).

Dalam hal ini terpampang jelas jika hubungan antara program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan Koperasi dan UMKM secara terinci berdasarkan kelompok sasaran adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis : Meningkatkan kapasitas SDM Koperasi sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku , antara lain :

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dengan kegiatan antara lain :

- a) Penyelenggaraan Bimtek SKKNI (Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia) bagi pengurus/pengelola koperasi
- b) Fasilitas uji kompetensi bagi pengurus/pengelola koperasi

- 2) Sasaran strategis : Meningkatkan kualitas SDM koperasi berdasarkan prinsip-prinsip manajemen aplikatif, antara lain:

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dengan kegiatan antara lain:

- a) Peningkatan SDM
- b) Bimtek pengelolaan koperasi
- c) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

- 3) Sasaran strategis : Terwujudnya sistem pendukung untuk menunjang iklim usaha yang sehat, antara lain:

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dengan kegiatan antara lain:

- 1) Fasilitas pemberian modal bergulir bagi koperasi
- 2) Monitoring, evaluasi pengguna dana bergulir koperasi
- 3) Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi (IT)

- 4) Sasaran strategi : Terciptanya iklim usaha yang kondusif berbasis jaringan usaha, antara lain:

Program penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif, dengan kegiatan antara lain:

- 1) Perencanaan, koordinasi dan pengembangan UMKM
- 2) Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
- 3) Fasilitas pengembangan jaminan keberlangsungan usaha bagi UMKM
- 4) Pengembangan jaringan infra struktur UMKM

- 5) Sasaran strategis : Meningkatkan fasilitas bantuan teknis dan pendampingan secara manajerial.

Dijabarkan dalam program peningkatan kualitas SDM UMKM dengan kegiatan fasilitas pengembangan teknologi UMKM.

- 6) Sasaran strategis : Meningkatkan kualitas SDM pelaku UMKM berdasarkan prinsip-prinsip manajemen aplikatif,.

Dijabarkan dalam program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM dengan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan.

- 7) Sasaran strategis: Meningkatkan fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi badan hukum koperasi, antara lain :

Program pengembangan organisasi dan manajemen, dengan kegiatan : fasilitasi pembentukan dan pengembangan LKM

- 8) Sasaran strategis : Terwujudnya pengelolaan koperasi dan UKM sesuai dengan prosedur standar dan norma-norma, antara lain:

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dengan kegiatan antara lain:

- 1) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
- 2) Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

3) Jejaring kerja gerakan koperasi

- 9) Sasaran strategis : Tersediannya data dan informasi Koperasi dan UMKM sebagai data penyusunan perencanaan dengan program penciptaan iklim Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang kondusif, dijabarkan dengan kegiatan perencanaan koordinasi dan pengembangan UMKM.

2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun 2011-2015 dibuat berdasarkan penjabaran secara operasional dari RPJMD Pemerintah Kota Blitar tahun 2011-2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai amanat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar merupakan pedoman bagi seluruh bidang yang ada di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Blitar dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatannya sekaligus sebagai acuan bagi pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan program pengembangan industri di Kota Blitar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar memiliki peran penting dalam memajukan kegiatan perindustrian dan perdagangan di Kota Blitar tentunya dalam hal ini ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat Kota Blitar menjadi masyarakat yang mandiri yang mapan ekonominya. UMKM yang sudah berjalan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Mereka masih perlu pembinaan, bimbingan serta pengawasan, agar supaya UMKM yang ada di Kota Blitar lebih berkompeten dan lebih profesional lagi. Untuk itu, perlu kebijakan yang tepat untuk pemberdayaan UMKM di Kota Blitar. Adapun rencana tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 8.
Rencana Strategis Tahun 2011-2012

VISI : Berkembangnya IKM serta meningkatnya iklim perdagangan dan pemasaran yang kondusif di tahun 2015.

MISI : Meningkatkan kualitas perdagangan barang dan jasa serta menciptakan persaingan yang sehat bagi dunia usaha.

Tujuan	Sasaran		Strategi			Kelompok Sasaran
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	Kegiatan	
1.Meningkatkan pengawasan peredaran barang dan jasa	1.1.Terciptanya perlindungan konsumen	1.1.1Menurunya masalah pengaduan konsumen	1. Pengembangan sistem jaringan informasi, perlindungan konsumen dan pengawasan, pengendalian dan pengamanan peredaran barang yang strategis dalam bidang perdagangan	1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1.1.Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen	1.Masyarakat konsumen
	1.2.Meningkatkan pengawasan/pemantauan barang beredar	1.2.1.Tingkat pengaduan berdasarkan prosentase hasil evaluasi dampak pengawasan			1.2.Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	2.Masyarakat pelaku usaha

Lanjutan..

Lanjutan..

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Strategi		Kelompok Sasaran
	Uraian	Indikator		Program	Kegiatan	
2. Fasilitasi kemudahan perijinan, peningkatan kualitas dan pengembangan usaha	2.1.Teridentifikasinya pertumbuhan PK5	2.1.1.Tingkat pertumbuhan PK5 berdasarkan evaluasi jumlah di lapangan		2.Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	2.1.Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	
	2.2.Teridentifikasinya pertumbuhan para pelaku usaha	2.2.1.Meningkatnya pertumbuhan dan pengembangan usaha formal dan non formal			2.2.Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan 2.3.Pengembangan sistem jaringan informasi perdagangan 2.4.Sosialisasi peningkatan SDM dan penggunaan produk dalam negeri	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun 2011

Tabel 9.
Rencana Strategis Tahun 2011-2015

VISI : Berkembangnya IKM serta meningkatnya iklim perdagangan dan pemasaran yang kondusif di tahun 2015

MISI : Pemantaban pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan kluster industri serta kualitas SDM

Tujuan	Sasaran		Strategi			Kelompok Sasaran
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	Kegiatan	
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri serta pemanfaatan sumber daya	1.1. Terpenuhi sarana IKM untuk memperkuat jaringan kluster industri	1.1.1. Tingkat pemenuhan sarana untuk IKM berdasarkan evaluasi terhadap pelaku IKM	1. Kuatnya sistem manajemen pelaku usaha dalam memperkuat jaringan kluster industri	5. Program pengembangan industri kecil menengah	5.1. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	
	1.2. Meningkatkan kualitas SDM dan produk IKM	1.2.1. Jumlah SDM yang berkualitas serta produk-produk IKM yang dihasilkan.			5.2. Fasilitasi industri kecil dan menengah dalam pemanfaatan sumber daya	

Lanjutan...

Lanjutan...

Tujuan	Sasaran		Strategi			Kelompok Sasaran
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	Kegiatan	
					5.3.Fasilitasi kemudahan perijinan usaha industri kecil dan menengah. 5.4.Fasilitasi kerjasama kemitraan indutri mikro kecil dan menengah dengan swasta.	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar 2011

Tabel 10.
Rencana Strategis Tahun 2011-2015

VISI : Berkembangnya iklim perdagangan yang kondusif, serta pengembangan produk dan pemasaran UKM di Kota Blitar tahun 2015

Misi : Pemantaban pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri serta kualitas SDM

Tujuan	Sasaran		Strategi			Kelompok Sasaran
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	Kegiatan	
2. Terfasilitasinya kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta serta kemudahan perijinan usaha	2.1.Meningkatnya akses dan peluang pasar produk IKM	2.1.1.Tingkat kemudahan mengakses kebutuhan informasi peluang pasar produk IKM	2.Terjalinya hubungan yang harmonis antara penguasa yang handal dengan usaha UKM	6. Program peningkatan kemampuan teknologi industri	6.1.Pembinaan kemampuan teknologi industri	
	2.2.Meningkatnya gelar potensial produk IKM	2.2.1 Jumlah pameran yang terselenggara			6.2.Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun 2011

Tabel 11.
Rencana Strategis Tahun 2011-2015

VISI : Berkembangnya IKM serta meningkatkannya iklim perdagangan dan pemasaran yang kondusif di tahun 2015

MISI : Mengoptimalkan pengembangan pasar dan distribusi/produk

Tujuan	Sasaran		Strategi			Kelompok Sasaran
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	Kegiatan	
1.Meningkatnya dan memperluas jaringan pemasaran.	1.1.Meningkatnya pemasaran hasil produk dan berkembangnya usaha para pelaku usaha.	1.1Tingkat perkembangan usaha para pelaku usaha berdasarkan evaluasi pada pemasaran hasil produk	1.Meningkatkan koordinasi yang baik antara pemerintah, pengusaha yang handal dengan para pelaku UKM	1.Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.	1.1.Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	IKM
2.Mengembangkan investasi non PMDN, PMDN, dan PMA	1.2.Meningkatnya jumlah investasi dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas produk	2.1.Meningkatnya jumlah industri dan tenaga kerja	2.Meningkatkan kualitas dalam investasi	2.Program peningkatan investasi	2.1.Pengembangan investasi	IKM

Sumber :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar 2011

Kenyataan di lapangan selama ini pemberdayaan masyarakat yang ada di Kota Blitar sendiri selama ini sudah cukup baik, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Bapak Fathorohman, beliau mengatakan:

“Kebijakan yang tersusun pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama ini telah kami lakukan semaksimal mungkin dengan tujuan agar bisa membantu masyarakat dalam hal kesejahteraan keluarga mereka. Kebanyakan kami melakukan pembinaan-pembinaan terhadap usaha-usaha yang sudah berjalan, karena kami mengharapkan berbagai jenis usaha tersebut mampu bertahan dan berkembang seperti masa sekarang ini. Karena kami juga melihat besarnya antusiasme masyarakat Kota Blitar dalam berwirausaha, memacu kami untuk melakukan pembinaan pada mereka agar mereka lebih profesionalisme dan merubah asumsi masyarakat seperti sekarang ini yang berusaha hanya untuk makan sehari tapi lebih berkembang untuk usaha yang lebih inovatif dan kreatif lagi. Tentunya program-program yang kami buat akhirnya dapat mempunyai pengaruh positif terhadap kemajuan dan peningkatan perekonomian masyarakat Kota Blitar sendiri” (wawancara, tanggal 16 febuari 2012).

Dari data diatas sudah cukup jelas jika upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dalam hal ini pembuatan program dalam pemberdayaan UMKM yang mana dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar melakukan pembuatan-pembuatan program-program mengenai pemberdayaan UMKM dalam hal ini semisal, program atau kebijakan mengenai terjalinnya hubungan yang harmonis antara penguasa yang handal dengan usaha UMKM, maksudnya dalam hal ini diwujudkan agar supaya UMKM yang ada di Kota Blitar semakin mempunyai jaringan usaha yang lebih berkompeten dan lebih luas lagi jaringan usahanya, karena selama ini UMKM yang ada di Kota Blitar masih bersifat tradisional dalam hal ini masih kurang mempunyai pengalaman dalam bidang bisnis. Kebijakan yang kedua yang ada

kaitanya dengan pemberdayaan UMKM adalah meningkatkan koordinasi yang baik antara pemerintah, pengusaha yang handal dengan para pelaku UKM maksud dari kebijakan tersebut adalah dimana adanya hubungan baik antara 3 *stake holder* yakni pemerintah sebagai pembuat program dan regulasi ataupun yang berkaitan dengan pembuatan perijinan yang berkaitan dengan kelancaran usaha UMKM di Kota Blitar, sedangkan pengusaha handal mempunyai peran untuk membantu memberikan motivasi bagi pelaku UMKM di Kota Blitar agar usahanya lebih berkompeten dan lebih professional dalam pengelolaan usahanya. sedangkan pelaku UMKM sendiri mempunyai peran dalam peningkatan perekonomian masyarakat dan pencipta lapangan kerja bagi masyarakat Kota Blitar sendiri sehingga diupayakan dengan adanya kerjasama antara 3 *stake holder* tersebut dapat menjadikan masyarakat Kota Blitar menjadi lebih mandiri dalam peningkatan kesejahteraan perekonomian mereka.

B. Kegiatan Pemberdayaan

1. Pemberdayaan Manajemen Sumber Daya Manusia UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM merupakan suatu bentuk wujud nyata dari terselenggaranya perekonomian suatu masyarakat yang mana dalam hal ini masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melalui usaha sendiri. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang paling dapat bertahan ketika krisis ekonomi melanda negeri ini. Perkembangan jumlah unit usaha kecil menengah yang terus meningkat, tentunya akan dapat membuka lapangan kerja yang besar.

SDM sebagai salah satu unsur penunjang organisasi, dapat diartikan sebagai manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut personil, tenaga kerja, pekerja/karyawan), atau potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya, atau potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non-material dalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan nonfisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Pada organisasi yang masih bersifat tradisional, fokus terhadap SDM belum sepenuhnya dilaksanakan. Organisasi tersebut masih berkonsentrasi pada fungsi produksi, keuangan, dan pemasaran yang cenderung berorientasi jangka pendek. Mengingat organisasi dengan model yang lebih moderat menekankan pada fungsi SDM dengan mengelola SDM di era globalisasi bukan merupakan hal yang mudah. Oleh karena itu, berbagai macam infrastruktur perlu disiapkan untuk mendukung proses terwujudnya SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi tidak kecil, bahkan sebagai sentral pengelola maupun penyedia SDM bagi departemen lainnya. Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi dan SDM, atau dengan kata lain, secara lugas MSDM dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan SDM dalam upaya mencapai tujuan individual maupun organisasional memberikan kontribusi pada suksesnya organisasi.

Salah satu hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan UKM dengan Ibu Dwi Hartiningsih, SE mengatakan bahwa :

“Kebanyakan Sumber Daya Manusia di Kota Blitar sendiri yang berkecimpung dalam kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah dilihat dari tingkat pendidikan para pengusaha UMKM tersebut kebanyakan adalah lulusan SLTA/SMK sekitar (45%),D-3 (7.5%), dan S-1 (15.6%) dan sisanya di bawah SLTA”(wawancara, tanggal 20 febuari 2012).

Fakta ini sebenarnya menepis pandangan bahwa pendidikan UMKM di Kota Blitar relatif rendah. Namun kita perlu akui juga peningkatan kualitas SDM sangat diperlukan terutama di bidang kompetensi SDM seperti *knowledge*, *skill* dan *ability* serta *attitude* dalam berwirausaha. Semangat kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung pengembangan teknologi menjadi penting dalam fokus penguatan SDM. Di sisi lain, penggunaan teknologi makin penting mengingat 60 persen proses produksi UMKM masih dilakukan secara sederhana. Ini mengindikasikan bahwa penguasaan IPTEKS dan keahlian pemasaran oleh SDM UMKM masih sangat terbatas. Berdasarkan analisa kondisi di atas maka Pengembangan Kompetensi Sumber daya Manusia UMKM harus diperhatikan, sehingga mampu menciptakan tenaga kerja wirausaha yang dapat bersaing secara terbuka di pasar global. Disamping itu peningkatan SDM koperasi juga sangat diperlukan mengingat perkembangan UMKM tidak lepas dari peran serta lembaga koperasi yang selalu memberikan pinjaman modal, teknis dan memfasilitasi jaringan bisnis dalam pengadaan bahan baku dan pemasaran hasil produk UMKM.

Dalam hal ini tentunya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar melakukan langkah-langkah kongkrit terhadap perbaikan mutu Manajemen

Sumber Daya Manusia pelaku UMKM yang di Kota Blitar dalam hal ini mencakup beberapa program pemberdayaan Manajemen Sumber Daya Manusia

Pelaku UMKM yakni:

Tabel 13.
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Industri
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar 2011

No	Program	Jumlah Peserta (Orang)	Jadwal	Hasil dan manfaat
1	Pelatihan Konveksi	6	14-19 Febuari 2011	1.Meningkatkan keterampilan kepada masyarakat
2	Pelatihan Menjahit I	15	14-25 Febuari 2011	
3	Pelatihan Bordir	15	14-25 Febuari 2011	
4	Pelatihan jajanan tradisonal	15	23-25 Febuari 2011	
5	Pelatihan pigura	10	10-13 Maret 2011	2.Memberdayakan masyarakat untuk usaha mandiri
6	Workshop peningkatan kualitas	90	8 Maret 2011	
7	Pelatihan elektro lanjutan	15	23-26 Maret 2011	3.Meningkatkan pendapatan keluarga dan masyarakat
8	Bantuan dinamo	93	29 April 2011	
9	Pelatihan pertukangan kayu	10	19-21 Mei 2011	
10	Pelatihan aneka <i>snack</i>	10	19-23 Mei 2011	
11	Pelatihan tempurung kelapa	15	19-21 Mei 2011	
12	Whorkshop industri peningkatan kualitas produk	70	30 Mei 2011	
13	Bimtek pengembangan usaha industri	100	8 Juni 2011	
14	Pelatihan menjahit II	30	25 Mei-5 Juni 2011	
15	Pelatihan motivasi kerja	100	5 Juli 2011	
16	Pelatihahan bubut kayu	10	7-9 Juli 2011	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar 2011

Dengan melihat tabel tersebut jelas terbukti bahwa Pemerintah Kota Blitar benar-benar tanggap terhadap permasalahan di sekitarnya. Banyaknya pelatihan-

pelatihan serta workshop mengenai kewirausahaan ataupun bagaimana berwirasusaha dengan baik dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat pelaku UMKM itu sendiri sehingga diharapkan jenis usaha yang dikelola pun dapat berkembang dengan baik dan dapat digunakan sebagai penompang perekonomian masyarakat itu sendiri. Penguasaan teknologi-teknologi terapan baru dapat digunakan secara bermanfaat dengan baik oleh para pelaku UMKM sehingga dengan penguasaan teknologi-teknologi baru tersebut pencapaian target produksi barang-barang tersebut lebih maksimal sehingga keuntungan yang didapat pun bisa tercapai.

Jadi pada intinya kunci untuk meningkatkan kinerja organisasi adalah dengan memastikan aktivitas SDM mendukung usaha organisasi yang terfokus pada (a) produktivitas, (b) kualitas dan (c) pelayanan. Pertama, Produktivitas, diukur dari jumlah output per tenaga kerja, peningkatan tanpa henti pada produktivitas telah menjadi kompetisi global. Produktivitas tenaga kerja di sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh usaha, program dan sistem manajemen dalam hal ini sekolah. Kedua, Kualitas. Kualitas suatu barang/jasa akan sangat mempengaruhi kesuksesan jangka panjang suatu organisasi. Bila suatu organisasi memiliki reputasi sebagai penyedia barang/jasa yang kualitasnya buruk, perkembangan dan kinerja organisasi tersebut akan berkurang. Ketiga, Pelayanan. SDM sering kali terlibat pada proses produksi barang/jasa. Manajemen SDM harus disertakan pada saat merancang proses tersebut. Pemecahan masalah harus melibatkan semua karyawan, tidak hanya manajer, karena sering kali

membutuhkan perubahan pada budaya perusahaan, gaya kepemimpinan dan kebijakan SDM.

2. Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pelaku UMKM

Kesejahteraan sosial dikembangkan dalam rangka menumbuhkan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab, dan peran aktif masyarakat dalam memperbaiki kualitas hidup dan menangani permasalahan sosial di lingkungannya seperti permasalahan terkait fakir miskin, penyandang cacat, usia lanjut ,anak terlantar dan lainnya. Pengembangan fungsi ini semakin diperlukan ketika populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) meningkat diakibatkan krisis ekonomi yang berkepanjangan dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Adapun permasalahan dan potensi dibidang kesejahteraan sosial pada akhir tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk miskin Kota Blitar akhir tahun 2008 berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS Kota Blitar sebanyak 13.182 orang atau sebesar 9,89% dari jumlah total penduduk Kota Blitar.
- b. Apabila dilihat berdasarkan indikator kesejahteraan yang dikeluarkan BKKBN maka di Kota Blitar pada akhir tahun 2008 terdapat Keluarga prasejahtera sebanyak 2.393 KK (6,73 %). Jumlah Keluarga Sejahtera I (KS-I) sebanyak 6.166 KK (17,35 %), sedangkan dengan kategori Keluarga Sejahtera II (KS-II) dengan jumlah yang terbanyak dari kategori yang lain sebanyak 14.488 KK (40,76 %). Untuk Keluarga yang lebih mampu atau pada Kelompok Keluarga Sejahtera III (KS-III) dan KS-III plus sebanyak 10.209 dan 2.287 atau sebesar 28,72 % dan 6,43%.

- c. Kondisi Penduduk Rawan Sosial di Kota Blitar Pada akhir tahun 2008 terdapat keluarga fakir miskin berjumlah 4.288 keluarga, anak terlantar sejumlah 69 orang, gelandangan sebanyak 7 orang, jumlah penyandang cacat sebanyak 313 orang dan jumlah pengemis sebanyak 20 orang.
- d. Panti Sosial di tahun 2008 di Kota Blitar terdapat dua jenis panti asuhan, yaitu Panti Sosial Asuhan Yatim Piatu sebanyak 13 unit, dan Panti Sosial Bina Remaja sebanyak 1 unit.
- e. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kota Blitar diwujudkan melalui kegiatan Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) dan Organisasi Sosial. Pada tahun 2008 terdapat 21 unit Karang Taruna, sedangkan jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) sebanyak 50 orang.

Dari melihat kenyataan diatas maka banyaknya masyarakat yang belum sejahtera perlu mendapat perhatian dari pihak Pemerintah Kota Blitar. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Blitar ditunjukkan oleh pembangunan ekonomi dan pendidikan. Dari sisi ekonomi, kondisi masyarakat cukup memadai, mengingat Kota Blitar merupakan wilayah kota yang kecil dengan jumlah penduduk juga tidak terlalu besar. Kebanyakan penduduk Kota Blitar bekerja pada bidang perdagangan dan jasa. Untuk itu, Pemberdayaan UMKM sebagai pendongkrak naiknya standar kebutuhan hidup layak perlu dilakukan. Karena hal ini dapat kita lihat sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak penduduk Kota Blitar seperti tabel di bawah ini.

Tabel 14.
Kebutuhan Hidup Layak Pekerja Per Orang Per Bulan
Kota Blitar tahun 2007-2010

Bulan	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Januari	576 016,10	625 432,97	697 067,75	841 275,67
2. Febuari	584 930,90	626 277,19	698 881,98	842 004,50
3. Maret	578 029,32	626 277,19	697 698,36	840 757,99
4. April	578 807,60	634 946,77	701 353,95	835 305,39
5. Mei	575 695,73	644 126,09	702 516,59	839 792,16
6. Juni	588 332,26	648 404,06	703 893,50	841 418,13
7. Juli	596 141,13	661 110,28	705 312,83	794 784,69
8. Agustus	616 683,52	662 908,03	738 287,73	808 525,50
9. September	624 383,31	664 967,23	743 810,35	794 968,74
10. Oktober	630 469,73	668 067,70	743 206,26	795 397,28
11. November	631 099,68	668 067,70	748 390,92	807 101,90
12. Desember	633 275,59	668 067,70	750 965,65	817 399,70
Rata-rata	601 155,41	650 025,70	719 357,16	821 560,97

Sumber : Sosnakeker Daerah Kota Blitar 2011

Jadi standar kebutuhan hidup layak pertahun yang sebesar Rp. 9.858.731,6 untuk tahun 2010, sedangkan pendapatan perkapita pada tahun yang sama mencapai Rp. 14.117.191,- (berdasarkan harga berlaku), menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Blitar telah mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka secara layak bahkan sangat dimungkinkan untuk mengkonsumsi barang-barang sekunder dan tersier lainnya. Tapi hal tersebut tidaklah cukup untuk meningkatkan perekonomian, kita perlu melihat daerah lain pula yang mana tentunya pembangunan pesat akan berhasil jika perekonomian masyarakatnya pun kuat dan juga diharapkan masyarakat Kota Blitar dapat bersaing dalam hal perekonomian dengan daerah lain yang mana tentunya kita melihat dengan kota-kota lain di Jawa Timur yang lebih maju lagi. Berdasarkan kondisi sosio-ekonomi

dapat disimpulkan bahwa pola konsumsi masyarakat Kota Blitar termasuk dalam masyarakat yang berkembang dan dimungkinkan mengalami pergeseran menuju masyarakat yang lebih maju. Tingkat pendidikan juga cukup baik dengan angka partisipasi murni untuk pendidikan tingkat menengah mencapai 14,65%. Dengan melihat keadaan sosial ekonomi masyarakat Kota Blitar tersebut maka pemerintah Kota Blitar melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat Kota Blitar sendiri, yakni dengan melakukan program pemberdayaan UMKM yang mana hal ini dilakukan untuk menciptakan suatu keadaan masyarakat yang mana masyarakat tersebut tidak selalu bergantung pada pemerintah dalam hal mencukupi kebutuhan mereka sendiri ataupun membuat mereka bisa mandiri dan sejahtera dalam bidang ekonomi

Kegiatan ekonomi masyarakat masih mengandalkan sektor usaha kecil dan menengah terutama industri rumah tangga yang didukung oleh perkembangan lembaga keuangan mikro dan koperasi. Dalam hal ini menurut sumber wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan UKM Ibu Dwi Hartiningsih mengungkapkan

“Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dalam hal ini pelaku UMKM sudah kami upayakan semaksimal mungkin dalam hal ini kami mambantu dalam pemberian modal usaha kepada para pelaku UMKM baik yang ingin memulai usaha baru ataupun yang berkelompok. Dalam hal ini kami memberikan modal tersebut untuk memacu masyarakat agar mau bekerja keras, sehingga diharapkan kemandirian dan rasa tanggung jawab masyarakat untuk mengembalikan modal usaha dengan melakukan kegiatan UMKM dapat terwujud”. (wawancara, tanggal 20 febuari 2012)

Diperkuat lagi dengan jumlah koperasi yang mencapai 307 unit pada tahun 2010 serta keberadaan koperasi disetiap kelurahan yang ada di Kota Blitar diharapkan mampu berperan besar untuk mengangkat dan memberdayakan

keberadaan sektor usaha kecil dan menengah melalui peningkatan akses permodalan, pemasaran ataupun manajemen usaha yang berpengaruh pada semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas industri kecil dan rumah tangga sehingga memperlancar mekanisme perdagangan dan jasa Kota Blitar. Hal ini senada dengan hasil petikan wawancara dengan Kasi Pembinaan PK 5 Bapak Paulus Suhadi Prajitno yang mengatakan:

“Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dalam hal ini sudah berupaya untuk melakukan banyak pembinaan terhadap berbagai macam jenis usaha yang ada di Kota Blitar, hal ini kami lakukan dengan bekerjasama baik dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia maupun para pengusaha-pengusaha yang handal dalam bidang pengembangan UMKM tersebut. Hal yang kami inginkan dari adanya kegiatan tersebut adalah bahwa diharapkan para pelaku UMKM tersebut dapat meningkatkan perekonomian keluarganya dan tidak memandang UMKM tersebut sebagai usaha skala lemah, tetapi lebih bisa untuk ditingkatkan lagi pada usaha yang lebih berkompeten dan lebih professional sehingga kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya dapat tercapai”(wawancara, tanggal 16 febuari 2012).

Sebagai Kota yang memiliki keterbatasan jumlah Sumber Daya Alam, Kota Blitar cukup berhasil dalam mengembangkan produk pertanian untuk bersaing dikancah nasional. Dibuktikan dengan keberhasilan sebagai kota penghasil blimbing dan ikan koi terbesar di Jawa Timur. Hal tersebut akan meningkatkan pamor Kota Blitar dalam kancah perdagangan dalam bidang pertanian.

3. Pemberdayaan Sarana Prasarana UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah dalam hal ini merupakan suatu bentuk jenis usaha yang mana kriteria dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah sendiri sudah di atur sesuai UU No 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah. Di Kota Blitar sendiri, kegiatan pemberdayaan sarana prasana penunjang UMKM

sudah berlangsung dengan cukup apik, yang mana dalam hal ini seperti yang kita ketahui pula pemberian alat-alat perlengkapan dalam menunjang kegiatan pelaksanaan UMKM benar-benar dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar sendiri sebagai upaya untuk menciptakan suatu kemandirian bagi masyarakat terutama masyarakat miskin yang ada di Kota Blitar sendiri untuk meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini telah dikemukakan oleh Kasi Pembinaan PK5 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar yakni Bapak Paulus Suhadi Prayitno,

“Pemberdayaan sarana-prasarana penunjang kegiatan usaha mikro kecil menengah memang telah kami lakukan seperti pemberian alat-alat produksi seperti mixer, kompor, terpal kuncup, gerobak, mesin jahit dan lain-lain, karena dalam hal ini sebagai wujud dari upaya pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dalam membantu perekonomian masyarakat Kota Blitar sendiri. Kami disini sebagai pelaksana tugas dari pihak pemerintah ingin mengupayakan agar tingkat kreatifitas dan kemandirian masyarakat terbentuk sehingga masyarakat tersebut mampu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga mereka masing-masing”.(wawancara, tanggal 24 febuari 2012)

Dari sumber diatas jelas terbukti bahwa Pemerintah Kota Blitar dalam hal ini melakukan pemberdayaan sarana prasarana penunjang kegiatan UMKM dengan benar-benar terfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat Kota Blitar. Pencapaian suatu keadaan masyarakat yang benar-benar mandiri benar-benar digalakan oleh Pemerintah Kota Blitar dalam hal ini kaitanya dengan peningkatan taraf hidup masyarakat Kota Blitar yang mana telah kita ketahui pula selama ini bahwa keadaan ekonomi masyarakat Kota Blitar masih kurang sejahtera. Pemberdayaan sarana prasarana penunjang UMKM menjadi poin penting dalam membantu UMKM untuk semakin berkembang. Berdasarkan data yang saya peroleh di lapangan bahwa pemberdayaan sarana prasarana UMKM sudah diprogramkan dari tahun ke tahunnya oleh Pemerintah Kota Blitar yakni:

Tabel 15.
Pemberdayaan Sarana Prasarana PK5 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2011-2012

Program Dan Kegiatan	Indiaktor Program dan Kegiatan	Tahun			
		2011		2012	
		Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)
1. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah sarana PKL dan asongan di sekitar pabrik rokok bagi PKL di sekitar pabrik	2kali, 3 jenis (tenda,terpal,gerobak)	500.000,000	5 kali,3 jenis	525.000.000
	Fasilitas tenda, terpal dan gerobak bagi PKL dan asongan di sekitar pabrik rokok	88 terpal kuncup, 30 gerobak, 30 terpal ukuran 4×6	500.000.000	140 terpal kuncup,40 gerobak dan 100 terpal ukuran 4×6	525.000.000
2. Program pengembangan industri kecil menengah	Jumlah gelar potensi IKM	1 kali,150 orang	53.954.350	1 kali, 150 orang	69.000.000

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar 2011

Tabel 16.
Pemberdayaan Sarana Prasarana Penunjang UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar Tahun 2011-2012

Program Dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Tahun			
		2011		2012	
		Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)
1. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah	Meningkatnya income usaha kecil menengah	70%	444.912,000	70%	444.912,000
a. Fasilitas pengembangan sarana promosi hasil produksi	UMKM, koperasi pelaksanaan pameran jatim fair, gebyar UMKM	1 kegiatan	373.456,000	1 kegiatan	392.128,000
	Pasar murah	5 kali		5 kali	
b. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah pelatihan kewirausahaan	1kali,120 orang	71.456,000	1 kali,120 orang	71.456,000
2. Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah	Meningkatkan income usaha kecil menengah		255.367,000		287.957,000
a. Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	Pelaksanaan basar produk UMKM Harkopnas dan Smesco	1 kali, 120 orang	71.456,000	1 kali, 120 orang	71.456,000
b. Fasilitas penyaluran dana bergulir bagi UMKM	Pelaksanaan sosialisasi program pengelolaan permodalan bagi UKM	300 UMKM	72.345,000	300 UMKM	72.345,000
	Penyaluran pinjaman dana bergulir bagi UMKM	300 UMKM		300 UMKM	
	Pembinaan penerima pinjaman dana bergulir	100 UMKM		100 UMKM	

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar 2011

Dengan melihat tabel yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar maka dapat kita lihat betapa perhatiannya Pemerintah Kota Blitar dalam memberdayakan sarana-prasarana UMKM sebagai contoh adanya promosi produk-produk UMKM melalui pameran-pameran seperti jatim fair, gebyar UMKM dan lain sebagainya. Hal tersebut membuktikan jika pemberdayaan sarana-prasarana dalam kegiatan pemberdayaan UMKM sangat bermanfaat sekali, yang mana dalam hal ini sarana prasarana tersebut dapat menarik para wisatawan untuk membeli produk-produk hasil UMKM yang ada di Kota Blitar. Tentunya hal ini menjadi nilai lebih bagi masyarakat Kota Blitar sendiri terutama para pelaku usaha UMKM yang mana secara langsung pendapatan mereka pun meningkat dan perekonomian mereka pun juga terangkat.

2. Dampak Pelaksanaan Program Pemberdayaan UMKM di Kota Blitar

a. Pemberi Program Pemberdayaan UMKM

1) Dampak Positif

Pemberdayaan masyarakat yang dikhususkan untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam hal ini dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi yakni kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam memecahkan permasalahan perekonomian masyarakat. Pemerintah Kota Blitar dalam hal ini berupaya untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Blitar sendiri dalam hal ini pemerintah ingin mewujudkan sistem pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan yang baik

kepada masyarakat Kota Blitar sendiri, dalam hal ini guna mencapai kinerja yang baik di mata masyarakat atau pencapaian *good governance* yang mana hal ini diterapkan guna mencapai sistem pelayanan yang lebih baik lagi yang ditunjukan kepada masyarakat Kota Blitar sendiri. Untuk memenuhi harapan peningkatan pelayanan tersebut, maka kegiatan pemberdayaan UMKM dalam hal ini seperti :

- a) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar

Seperti kegiatan yang dilakukan diantaranya fasilitas pengembangan sarana promosi hasil produksi dan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan.

- b) Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar.

Seperti kegiatan yang dilakukan diantaranya fasilitasi tenda, terpal dan gerobak bagi PKL dan asongan di sekitar pabrik rokok

Benar-benar diupayakan Pemerintah Kota Blitar yang mana mereka begitu gencar dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya, maka hal ini menjadi nilai positif tersendiri bagi Pemerintah Kota Blitar dalam mencapai *good governance*. Karena *good governance* sendiri mempunyai arti menurut *United Nation Development Program* (UNDP) adalah “ penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat”. Maksudnya dalam hal ini tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan

kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan, menggunakan hak hukum, memnuhi kewajiban terhadap tugas yang diemban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Jadi dalam hal ini pemerintah diupayakan agar bisa menyatukan antara pelaku UMKM yang ada di Kota Blitar dengan para investor sehingga diharapkan dalam pertemuan tersebut dapat terjalin sebuah kerja sama dalam kegiatan pemberdayaan UMKM sehingga penciptaan masyarakat yang mandiri dalam hal peningkatan kesejahteraan perekonomian dapat tercapai dan hal ini sesuai dengan pertanggung jawaban tugas dari pemerintah sendiri dalam hal memberikan pelayanan publik yang baik kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini senada juga dengan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana didalam UU tersebut dijelaskan jika setiap pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Dengan diberikan kewenangan yang begitu luas oleh pemerintah pusat maka akhirnya Pemerintah Kota Blitar berupaya keras untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dengan pengembangan perekonomian lokal berbasis UMKM. Dampak positif yang diterima oleh Pemerintah Kota Blitar sendiri dengan adanya kegiatan pemberdayaan UMKM ini adalah Kota Blitar berhasil memenangkan penghargaan otonomi award di tahun 2008 dalam hal ini sebagai katagori Pemerintah daerah yang inovatif bidang pemberdayaan ekonomi lokal. Dan hal banyak lagi penghargaan yang diraih Kota Blitar kaitannya dengan program pemberdayaan

UMKM ini diantaranya, yang di raih Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar yakni:

- 1) Sebagai juara 1 penataan stand terbaik pada tahun 2007 dalam pameran MYQ tingkat Jawa Timur.
- 2) Sebagai juara II penataan stand terbaik pada tanggal 28-30 November 2008 dalam Makasar Trade Expo dan PPED
- 3) Sebagai juara III penataan stand terbaik pada tahun 2008 dalam pameran Indonesia City Expo di Solo
- 4) Sebagai juara harapan I penataan stand terbaik dalam rangka Invesda
- 5) Sebagai SKPD terbaik 2008

Dengan melihat banyaknya penghargaan yang diraih Kota Blitar dalam pemberdayaan UMKM, maka tidak perlu kita ragukan lagi bahwa Pemerintah Kota Blitar benar-benar sudah menjalankan sistem pemerintahan yang baik berdasarkan UU No 32 tahun 2004. Pemahaman permasalahan yang terjadi dalam lingkup masyarakat Kota Blitar dan berusaha bersama-sama untuk memecahkannya. Hal tersebut merupakan wujud dari pemerintahan Kota Blitar yang *good governance*. Hal ini tentu saja mempunyai nilai positif tersendiri, diantaranya selain dapat membantu masyarakat menuju masyarakat mandiri dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi, tentu saja bagi pemerintah dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Blitar sendiri sehingga pembangunan di Kota Blitar dapat tercapai secara maksimal. Banyaknya penghargaan yang diraih menunjukkan bahwa kinerja yang baik telah dilakukan

dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar dan kita patut bangga terhadap prestasi yang diraih.

2) Dampak Negatif

Keberadaan Koperasi dan UMKM dalam struktur perekonomian cukup signifikan. Koperasi dan UMKM Kota Blitar diyakini mampu menjadi pendorong roda perekonomian sekaligus menjadi penyerap tenaga kerja yang cukup besar. Pengembangan Koperasi dan UMKM memiliki potensi yang besar dan strategis dalam rangka mengurangi angka kemiskinan, mengingat pertumbuhan perekonomian sektor riil yang dijalankan oleh Koperasi dan UMKM mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat yaitu tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi dan UMKM dapat menjadi penyeimbang pemerataan dan penyerapan tenaga kerja.

Keberadaan Koperasi dan UMKM hendaknya harus mampu mengikuti dinamika perkembangan di masyarakat. Koperasi dan UMKM harus berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang professional dan kompeten. Kompetensi merupakan ukuran kemampuan seorang individu dalam menjalankan fungsi dan tugas tertentu dalam hal ini kaitannya dengan program pemberdayaan UMKM. Permasalahan yang begitu rumit yang terjadi di masyarakat khususnya masyarakat Kota Blitar dalam hal ini kaitanya dengan pencapaian masyarakat yang mandiri guna meningkatkan taraf hidupnya tentu saja merupakan pekerjaan yang tidak mudah bagi Pemerintah Kota Blitar. Pemerintah dalam hal ini harus mampu berusaha mengungkap semua permasalahan kemiskinan yang terjadi di Kota Blitar dan menelaah permasalahan tersebut dan membuat program yang tepat

guna menjawab setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam hal ini kaitannya dengan pemberdayaan bidang UMKM.

Dampak negatif yang dirasakan oleh pemberi program pemberdayaan UMKM diantara :

1. Daya penggerak UMKM yang lemah, berupa: terbatasnya dukungan APBN/APBD dalam hal ini kaitanya dengan jumlah dana yang terbatas terhadap pengembangan UMKM yang ada di Kota Blitar, sehingga pelaksana lapangan dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar harus memutar otak lebih dalam mengenai pengelolaan anggaran yang terbatas namun dapat menyajikan kegiatan yang maksimal kaitanya dengan pemberdayaan masyarakat Kota Blitar.
2. Massa KUMKM yang rapuh terhadap pemberdayaan, yang ditunjukan oleh rapuhnya kerjasama antar UMKM, dan juga kurangnya pro-aktifnya masyarakat terhadap stimulan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Blitar sehingga hal ini membuat Pemerintah Kota Blitar harus melakukan koordinasi yang cukup teliti mengingat jumlah UMKM terus berkembang dari tahun ke tahun.
3. Tumpuan pemberdayaan yang kurang kokoh, yang diindikasikan oleh banyaknya peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki perspektif KUMKM, pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tidak tegas, dan kelembagaan koperasi dan UMKM yang belum solid, tentu saja hal ini membuat Pemerintah Kota Blitar semakin bekerja keras dan berusaha

mencari dasar hukum yang jelas dalam pengembangan potensi UMKM yang ada di Kota Blitar.

Mengingat dampak negatif yang diterima oleh Pemerintah Kota Blitar yakni sebagai pemberi program pemberdayaan UMKM di Kota Blitar maka perlu kita acungi jempol kepada Pemerintah Kota Blitar khususnya Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar yang mana mereka telah dirasa mampu untuk membantu masyarakat dalam pencapaian suatu keadaan masyarakat Kota Blitar yang mandiri dalam hal peningkatan taraf hidupnya. Hal ini terlihat dari jumlah UMKM di Kota Blitar yang semakin berkembang di barangi dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

B. Penerima Program Pemberdayaan UMKM

1) Dampak Positif

Program pemberdayaan UMKM adalah suatu program yang mana dalam hal ini UMKM yang ada di Kota Blitar diberdayakan, karena tak perlu kita pungkiri pula bahwa banyaknya pengangguran, banyaknya juga masyarakat Kota Blitar yang miskin, serta kurang banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang berdiri di Kota Blitar sehingga tidak banyak menyerap tenaga kerja membuat pemerintah perlu mengadakan program pemberdayaan UMKM yang mana program tersebut diupayakan agar mampu menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya, dalam hal ini program pemberdayaan UMKM diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berkeinginan untuk merintis suatu jenis usaha yang mana jenis usaha tersebut dapat digunakan untuk menolong perekonomian

keluarga tersebut. Didalam hal ini jenis usaha pemberdayaan UMKM dapat digolongkan sebagai berikut:

1. **Usaha mikro** : Usaha yang termasuk lingkup kecil. Dalam hal ini yang tergolong usaha mikro di Kota Blitar seperti penjual sayur, tukang potong rambut, penjual ayam keliling, warung nasi, warung rokok, dan lain sebagainya.

Dalam hal ini saya sempat mewawancari salah satu penjual bakso keliling yakni Bapak Agus Supriyanto, beliau mengatakan:

“Saya sangat terbantu sekali dengan adanya pemberian modal oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar yang mana syarat pinjamnya mudah dan bunganya pun rendah. Dalam hal ini jualan bakso saya semakin berkembang dan saya bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya”.
(wawancara, tanggal 29 febuari 2012)

Dengan melihat kenyataan tersebut jelas terbukti bahwa pemberian modal/dana bergulir yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar menjadi alat penunjang bagi kesuksesan para pelaku UMKM yang ada di Kota Blitar terutama usaha para wirausahawan-wirausahawan yang baru merintis kariernya.

2. **Usaha Kecil** : Suatu jenis usaha yang jumlah tenaga kerjanya 5-10 orang. Yang tergolong usaha ini adalah pedagang soto, bubut kayu, bengkel mobil, tukang cuci mobil, pedagang opak gambir dan lain sebagainya.

Usaha kecil kali ini saya mengambil sampel dari pedagang opak gambir, Ibu Dwi Rahayu di Desa Karanglo, Kecamatan Sanawetan yang mana dalam hal ini Ibu Dwi Rahayu mengatakan

“ Wah sangat terbantu sekali mas dengan adanya pameran-pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar karena barang dagangan saya sekarang sudah sampai keluar kota mas pemasarannya, di Kediri, Jombang, Malang, Sidoarjo, dan juga pernah di kirim ke Bali”.
(wawancara, tanggal 29 febuari 2012)

Dengan hal itu terbukti bahwa beliau dan pengusaha-pengusaha kecil lainnya mendapatkan kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan bazaar UMKM yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar. Kegiatan ini sangat membantu para pelaku UMKM yang ada di Kota Blitar sendiri yang mana dengan kegiatan tersebut para pelaku UMKM tersebut dapat memamerkan hasil produk-produk barang hasil produksinya, sehingga hal ini tentunya akan meningkatkan tingkat pendapatan rumah tangga mereka. Dengan terselenggaranya bazar ataupun pameran-pameran mengenai hasil produk-produk UMKM di Kota Blitar tentunya hal ini diupayakan dapat menarik para wisatawan domestik untuk berkunjung ke Kota Blitar dan dapat melihat barang-barang produk hasil UMKM itu sendiri. Tentunya hal ini mempunyai sisi positif tersendiri bagi Pemerintah Kota Blitar maupun para pelaku UMKM untuk meningkatkan nilai perekonomian dan juga mengenalkan produk-produk UMKM yang ada di Kota Blitar ke daerah lain.

3. Usaha Menengah adalah jenis usaha yang pekerjaannya bisa mencapai 10-30 orang. Dan hasil penjualannya pun lebih besar dari usaha kecil. Yang tergolong usaha menengah di Kota Blitar yakni, pengrajin kendang sentul, peternak ikan koi, petani buah blimbing, dan lain sebagainya.

Dalam usaha menengah saya dalam hal ini mengambil sampel dari pengusaha kerajinan bubut kayu yang terletak di Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar yang mana dalam produksi produk ini yang terkenal adalah produk kendang yang dinamakan kendang sentul. Produk ini pernah masuk rekor muri pada tahun 2009 pada festival rampak kendang terbanyak di Indonesia. Festival

tersebut diselenggarakan juga selain untuk mendapatkan penghargaan tapi disisi lain juga untuk mempromosikan produk kendang sentul tersebut ke seluruh penjuru Indonesia bahkan ke dunia Internasional. Hal ini terbukti karena cakupan penjualannya sudah sampai ekspor ke luar negari Cina, Jerman, Jepang dan lain-sebagainya. Dalam kesempatan ini saya berusaha mewawancarai Ketua Paguyuban pengrajin bubut kayu yakni bapak Agus Saiful yang mana beliau mengatakan:

“ Pemberiaan modal berkelompok yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar dalam hal ini sangat membantu kami dalam memperluas kegiatan produksi barang-barang kerajinan, karena dengan modal pas-pasan kami juga tidak bisa apa-apa dan hanya bisa melayani pasaran dalam Kota Blitar sendiri, namun setelah kami bergabung dengan Klinik UMKM, maka usaha kami semakin maju dan malah bisa berkembang pesat sampai bisa mencapai pasaran Eropa juga”.(wawancara, tanggal 29 febuari 2012)

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas maka saya dapat menarik kesimpulan bahwa upaya pemerintah dalam memberdayakan UMKM di Kota Blitar sendiri sudah cukup apik, yang mana dalam hal ini banyak sekali para wirausaha-wirausaha baru ataupun para pelaku UMKM banyak yang merasa terbantu dengan program-program yang dibuat oleh Pemerintah Kota Blitar sendiri dalam memberdayakan UMKM itu sendiri, seperti pemberian modal, pelaksanaan pameran, dan pemberian sarana-prasarana penunjang UMKM dan lain sebagainya. Program dan kegiatan-kegiatan tersebut sudah mendorong tingkat pertumbuhan UMKM yang cukup pesat yang ada di Kota Blitar yang mana dapat kita lihat tabel di bawah ini:

Tabel 17.
Perkembangan Data UMKM Kota Blitar Menurut
Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2007-2011

Kecamatan Sukorejo

Kelurahan	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
Tlumpu	71	71	175	175	196
Karangsari	163	257	252	252	355
Turi	133	169	180	180	253
Sukorejo	0	1041	1088	1088	1233
Blitar	126	57	59	59	233
Pakunden	526	592	600	600	884
Tanjungsari	239	259	688	688	688
Jumlah	1.258	2.446	3.042	3.042	3.842

Kecamatan Kepanjenkidul

Kelurahan	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
Kepanjenkidul	351	350	351	351	486
Kauman	217	217	217	217	220
Kepanjen Lor	72	217	217	488	151
Sentul	319	710	488	488	506
Bendo	319	710	488	320	313
Tanggung	232	248	239	101	221
Ngadirejo	106	88	101	101	221
Jumlah	1.616	2.186	2.002	2.204	2.222

Kecamatan Sananwetan

Kelurahan	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2010
Sananwetan	399	402	516	516	515
Bendogerit	343	343	367	367	385
Karangtengah	297	297	357	357	380
Plosokerep	418	413	410	418	509
Gedog	424	424	424	424	460
Rembang	125	143	165	165	219
Klampok	180	180	180	180	171
Jumlah	2.186	2.202	2.419	2.472	2.639
Jumlah(i+ii+iii+iv+v)	5.060	6.834	7.463	7.673	8.703

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar Tahun 2011

Dengan melihat tabel di atas terlihat laju perkembangan UMKM yang ada di Kota Blitar mulai tahun 2007 sampai 2011 maju pesat hal ini dapat dikatakan demikian karena dari tahun ke tahun perkembangan UMKM yang ada di Kota Blitar semakin bertambah. Hal ini membuktikan program pemberdayaan UMKM yang meliputi kegiatan pemberian modal, pemberdayaan sarana-prasarana penunjang UMKM dinilai cukup berhasil yakni terbukti dengan gambaran tabel di atas perkembangan UMKM di Kota Blitar berkembang yakni mulai tahun 2007 jumlah UMKM di 3 Kecamatan yakni mencapai 5.060 UMKM dan pada jangka waktu 4 tahun sudah berkembang menjadi 8.703 UMKM suatu hal yang membanggakan bagi Pemerintah Kota Blitar sendiri yang mana pemerintah mampu menggerakkan masyarakat Kota Blitar yang kreatif dan mempunyai jiwa kemandirian dalam berwirausaha guna memenuhi segala macam kebutuhan hidup mereka. Untuk itu di kira tepat sekali hal-hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar yang mana tidak kita pungkiri pula jika semakin berkembangnya tingkat perekonomian masyarakat sehingga hal ini dapat pula memicu kenaikan Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar, sehingga pembangunan di Kota Blitar pun dapat berjalan dengan lancar.

2) Dampak negatif

Pemberdayaan UMKM sangat membantu sekali dalam hal penyerapan tenaga kerja yang mana jumlah angkatan tenaga kerja di Kota Blitar sendiri jumlahnya cukup besar serta banyaknya warga yang hidup dibawah garis kemiskinan dapat tertolong dengan adanya kegiatan pemberdayaan UMKM di Kota Blitar sendiri. Nilai investasi dan nilai produksi yang cukup besar dapat

meningkatkan kegiatan perekonomian yang ada di Kota Blitar. Untuk itu manfaat dari adanya kegiatan pemberdayaan UMKM di Kota Blitar sangat besar sekali guna menjawab semua permasalahan seperti angka pengangguran yang tinggi, warga miskin yang banyak, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan perekonomian yang ada di Kota Blitar sendiri. Upaya yang selama ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar dalam pemberdayaan UMKM seperti. Kegiatan fasilitasi dana bergulir yang telah di perdakan oleh Pemerintah Kota Blitar yakni berdasarkan Peraturan Walikota Blitar No 3 tahun 2011 tentang pedoman umum pengelolaan dana bergulir untuk perkuatan permodalan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang mana didalamnya disebutkan dengan jelas jika pada bab III mengenai jumlah dan penyaluran dana bergulir diantaranya sebagai berikut:

1. Penyaluran dana bergulir untuk fasilitasi perkuatan permodalan bagi koperasi paling banyak sejumlah Rp 50.000.000,00
2. Penyaluran dana bergulir untuk fasilitasi perkuatan permodalan bagi UMKM perorangan atau UMKM kelompok yang memiliki barang jaminan atau angunan paling banyak sejumlah Rp 15.000.000,00 setiap orang.
3. Penyaluran dana bergulir untuk fasilitasi perkuatan permodalan bagi UMKM kelompok tanpa barang jaminan atau angunan paling banyak sejumlah Rp 1.000.000,00 setiap orang.

Berdasarkan peraturan tersebut maka diharapkan upaya yang telah dilakukan pemerintah tersebut dapat dimanfaatkan dengan cukup baik dan dapat

membantu masyarakat untuk lepas dari jurang kemiskinan. Selain itu masih ada lagi program-program yang telah dilakukan diantaranya adanya pembuatan program-program seperti:

1. Program penciptaan iklim UMKM yang kondusif
2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM
3. Program pengembangan sistem pendukung bagi UMKM
4. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

Hal ini dapat dikatakan menjadi program gagal apabila program-program yang di buat oleh Pemerintah Kota Blitar tersebut tidak mampu mengena kepada seluruh lapisan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Karena apabila program tersebut tidak dapat dilaksanakan tepat sasaran maka malah dapat menjerat masyarakat miskin. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang kaki lima di jalan Bali Kota Blitar, yakni Ibu Punasri, beliau mengatakan:

“ Banyak program-program yang di buat oleh Pemerintah Kota Blitar yang belum saya ketahui sampai saya ini, saya cuma mendengar dari pelaku UMKM desa tetangga yang telah dibina oleh pemerintah dalam menjalankan usaha. Saya merasa kebingungan karena di desa saya tidak ada pembinaan seperti desa tetangga saya. Akhirnya untuk memperluas usaha saya, saya berusaha meminjam kepada koperasi namun pada akhirnya malah saya terjerat hutang modal yang besar terhadap koperasi tersebut. Yang saya harapkan dari Pemerintah Kota Blitar sendiri adalah perlunya sosialisasi yang jelas terhadap program-program pengembangan wirausaha, sehingga tidak ada tebang pilih terhadap masyarakat, karena dirasa setiap warga mempunyai hak dari pemerintah untuk ikut diberdayakan. Dan sisi lain Pemerintah Kota Blitar harus menindak tegas terhadap prkatek-praktek koperasi yang menjalankan koperasinya tidak sesuai dengan UU koperasi di Indonesia. Karena dengan menjamurnya koperasi yang menjerat leher para usaha kecil tersebut malah membuat angka kemiskinan akan semakin meningkat.

Dari hasil wawancara tersebut terlihat jelas jika kurang tegasnya Pemerintah Kota Blitar dalam menindak Koperasi yang bekerja tidak sesuai dengan UU perkoperasian mengakibatkan banyak masyarakat kamu lemah terjerat pada hutang yang begitu besar. Sosialisasi dan pendataan terhadap masyarakat pelaku UMKM yang membutuhkan harus benar-benar mengena ke seluruh lapisan masyarakat. Hal ini tentunya digunakan untuk menghindari dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang berkedok dibalik pemerintah untuk memeras masyarakat dan nantinya tidak malah membantu dan malah membuat permasalahan baru yakni dengan meningkatnya jumlah masyarakat miskin yang ada di Kota Blitar. Untuk itu, perlunya sosialisasi dan produk hukum yang jelas dalam kaitannya pemberdayaan masyarakat bidang UMKM menjadi kunci penting dalam pemberdayaan UMKM yang ada di Kota Blitar, sehingga dalam hal ini program-program yang dibuat oleh Pemerintah Kota Blitar benar-benar mampu mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada di Kota Blitar.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan UMKM di Kota Blitar

a. Faktor Penghambat

Dari keadaan dilapangan yang diketemukan oleh peneliti, terlihat jelas bahwa masih ada beberapa kekurangan dalam pemberdayaan UMKM di Kota Blitar sendiri. Untuk itu perlu tindakan lebih lanjut dari pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut. Dalam hal ini yang menjadi faktor penghambat dalam proses tumbuhkembangnya Usaha Mikro Kecil dan Mengah yakni antara lain:

1) Rendahnya produktivitas.

Masalah yang masih dihadapi adalah rendahnya produktivitas, sehingga menimbulkan kesenjangan yang sangat lebar antar pelaku usaha kecil, menengah, dan besar. Kinerja seperti itu berkaitan dengan:

- a) Rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran; dan
- b) Rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. Peningkatan produktivitas UMKM sangat diperlukan untuk mengatasi ketimpangan antarpelaku, antar golongan pendapatan dan antar daerah, termasuk penanggulangan kemiskinan, selain sekaligus mendorong peningkatan daya saing nasional.

2) Terbatasnya akses UMKM kepada Sumber Daya Produktif.

Akses kepada sumber daya produktif terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar. Dalam hal pendanaan, produk jasa lembaga keuangan sebagian besar masih berupa kredit modal kerja, sedangkan untuk kredit investasi sangat terbatas. Bagi UMKM keadaan ini sulit untuk meningkatkan kapasitas usaha ataupun mengembangkan produk-produk yang bersaing. Disamping persyaratan pinjamannya juga tidak mudah dipenuhi, seperti jumlah jaminan meskipun usahanya layak, maka dunia perbankan yang merupakan sumber pendanaan terbesar masih memandang UMKM sebagai kegiatan yang beresiko tinggi.

Bersamaan dengan itu, penguasaan teknologi, manajemen, informasi dan pasar masih jauh dari memadai dan relatif memerlukan biaya yang besar untuk dikelola secara mandiri oleh UMKM. Sementara ketersediaan lembaga yang menyediakan jasa di bidang tersebut juga sangat terbatas dan tidak merata ke seluruh kelurahan di Kota Blitar.

- 3) Masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi. Maksudnya adalah masih rendah para pelaku UMKM untuk ikut dalam koperasi atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Dalam hal ini ketidaktahuan mereka disebabkan karena kurang disosialisasinya adanya LKM tersebut kepada masyarakat sehingga masyarakat banyak yang belum mengetahuinya dan serta masih kurangnya jumlah LKM di setiap kelurahan yang ada di Kota Blitar itu sendiri. Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 18.
Data UKM dan LKM Menurut Kelurahan dan Kecamatan
Di Kota Blitar Tahun 2011

Kecamatan Sukorejo	UKM	LKM
Plumpu	196	-
Karangsari	355	-
Turi	253	3
Sukorejo	1233	6
Blitar	233	19
Pakunden	884	2
Tanjungsari	688	8
Jumlah	3.842	38
Kecamatan Kepanjenkidul		
Kepanjenkidul	486	6
Kauman	220	-
Kepanjen Lor	151	-

Lanjutan...

Lanjutan...

Kecamatan Kepanjenkidul	UKM	LKM
Sentul	506	21
Bendo	313	-
Tanggung	320	3
Ngadirejo	221	-
Jumlah	2.222	30
Kecamatan Sananwetan		
Sananwetan	515	6
Bendogerit	385	-
Karangtengah	380	-
Plosokerep	509	21
Gedog	460	-
Rembang	219	3
Klompok	171	-
Jumlah	2.639	30

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar Tahun 2011

Berdasarkan data di atas terlihat jelas jika ada sebagian kelurahan yang ada di Kota Blitar belum memiliki LKM, yang mana ini tentunya merupakan penghambat dari terselenggaranya kegiatan pengembangan UMKM. Untuk itu maka perlu dibenahinya LKM atau Koperasi di Kota Blitar sehingga kegiatan pencarian modal dapat berjalan dengan lancar.

- 4) Tertinggalnya kinerja koperasi dan kurang baiknya citra koperasi. Kurangnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan (struktur organisasi, struktur kekuasaan, dan struktur insentif) yang unik/khas dibandingkan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktek-praktek berkoperasi yang benar (*best practices*) telah menimbulkan berbagai permasalahan mendasar yang menjadi kendala bagi kemajuan perkoperasian di Kota Blitar

Pertama, banyak koperasi yang terbentuk tanpa didasari oleh adanya kebutuhan/ kepentingan ekonomi bersama dan prinsip kesukarelaan dari para anggotanya, sehingga kehilangan jati dirinya sebagai koperasi sejati yang otonom dan swadaya/mandiri.

Kedua, banyak koperasi yang tidak dikelola secara profesional dengan menggunakan teknologi dan kaidah ekonomi moderen sebagaimana layaknya sebuah badan usaha.

Ketiga, masih terdapat kebijakan dan regulasi yang kurang mendukung kemajuan koperasi.

Keempat, koperasi masih sering dijadikan alat oleh segelintir orang/kelompok, baik di luar maupun di dalam gerakan koperasi itu sendiri, untuk mewujudkan kepentingan pribadi atau golongannya yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan kepentingan anggota koperasi yang bersangkutan dan nilai-nilai luhur serta prinsip-prinsip koperasi. Sebagai akibatnya:

- a) Kinerja dan kontribusi koperasi dalam perekonomian relatif tertinggal dibandingkan badan usaha lainnya, dan
- b) Citra koperasi dimata masyarakat kurang baik. Lebih lanjut, kondisi tersebut mengakibatkan terkikisnya kepercayaan, kepedulian dan dukungan masyarakat kepada koperasi.

5) Kurang kondusifnya iklim usaha.

Koperasi dan UMKM pada umumnya juga masih menghadapi berbagai masalah yang terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif, di antaranya adalah:

- a) Ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan yang mengakibatkan besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perijinan dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi;
- b) Praktik bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat; dan
- c) Lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Di samping itu, otonomi daerah yang diharapkan mampu mempercepat tumbuhnya iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM, ternyata belum menunjukkan kemajuan yang merata. Untuk itu, dengan melihat beberapa fakta dari faktor penghambat di lapangan maka bisa dijadikan tolak ukur untuk perbaikan pemberdayaan UMKM ke depannya.

b. Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung terselenggaranya UMKM di Kota Blitar dengan baik adalah bahwa masyarakat Kota Blitar sendiri sadar akan kemandirian dalam berwirausaha, hal ini menjadi sisi positif yang mana jiwa berwirausaha sudah terbentuk dalam diri mereka. Disamping itu banyaknya orang tua murid di Kota Blitar orang yang mensekolahkan anaknya pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Blitar menjadi modal kuat untuk mengembangkan kegiatan

pemberdayaan UMKM yang mana perbandingan jumlah siswa SMA dan SMK sebagai berikut:

Tabel 19.
Peserta dan Lulusan Ujian Akhir Nasional SMA/SMK Menurut Kecamatan Di Kota Blitar Tahun 2010/2011

Jenis sekolah	Negeri		Swasta	
	Peserta	Lulus	Peserta	Lulus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sukorejo	601	601	523	519
SMA	151	151	154	151
SMK	450	450	369	368
Kepanjenkidul	215	215	568	522
SMA	215	215	47	42
SMK			521	510
Sananwetan	1.532	1.525	467	464
SMA	320	320	281	278
SMK	1.212	1.205	186	186
Kota Blitar SMA	686	686	482	471
SMK	1.662	1.655	1.076	1.064

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Blitar 2011

Dengan melihat tabel diatas, maka dapat dikatakan jika jumlah lulusan SMK lebih banyak dari pada siswa SMA yang mana telah kita ketahui pula kalau lulusan SMK adalah lulusan yang kebanyakan dipersiapkan untuk kerja, di mana mereka banyak dibekali dengan beberapa keahlian yang mereka ambil sesuai dengan bidangnya. Dengan adanya hal tersebut juga menjadi faktor pendukung pula bagi Pemerintah Kota Blitar untuk menjadikan para lulusan tersebut untuk berwirausaha dan memberikan kontribusi besar dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Blitar sendiri. Yang mana hal itu juga dapat menciptakan kemandirian (segi ekonomi) pada penduduk usia produktif tersebut.

Dan juga mudahnya dalam ketersediaan memperoleh bahan baku dalam berbagai macam produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah membuat harga jual produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah mampu bersaing dipasaran, karena dirasa produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di Kota Blitar selain harganya cukup terjangkau kualitasnya pun terjamin pula. Hal itulah yang menjadi pendorong berkembang pesatnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Blitar sehingga mendorong masyarakat Kota Blitar untuk lebih kreatif dan mandiri lagi dalam hal kegiatan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan kegiatan yang positif yang mana kegiatan ini mendorong masyarakat untuk berpikir kreatif dan mandiri dalam bertahan hidup. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat tergerak selain untuk meningkatkan taraf hidupnya juga membantu pemerintah dalam meningkatkan PAD sehingga pembangunan di Kota Blitar pun dapat berjalan lancar.

F. ANALISIS DATA

1. Analisis Upaya Pemerintah Kota Blitar mengenai Pemberdayaan UMKM yang ada di Kota Blitar yang tertuang pada Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar.

a. Program Kerja Pemberdayaan UMKM Oleh Pemerintah Kota Blitar

yakni :

1) Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar

Berdasarkan Program Kerja serta kebijakan yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar maka dapat kita lihat bahwa Pemerintah Kota Blitar dalam hal ini telah melakukan tugasnya dengan baik, yang mana mereka berusaha untuk memberdayakan masyarakat Kota Blitar sendiri dengan kegiatan ataupun program pemberdayaan masyarakat yakni pemberdayaan UMKM guna meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Blitar itu sendiri. Pemberdayaan sendiri mempunyai arti yang begitu luas. Menurut Wahyono (Suryono, 2007:25) menyatakan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (*self-reliant communities*) sebagai suatu sistem yang mengorganisasikan diri mereka sendiri. Jadi dalam hal ini Pemerintah Kota Blitar hanya memfasilitasi kegiatan UMKM yang semua itu sudah terangkum pada Program Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar sehingga UMKM yang ada di Kota Blitar tersebut mampu untuk berkembang dengan bagus dan lebih profesional lagi. Mengingat poin-poin penting mengenai kebijakan pemerintah mengenai pemberdayaan masyarakat dibidang UMKM seperti kebijakan memfasilitasi bantuan permodalan untuk UMKM, pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kualitas SDM UMKM membuat pemerintah sangat berperan aktif dalam hal pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan salah satu poin kebijakan pengembangan wirausaha mandiri sektor informal dan tenaga kerja terdidik menguatkan kita bahwa Pemerintah Kota

Blitar benar-benar peduli terhadap kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat miskin yang mana mereka didik dan dilatih supaya menjadi masyarakat yang tangguh, kreatif dan mandiri sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya, mengingat jumlah masyarakat miskin yang ada di Kota Blitar sendiri cukuplah tinggi. Hal ini tentunya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah cukup maksimal, namun masih kurang mengenai sasaran program pemberdayaan UMKM terhadap masyarakat serta kurangnya sosialisasi mengenai fasilitasi permodalan bagi masyarakat yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang belum tahu tentang bagaimana untuk mendapatkan modal usaha baru sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat Kota Blitar sendiri. Tentu diperlukan perubahan dan perbaikan untuk kegiatan kedepannya. Karena telah diketahui di lapangan bahwa bunga pinjaman yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar cukup rendah dan bisa dijangkau oleh masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Untuk itu, perlunya sosialisasi terhadap program-program pemberdayaan UMKM dirasa cukup tepat mengingat jika program pemerintah itu dibuat agar dapat membantu masyarakat dalam menjawab berbagai permasalahan yang ada, terutama permasalahan yang berkaitan tentang pengangguran dan masalah perekonomian lainnya. Program pemberdayaan UMKM dapat menjadi solusi dari semua permasalahan tersebut. Namun kenyataan dilapangan jika program pemberdayaan UKM yang dbuat oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar sudah mengena pada pelaku UMKM kebanyakan masyarakat yang kena hasil binaan Dinas Koperasi dan UKM sangat

merasa terbantu dan itu pun menjadikan lebih bisa mandiri dan sukses dalam menjalani usahanya.

2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar

Dengan melihat Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tersebut sudah cukup bukti bahwa adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Blitar sendiri dalam hal ini poin mengenai adanya kebijakan koordinasi yang baik antara Pemerintah, pengusaha handal dan para pelaku UMKM menjadi suatu hal yang baik bagi para pelaku UMKM guna perkembangan UMKM Kota Blitar sendiri kedepannya. Pembinaan melalui banyak program ataupun kegiatan yang dibuat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar diharapkan mampu untuk mendorong tingkat perkembangan UMKM yang ada di Kota Blitar sendiri. Karena dirasa UMKM yang ada di Kota Blitar masih perlu banyak belajar dalam menjalani suatu bisnis atau jenis usaha, supaya diharapkan UMKM yang ada di Kota Blitar lebih berkompeten dan professional dalam menjalani jenis usahanya. Tentunya hal tersebut haruslah sesuai dengan tahap-tahapan yang didasari oleh cara berpikir ilmiah. Berikut ini tahapan-tahapan yang seharusnya dapat ditempuh oleh Pemerintah Kota Blitar supaya pemberdayaan tersebut dapat mencapai tujuan yang dicapai, menurut Sulistiyani (2004:82) tahapan pemberdayaan masyarakat meliputi:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.

2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar mampu terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Dengan berpedoman pada tahap-tahap pemberdayaan yang dikemukakan oleh para ahli tersebut diharapkan jika pemberdayaan UMKM di Kota Blitar dapat berjalan dengan apik dan penciptaan kemandirian dalam masyarakat dapat terwujud. Dalam hal ini pemerintah membantu dalam segala pembinaan dan fasilitasi kegiatan usaha sehingga beragam jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat dapat berkembang sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Blitar sendiri. Namun masih perlu banyak perbaikan terhadap pembinaan-pembinaan terhadap UMKM yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, kebanyakan pembinaan tersebut masih kurang menyeluruh dan hasil dari pembinaan tersebut masih dirasa kurang maksimal. Sehingga diharapkan perlu adanya perubahan dan perluasan jaringan pembinaan jenis usaha di wilayah Kota Blitar sendiri. Adanya poin penting dalam program yang tertuang pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar menjalin kerjasama dengan pengusaha handal dapat menjadi nilai lebih dalam proses pemberdayaan UMKM yang di Kota Blitar. Karena para pelaku UMKM yang ada di Kota Blitar bisa mendapat pengetahuan baru misal dengan menjalin kemitraan dengan pengusaha tersebut diharapkan dapat mendorong laju

pertumbuhan UMKM yang ada di Kota Blitar, sehingga UMKM yang ada di Kota Blitar dapat menjadi lebih professional dalam pengelolaannya. Dan pula dengan menjalin kemitraan tersebut diharapkan dapat mengubah pola pikir para pelaku UMKM yang mana yang dulu memandang UMKM sebagai usaha sampingan atau jenis usaha sekala rumahan dan remeh menjadi salah satu jenis usaha yang dapat lebih bisa diharapkan dan dapat menuju sebuah kunci gerbang kesuksesan.

b. Kegiatan Pemberdayaan

1) Pemberdayaan Manajemen Sumber Daya Manusia Pelaku UMKM.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dan juga berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya. Ketersediaan bahan baku lokal bagi industri kecil dan menengah merupakan keunggulan tersendiri yang memungkinkan dapat beroperasinya secara efisien. Pada sisi lain modal kerja yang dibutuhkan relatif kecil, sehingga memberi peluang kepada masyarakat yang memiliki jiwa wirausaha untuk mendirikan unit-unit usaha dengan kadar kecanggihan teknik produksi yang terjangkau. Dalam batas-batas tertentu kegiatan industri kecil dan menengah dapat mengurangi sebagian beban impor sehingga dalam kerangka strategis, hal ini dapat menghemat devisa.

Namun demikian usaha kecil ini masih dipandang sebagai usaha yang lemah kinerjanya. Pengembangan UMKM harus disertai dengan pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) yang mumpuni dalam berbagai aspek. Keberadaan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi sangat penting artinya bagi organisasi. Dalam perkembangannya, organisasi akan menghadapi permasalahan tenaga kerja yang semakin kompleks, dengan demikian pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan secara profesional oleh dinas tersendiri dalam suatu organisasi, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar sendiri. Karena tak perlu kita pungkiri pula bahwa sumber daya manusia pelaku UMKM di Kota Blitar sendiri masih standar dan belum profesional maka dari itu perlu upaya dari Pemerintah Kota Blitar dalam meningkatkan sumber daya manusia melalui berbagai workshop pengembangan kewirausahaan serta pembinaan ataupun pemberdayaan sumber daya manusia pelaku UMKM Kota Blitar sendiri. Menurut Parson (Suharto, 2005:58) Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Jadi dalam pemberdayaan SDM pelaku UMKM yang ada di Kota Blitar dirasa begitu sangat penting sesuai dengan data yang diperoleh dilapangan jika kegiatan pelatihan, bimbingan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar serta Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar memang benar-benar telah tepat sesuai dengan kajian ilmiah. Hal ini digunakan untuk mendorong masyarakat lebih kreatif dan mandiri dalam pengelolaan jenis usaha yang digeluti. Sehingga masyarakat benar-benar harus total dalam menggeluti suatu pekerjaan sehingga hasil yang diharapkan pun dapat maksimal.

2) Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pelaku UMKM

Pemberdayaan sosial ekonomi pelaku UMKM yang ada di Kota Blitar sendiri telah dilakukan dengan cukup bagus oleh Pemerintah Kota Blitar antara lain dengan pemberian bantuan modal baik hibah maupun pinjaman, alat-alat produksi serta perlengkapan lain sebagai penunjang kegiatan produksi. Telah kita ketahui pula jika upaya yang dilakukan pemerintah tersebut benar-benar ditunjukkan untuk masyarakat Kota Blitar, agar supaya masyarakat Kota Blitar sendiri mampu meningkatkan taraf hidupnya dan bisa mandiri dalam mencukupi segala macam kebutuhan hidup layaknya.

Para wirusahawan UMKM di Kota Blitar sendiri kebanyakan sudah banyak yang berhasil menjalankan bisnis usaha mereka, hal ini terbukti ada salah satu pengusaha bakso yang dengan hanya berjualan bakso saja dapat mengkuliahkan anaknya hingga perguruan tinggi negeri. Kesuksesan tersebut tidak lepas dari peran Pemerintah Kota Blitar dalam membantu para usahawan UMKM dalam pemberdayaan tingkat sosial ekonomi masyarakat pelaku UMKM itu sendiri. Namun masih banyak sekali permasalahan yang terjadi di lapangan mengenai pemberdayaan sosial ekonomi pelaku UMKM tersebut, karena dalam hal ini masih banyak sekali jenis UMKM yang belum tersentuh program

pemberdayaan UMKM tersebut. Banyak sekali UMKM yang berusaha sendiri dalam mencapai kesuksesannya, karena di lain pihak pemerintah sendiri kurang melakukan sosialisasi terhadap program-program yang dimiliki. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum tahu program-program pemberdayaan yang dimiliki pemerintah dalam hal kaitanya dengan UMKM. Oleh karena itu, tidak perlu kita pungkiri pula jika keadaan sosial ekonomi pelaku UMKM itu sendiri masih saya rasa pas-pasan untuk hidup dan hanya segelintir saja yang mengalami masa kejayaan usahanya. Untuk itu perlunya sosialisasi dari pihak pemerintah mengenai program-program yang dimiliki oleh pemerintah agar banyak masyarakat Kota Blitar yang tahu mengenai program pemberdayaan yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga diharapkan program tersebut dapat digunakan oleh masyarakat dan dapat pula meningkatkan tingkat keadaan sosial ekonomi mereka.

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 mengenai UMKM dapat kita lihat jika salah satu poin penting dalam pemberdayaan UMKM adalah meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Dari tujuan tersebut jelas terbukti jika pengentasan rakyat dalam hal ini masyarakat Kota Blitar perlu dilakukan mengingat UU sudah mengamanatkan jika pemberdayaan UMKM dapat menjadi solusi dari permasalahan sosial ekonomi tersebut. Dari data yang menunjukkan angka kebutuhan Hidup layak pekerja di Kota Blitar yang hanya mencapai Rp 821.560,97 pada tahun 2010 menjadikan Kota Blitar peringkat yang masih tengah-tengah dan dianggap masih rendah dibandingkan dengan kota-kota lainnya

di Jawa Timur. Untuk itu peran pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar perlu dikaji lebih mendalam mengingat pangsa pasar UMKM di Kota Blitar begitu sangat tinggi hal ini terlihat dari peningkatan UMKM dari tahun ketahun yang cukup signifikan di Kota Blitar.

3) Pemberdayaan Sarana Prasarana UMKM

Pemberdayaan sarana-prasarana terhadap UMKM yang ada di Kota Blitar sendiri dirasa sudah cukup apik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar sendiri, yang mana pihak pemerintah menyediakan peralatan penunjang kegiatan UMKM, seperti tenda, pameran-pameran, bazar, modal dan masih banyak yang lainnya. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah benar-benar berupaya untuk menciptakan suatu keadaan masyarakat yang lebih kreatif lagi dan mandiri dalam memenuhi segala macam kebutuhannya dengan cara berwirausaha mendidik masyarakat untuk mempunyai jiwa mandiri. Di sekolah-sekolah kejuruan pun siswa sudah diajari untuk bagaimana berwirausaha setelah mereka lulus nantinya. Hal ini terbukti dengan adanya galeri-galeri di salah satu sekolah di Kota Blitar yakni SMKN 3 Blitar yang mana mereka membuka galeri untuk memamerkan dan menjual untuk umum hasil karya buatan para siswa SMK tersebut. Hal ini diupayakan Pemerintah Kota Blitar agar supaya para siswa tersebut mempunyai bekal untuk berwirausaha dan mereka mampu mandiri dalam menjalani kehidupan kedepannya.

Menurut Situmorang (2008:87) strategi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

a. Peningkatan Kualitas SDM

- b. Perijinan Usaha UMKM
- c. Peningkatan Permodalan
- d. Peningkatan Kualitas Teknologi
- e. Pengembangan Pasar UMKM

Strategi yang tepat dalam pemberdayaan UMKM menjadi tolak ukur yang penting dalam perkembangan UMKM yang ada di Kota Blitar. Salah satunya berdasarkan data yang diperoleh di lapangan jika program seperti program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM yang juga termasuk dalam strategi peningkatan kualitas SDM pelaku UMKM menjadi hal yang sangat tepat program yang dibuat tersebut. Mengingat SDM pelaku UMKM yang ada di Kota Blitar belum dapat dikatakan memenuhi standar internasional.

Pemerintah Kota Blitar mulai bulan febuari 2012 juga mengadakan bazar produk UMKM di Taman Rekreasi Kebon Rojo ditiap minggunya. Hal ini mereka upayakan agar produk-produk UMKM di Kota Blitar bisa diketahui oleh masyarakat luas dan para pelaku UMKM sendiri juga mendapatkan keuntungan dengan hasil jualannya semakin laku dan banyak peminatnya. Kegiatan tersebut juga sesuai dengan kajian ilmiah sesuai dengan standar yakni tentang pengembangan pasar UMKM. Untuk itu, perlu dipertahankanya kegiatan-kegiatan seperti ini agar supaya UMKM di Kota Blitar sendiri semakin berkembang dan mampu menciptakan suatu kemandirian dalam masyarakat Kota Blitar kedepannya.

2. Analisis Dampak Pelaksanaan Program Pemberdayaan UMKM di Kota Blitar

a. Pemberi Program Pemberdayaan UMKM

1) Dampak Positif

Berdasarkan kajian dilapangan, pemberdayaan UMKM di Kota Blitar mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja para aparatur Pemerintah Kota Blitar. Yang mana dalam hal ini aparatur Pemerintah Kota Blitar sebagai pihak yang memberikan program, bekerja keras dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat kaitannya dengan program pemberdayaan UMKM. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antar bangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan aktivitas dunia usaha. Oleh karena itu, tata pemerintahan yang baik perlu segera dilakukan agar segala permasalahan yang timbul dapat segera dipecahkan dan juga proses pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Disadari, mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan waktu yang tidak singkat dan juga upaya yang terus menerus. Disamping itu, perlu juga dibangun kesepakatan serta rasa optimis yang tinggi dari seluruh komponen bangsa yang melibatkan tiga *stake holder* yaitu aparatur negara,

pihak swasta dan masyarakat madani untuk menumbuh kembangkan rasa kebersamaan dalam rangka mencapai tata pemerintahan yang baik.

United Nation Develoment Program (UNDP) merekomendasikan beberapa karakteristik *governance* yakni legitimasi politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan berasosiasi dan berpartisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan, manajemen sektor publik yang efisien, kebebasan informasi dan ekspresi, sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya. Dengan berpedoman pada kriteria dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mencapai tujuan dari *good governance* sendiri, maka Pemerintah Kota Blitar banyak memperoleh penghargaan baik dari di tingkat regional maupun tingkat nasional. Selain mempunyai manfaat sebagai pemberi program pemberdayaan UMKM yang mana dapat sebagai tolak ukur kinerja yang baik guna pencapaian *good governance*, hal ini juga dapat mempunyai manfaat yang lebih dalam memajukan perekonomian masyarakat tentunya dalam program pemberdayaan masyarakat yang dikemas dalam program pemberdayaan UMKM. Penghargaan yang diterima dari kinerja yang maksimal membuat kebanggaan tersendiri bagi aparatur Pemerintah Kota Blitar. Untuk itu, pentingnya semangat kerja dan kerja keras dalam pencapaian tujuan sebuah program begitu penting guna mencapai tujuan yang diinginkan.

2) Dampak Negatif

Pemberdayaan UMKM dapat menjadi solusi yang cukup efektif dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Karena yang telah kita ketahui pula

menurut Parson (Suharto, 2005:58) Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Jadi intinya pemberdayaan menekankan orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemerintah Kota Blitar dalam hal ini telah melakukan berbagai kegiatan pembinaan, penyaluran dana dan bantuan sarana prasana penunjang UMKM yang mana semua ini dilakukan agar supaya masyarakat pelaku UMKM tersebut mampu mandiri dalam memenuhi segala macam kebutuhan hidupnya baik sandang, pangan, maupun papan. Pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat dapat tercapai jika kerja sama antara ketiga *stake holder* yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Namun apabila ketiga *stake holder* ini tidak dapat menjalin kerjasama dengan cukup apik maka hal ini tentunya program-program pemberdayaan masyarakat yang dibuat pemerintah tentunya akan menjadi program gagal. Untuk itu dampak negatif yang diterima oleh pemberi program yakni adalah Pemerintah Kota Blitar diantaranya pemerintah harus bekerja keras dan berusaha untuk menyatukan pendapat antara pihak swasta yakni sebagai investor sekaligus motivator dalam pencapaian kesuksesan jalannya pemberdayaan UMKM di Kota Blitar dan pelaku UMKM sendiri sebagai masyarakat yang perlu diberdayakan sehingga perekonomian masyarakat tersebut dapat terangkat dan dapat membantu pemerintah dalam

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga pembangunan di Kota Blitar dapat berjalan lancar. Dalam proses pembuatan program-program pun, pemerintah harus benar-benar mengerti sebenarnya apa yang menjadi permasalahan yang terjadi dimasyarakat selama ini. Dan diharapkan program-program yang dibuat oleh pemerintah tersebut mampu mengatasi setiap permasalahan yang muncul dimasyarakat dalam hal ini kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dibidang pemberdayaan UMKM. Jadi intinya pemerintah harus bekerja keras dalam mengkaji setiap permasalahan kemiskinan yang terjadi dimasyarakat.

b. Penerima Program Pemberdayaan UMKM

1) Dampak Positif

Penerima program pemberdayaan UMKM juga merasa banyak terbantu sekali dengan adanya program tersebut seperti kegiatan pemberian fasilitas permodalan, sarana-prasarana penunjang kegiatan UMKM, pembinaan-pembinaan terhadap pelaku UMKM dan masih banyak lagi kegiatan dalam pemberdayaan UMKM yang ada di Kota Blitar. Hal ini mengingat juga jumlah angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Blitar sendiri jumlahnya begitu banyak, mengakibatkan taraf hidup masyarakatnya pun di bawah standar hidup layak. Hal ini tentunya akan menghambat laju pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di Kota Blitar. Mengingat Kota Blitar sendiri adalah kota kecil yang baru tumbuh perekonomiannya.

Dengan banyaknya program pemberdayaan masyarakat seperti UMKM tersebut diharapkan pemerintah mampu untuk menciptakan suatu keadaan masyarakat yang mandiri dalam bidang perekonomian, dalam hal ini pemenuhan sandang pangan papan masyarakat. Karena dirasa tiga hal tersebut adalah pedoman dasar suatu keadaan masyarakat dapat dikatakan sejahtera. Berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM bahwa adanya asas kemandirian, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM. Dari adanya kajian tersebut terlihat jelas jika UU tersebut masyarakat dapat mandiri walaupun mendapat bantuan dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini hanya sebagai sang inovator saja ataupun stimulan sehingga UMKM dalam hal ini bergerak sendiri dan berpikir kreatif dalam mengembangkan usahanya.

Banyak sekali para pelaku UMKM yang ada di Kota Blitar berhasil dalam berbagai jenis usaha yang ditekuninya. Fakta tersebut terlihat jelas dengan data yang diperoleh dilapangan jika UMKM yang ada di Kota Blitar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang mana pada tahun 2007 UMKM yang ada di Kota Blitar yang terdaftar mencapai 5.060 UMKM dan meningkat sampai tahun 2010 mencapai 8.703 UMKM. Hal tersebut menjadi prestasi yang membanggakan mengingat upaya Pemerintah Kota Blitar sendiri dalam menciptakan suatu keadaan masyarakat yang mandiri dalam hal perekonomian hidupnya begitu genjar digalakan. Hal ini tentu saja menjadi poin penting bagi masyarakat Kota Blitar sendiri dalam mengembangkan jiwa

kreatif, tangguh dan mandiri dalam melakukan wirausahanya. Kebanyakan masyarakat para pelaku UMKM di Kota Blitar merasa sangat terbantu dalam upaya pemerintah menyediakan program-program yang dibuat dan dikelola Pemerintah Kota Blitar tersebut. Banyak para pelaku UMKM yang ada di Kota Blitar yang tidak terjerat pada lintah darat, karena Pemerintah Kota Blitar sendiri sudah memfasilitasi kegiatan jenis usaha UMKM tersebut, seperti modal, sarana-prasarana serta pembinaan terhadap pelaku UMKM itu sendiri. Untuk itu perlu ditingkatkannya kembali program pemberdayaan tersebut agar masyarakat pelaku UMKM tersebut lebih profesional, tangguh dan mandiri.

2) Dampak Negatif

Dengan melihat manfaat dari program pemberdayaan masyarakat itu sendiri maka dapat dikatakan jika manfaat yang diberikan dari program yang dibuat oleh Pemerintah tersebut dirasa juga cukup besar, mengingat dengan makin banyaknya jumlah UMKM yang ada di Kota Blitar maka semakin banyak pula jumlah angkatan kerja yang terserap sehingga angka pengangguran pun dapat berkurang dan tingkat kesejahteraan masyarakat pun dapat tercapai. Hal ini dapat kita lihat dilapangan jika banyak terjadi peningkatan jumlah jenis usaha yang dihasilkan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. UMKM dapat menjadi solusi dari pemecahan masalah sosial ekonomi tersebut, karena tidak perlu kita pungkiri pula bahwa disaat krisis ekonomi, UMKM mampu menolong perekonomian masyarakat. Hal itulah yang mendorong pemerintah untuk menciptakan jiwa kemandirian

dalam masyarakat, karena konsep mandiri sendiri menurut Suyono (2003:7) merupakan perimbangan kekuatan antara masyarakat lokal (daerah) dan negara dalam menentukan arah dan tujuan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Jadi kemandirian sendiri mempunyai arti bekerjasama antar masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Dan UMKM di Kota Blitar pun dapat mencapai tingkat kesuksesan berkat usaha yang digalang antara pihak pemerintah Kota Blitar sendiri dengan pelaku UMKM yang ada di Kota Blitar.

Namun hal negatif yang perlu kita ketahui pula, program yang begitu banyak dibuat oleh Pemerintah Kota Blitar sendiri dalam hal ini kaitannya dengan pemberdayaan UMKM membuat masyarakat di Kota Blitar menjadi kebingungan yang mana harus dipilih. Sosialisasi yang kurang membuat masyarakat kurang mengerti dengan adanya program-program yang dibuat pemerintah yang ditunjukan kepada masyarakat tersebut. Dan akhirnya yang dapat kita ketahui dilapangan banyak sekali para pelaku UMKM di Kota Blitar yang terjebak pada koperasi-koperasi yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini rentenir. Untuk itu, perlunya UU atau Perda yang jelas yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM tersebut mengingat permasalahan tersebut menjadi masalah yang cukup pelik dan harus dipecahkan bersama-sama tanpa ada tebang pilih terhadap masyarakat pengguna program pemberdayaan tersebut.

3. Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan UMKM di Kota Blitar

a. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam usaha pemberdayaan UMKM di Kota Blitar sendiri menjadi tolak ukur dari perbaikan pemberdayaan UMKM di Kota Blitar selanjutnya, karena penting sekali jika disetiap program pemberdayaan UMKM di Kota Blitar sendiri indikator dimana program itu dapat dikatakan berhasil. Dari beberapa faktor penghambat yang terjadi dilapangan diatas mengakibatkan agak tersendatnya berjalannya program pemberdayaan UMKM di Kota Blitar sendiri.

Faktor penghambat terbesar dari pemberdayaan UMKM ini adalah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam program ini dan hal itu justru berasal dari dalam sendiri. Seperti para pelaku UMKM belum mengetahui profesionalitas kinerja yang mana mereka masih tidak melakukan pembukuan terhadap hasil penjualan produk mereka, sehingga tidak ada perbedaan antara pendapatan dari penjualan yang jelas dengan biaya untuk konsumsi dan ini pun yang membuat para pelaku UMKM itu sendiri menjadi bangkrut atau gulung tikar. Dan faktor penghambat lain adalah kurang sosialisasi dari pihak Pemerintah Kota Blitar sendiri terhadap program-program pemberdayaan yang dimilikinya, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui peran dari Pemerintah Kota Blitar sendiri yang mana sebenarnya sudah membuatkan program serta berbagai kebijakan mengenai pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Menurut Soemarjan (Saefudin,2003:27) mengungkapkan bahwa indikator keluarga sejahtera pada dasarnya disusun untuk menilai taraf pemenuhan kebutuhan keluarga yang

dimulai dari kebutuhan yang sangat mendasar sampai dengan pemenuhan kebutuhan yang diperlukan untuk pengembangan diri dan keluarga. Berdasarkan pendapat dari kajian keilmuan tersebut jelas terbukti jika masyarakat Kota Blitar perlu melakukan perubahan terhadap hidupnya. Dan tentunya pemberdayaan UMKM dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk berperan serta dalam memperbaiki perekonomian masyarakat di Kota Blitar. Mengajak masyarakat untuk ikut berkoperasi menjadi poin penting dalam mengatasi permasalahan dalam pemberdayaan UMKM karena koperasi dikira mampu untuk mengangkat kesejahteraan para anggotanya. Untuk itu penting sekali jika dalam pemberdayaan UMKM masyarakat diberdayakan juga dalam hal perkoperasian sehingga kesejahteraan masyarakat pun dapat meningkat.

b. Faktor Pendukung

Pemberdayaan UMKM melibatkan berbagai komponen pendukung untuk mewujudkan perkembangan UMKM yang berkaitan dengan keberadaan, perkembangan dan berjalannya UMKM itu sendiri. Sumber Daya Manusia merupakan komponen utama dalam pengembangan UMKM, baik itu dari pihak pengambil kebijakan maupun pelaku UMKM, karena meskipun pelaku UMKM mempunyai kemauan serta usaha yang sangat keras dalam pengembangan UMKM, maka usaha tersebut kurang maksimal jika tidak ditunjang oleh pengambil kebijakan (pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar) begitu juga sebaliknya. Menurut Iff (Suharto, 2005:58) Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Jadi

dalam hal ini masyarakat Kota Blitar khususnya masyarakat dengan perekonomian lemah perlu diberdayakan melalui UMKM mengingat mereka perlu dibantu untuk keluar dari jurang kemiskinan. Dalam hal ini masyarakat tersebut harus dibimbing supaya mandiri. Mereka harus berusaha berkreatif dalam melakukan kegiatan perekonomiannya, sedangkan pemerintah dalam hal ini dapat memberikan dukungan dengan memberikan fasilitas pengembangan UMKM berupa sarana prasarana yang dapat berupa perlengkapan alat penunjang kegiatan usaha, seperti bahan baku, tenda, modal usaha serta pembinaan yang serius dan terarah untuk meningkatkan kualitas pelaku UMKM supaya lebih profesional lagi. Dukungan lain yang nyata bisa berupa peminjaman modal untuk pengembangan usaha, yang dalam pelaksanaannya bisa bekerja sama dengan instansi keuangan (Koperasi, LKM atau Lembaga Penjamin Keuangan lainnya).

Jika hal tersebut diatas bisa dimengerti dan dilaksanakan oleh semua pihak, maka harapan untuk bisa mewujudkan pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Blitar sendiri sebagai upaya dari Pemerintah Kota Blitar dalam menciptakan ataupun menanamkan jiwa kemandirian pada masyarakat Kota Blitar sendiri mendekati kenyataan. Hal tersebut menjadi kunci penting dalam pemerataan pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Blitar. Sehingga diharapkan pembangunan dapat berjalan lancar dari akibat adanya sinergitas antara Pemerintah Kota Blitar sendiri dengan masyarakat dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi yakni pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian lokal daerah, khususnya dalam menggerakkan aktivitas ekonomi regional dan penyediaan lapangan kerja di Kota Blitar. Namun demikian UMKM masih menghadapi berbagai masalah mendasar dalam hal ini yang sempat peneliti ketahui dilapangan diantaranya dilihat dari:

- 1) Upaya Pemerintah Kota Blitar dalam pemberdayaan UMKM yang tertuang dalam program kerja Dinas Kopeasi dan UKM Kota Blitar dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dirasa sudah cukup baik. Hal ini mengingat program, yang dibuat telah dilakukan kajian yang lebih mendalam terhadap permasalahan kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Program-program pemberdayaan tersebut diantaranya:
 - a) Program penciptaan iklim UMKM yang kondusif
 - b) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM
 - c) Program pengembangan sistem pendukung bagi UMKM
 - d) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

Dibuatkannya program-program tersebut diharapkan mampu menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat. Karena tentu saja program-program yang dibuat oleh Pemerintah tersebut tidak mau

dianggap sebagai program gagal dan malah tidak membantu masyarakat sama sekali. Untuk itu perlu kajian yang lebih mendalam mengenai kecocokan program yang dibuat dengan permasalahan dilapangan. Adanya kerjasama antar berbagai *stake holder* untuk bersama-sama memberantas kemiskinan yang ada di Kota Blitar perlu dilakukan guna mencapai tujuan perubahan sosial bersama.

- 2) Dalam kegiatan pemberdayaan baik dalam kegiatan pemberdayaan MSDM pelaku UMKM, pemberdayaan sosial ekonomi pelaku UMKM, kegiatan pemberdayaan sarana prasarana penunjang UMKM, dapat diketahui jika masyarakat yang terbina oleh program-program yang dibuat oleh Pemerintah Kota Blitar merasa sangat terbantu. Hal ini terbukti dengan banyaknya UMKM yang mampu menumbuhkembangkan potensi UMKM yang dimilikinya. Hal ini menjadi berita baik bagi pemerintah, apabila program yang dibuat tersebut dapat diterima dimasyarakat. Namun tidak kita pungkiri pula jika masih perlu banyak perubahan-perubahan yang mendasar guna pencapaian hasil yang lebih maksimal dalam hal ini masalah kemiskinan dapat ditekan sekecil mungkin sehingga pembangunan di Kota Blitar dapat berjalan dengan lancar.
- 3) Jika dilihat dari dampak pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di Kota Blitar yang dilihat dari pemberi program pemberdayaan UMKM yakni pihak Pemerintah Kota Blitar baik dari sisi positif dan negatif dari program- program pemberdayaan UMKM dan jika dilihat dari penerima program pemberdayaan UMKM yakni para pelaku UMKM sendiri baik di

lihat dari sisi positif dan negatif, maka dapat disimpulkan perlu adanya koordinasi yang baik antara pihak Pemerintah Kota Blitar dan pihak masyarakat dalam menelaah setiap permasalahan yang terjadi dimasyarakat kaitanya dengan pengentasan kemiskinan, pengurangan penganguran dan lain sebagainya. Untuk itu, kerjasama yang baik antar *stake holder* (Pemerintah Kota Blitar, swasta, dan masyarakat) dapat menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan apa yang diinginkan yakni perubahan sosial ekonomi dalam masyarakat Kota Blitar.

- 4) Faktor penghambat dan pendukung tumbuh kembangnya UMKM yang ada di Kota Blitar tidak lepas dari masih minimnya tingkat pengetahuan masyarakat dalam menyikapi upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar. Dan hal tersebut tentunya menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah untuk bekerja keras mempromosikan upaya-upaya apa saja yang harus diberikan kepada masyarakat Kota Blitar pelaku UMKM yang membutuhkan. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar dalam hal ini antara lain:

- a) Fasilitasi dana bergulir, yang mana kegiatan ini sudah mempunyai pedoman dasar yang jelas terhadap pemberian dana kepada masyarakat pelaku UMKM yang membutuhkan yang tercantum pada Peraturan Walikota Blitar No 3 tahun 2011 tentang pedoman umum pengelolaan dana bergulir untuk perkuatan permodalan bagi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Blitar

- b) Fasilitasi sarana-prasarana penunjang kegiatan UMKM, diantaranya pemberian tenda, terpal, mesin jahit, alat perbubutan kayu, alat pengelasan, mixer, kompor dan lain sebagainya oleh Pemerintah Kota Blitar guna membantu kelancaran usaha para pelaku UMKM
- c) Pembinaan terhadap pelaku UMKM di Kota Blitar dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi di Indonesia atau perusahaan swasta yang sukses, dapat dijadikan motivasi bagi pelaku UMKM guna mengembangkan skala usahanya.

Dengan melihat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar, diharapkan mampu untuk membantu masyarakat terlepas dari jurang kemiskinan dan ketidakberdayaan. Karena didalam UUD 1945 pemerintah mempunyai tugas pokok untuk mambantu masyarakat dalam hal pengetasan kemiskinan. Faktor-faktor yang menghambat laju tumbuhkembangnya UMKM yang ada di Kota Blitar seperti:

- 1) Masih rendahnya produktivitas pelaku UMKM yang ada di Kota Bitar.
- 2) Terbatasnya akses UMKM kepada Sumber Daya Produktif.
- 3) Masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi.
- 4) Tertinggalnya kinerja koperasi dan kurang baiknya citra koperasi.
- 5) Kurang kondusifnya iklim usaha.

Diharapkan dapat diatasi oleh Pemerintah Kota Blitar dalam hal ini pembuatan program-program kerja yang lebih mengena terhadap

kebutuhan masyarakat. Sehingga penciptaan suatu keadaan masyarakat yang mandiri dalam artian mandiri dalam hal perekonomian dapat tercapai sehingga pembangunan di Kota Blitar dapat berjalan dengan lancar.

B. Saran

Dari berbagai konsep mengenai pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, menurut saya ada beberapa strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kota Blitar dilakukan dalam perbaikan dan perkembangan pemberdayaan UMKM, ke depannya yaitu:

1. Perlu adanya peraturan yang jelas terhadap pemberdayaan UMKM yang ada di Kota Blitar, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan UMKM yang ditunjukan kepada masyarakat Kota Blitar sendiri mengingat pemberdayaan UMKM begitu sangat penting guna mengangkat perekonomian lokal dalam hal ini Kota Blitar.
2. Perlunya sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Blitar terhadap program-program yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Blitar dalam hal ini kaitannya dengan program pemberdayaan UMKM, sehingga masyarakat mampu mengatasi segala permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan yang menimpanya dengan menggunakan program yang dibuatkan pemerintah untuk mereka.
3. Masih rendahnya produktivitas pelaku UMKM yang ada di Kota Bitar, terbatasnya akses UMKM kepada sumber daya produktif, masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi, tertinggalnya kinerja koperasi dan kurang baiknya citra koperasi dan kurang

kondusifnya iklim usaha harus segera diatasi mengingat tantangan globalisasi sudah mulai masuk di Indonesia yakni ditunjukkan dengan adanya perdagangan bebas. Perbaikan citra koperasi dimata masyarakat perlu segera dilakukan mengingat koperasi mampu untuk membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejateraanannya. Dan juga pemerintah harus menindak praktek-praktek Koperasi nakal yang mana dengan menggunakan kedok koperasi pemerintah tetapi disisi lain malah memeras masyarakat. Untuk itu perlu adanya peraturan yang jelas sebagai dasar pedoman untuk menindak kegiatan perkoperasian yang dianggap merugikan masyarakat.

4. Peningkatan sumber daya manusia pelaku UMKM dan juga aparatur juga menjadi modal penting ketika prospek perkembangan UMKM di Kota Blitar cukup bagus karena di tunjang juga banyaknya tempat wisata yang ada di Kota Blitar membuat Kota Blitar banyak dikunjungi oleh para wistawan. Sehingga diharapkan dengan adanya peningkatan kualitas SDM pelaku UMKM serta aparatur dari pihak pemerintah mampu untuk melahirkan inovasi dan kreasi-kreasi baru guna menumbuhkembangkan UMKM di Kota Blitar kedepannya. Dan juga akses permodalan yang perlu dimudahkan dan kemampuan menjaga ketahanan UMKM dari persaingan pasar bebas perlu ditinjau kembali mengingat faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi perkembangan UMKM di Kota Blitar

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

BPS.2011. *Kota Blitar Dalam Angka 2011*. Blitar.

Muluk, Khairul. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya:ITS Press.

Moleong, Lexy, J. 2006. *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosadakarya.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Saefudin, Asep. (Eds). 2003. *Menuju Masyarakat Mandiri: Pengemabangn Model Sistem Kerterjaminan Sosial*. Jakarta: Gramedia Putaka Utama

Saiman, Leonardus. 2009. *Kewirausahaan: Teori, Praktik, dan Kasus-kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan RND*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Rafika Aditama.

Sulistiyani, Teguh, Ambar. 2004. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.

Suryono, Agus, dan Nugroho, Trilaksono. 2007. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.

Suyono, Haryono. 2003. *Mewujudkan Kemandirian Keluarga Kurang Mampu*. Jakarta: Yayasan Dana Sejahtera Mandiri

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2006. *Metodologi penelitian Sosial*. Ed.6. Jakarta. Bumi Aksara.

Wisadirana, Darsono. 2005. *Metode Penelitian dan Pedoman Penulisan Skripsi Untuk Ilmu Sosial*. Malang: UMM Press.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Walikota Blitar No 48 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Dinas Koperasi Dan UKM Kota Blitar

Peraturan Walikota Blitar No 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kemiskinan Kota Blitar

Peraturan Walikota Blitar No 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir untuk Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Blitar

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar 2005-2025

C. Website atau Internet

Situmorang, Jannes. 2008. *Strategi UMKM Dalam Menghadapi Iklim Usaha yang Tidak Kondusif*. Vol 16: 87-101. (http://www.smeccda.com/deputi7/file_Infokop/EDISI%2030/7_strategi_umkm.pdf, diakses tanggal 23 September 2011)

Www.Kotablitar.Go.Id diakses tanggal 23 September 2011

INTERVIEW GUIDE

1. Sejauh mana keberpihakan Pemerintah Daerah Kota Blitar dalam memberdayakan masyarakat di Kota Blitar dalam hal ini kaitannya dalam pembuatan kebijakan atau program yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM?
2. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar dalam hal ini kaitannya dengan program pemberdayaan UMKM di Kota Blitar?
3. Bagaimana keadaan sumber daya manusia pelaku UMKM di Kota Blitar sendiri di lihat dari jenis pendidikan yang ditempuh ?
4. Apa saja bentuk pelaksanaan strategi kebijakan Pemerintah Kota Blitar dalam hal ini kaitannya dengan pemberdayaan sosial ekonomi pelaku UMKM sendiri?
5. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar dalam hal ini kaitannya dengan pemberdayaan sarana prasarana penunjang UMKM di Kota Blitar?
6. Manfaat apa saja yang diperoleh pelaku UMKM di Kota Blitar dari adanya strategi kebijakan yang di buat oleh Pemerintah Kota Blitar dalam hal ini berkaitan dengan pemberdayaan UMKM di Kota Blitar?
7. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung bagi Pemerintah Kota Blitar dalam melihat perkembangan UMKM di Kota Blitar sendiri?

Lampiran 1. Surat Keterangan Untuk Melakukan Survey dari Fakultas Ilmu Administrasi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
(FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE)

Jalan. Mayjen Haryono No.163 Malang 65145; Telp. (0341) 553737, 568914, 558226
Fax. (0341) 558227; Website: <http://fia.ub.ac.id>; E-mail: fia@ub.ac.id

Program Studi: • S1 Administrasi Publik • S1 Administrasi Pemerintahan • S1 Perencanaan Pembangunan • S1 Ilmu Perpustakaan • S1 Administrasi Bisnis
• S1 Perpajakan • S1 Bisnis Internasional • S1 Hospitality dan Pariwisata • S2 Ilmu Administrasi Publik • S2 Ilmu Administrasi Bisnis • S3 Ilmu Administrasi

Nomor : 1049 / UN 10.3/2011
Lampiran : -
Perihal : Pra Riset

Kepada : Yth. Bapak/Ibu Kepala
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Kota Blitar

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan pra riset bagi mahasiswa :

Nama : Andy Sofian
Alamat di Malang : Jl.MT Haryono Gg Brawijaya 6 NO. 102 B Kota Malang
Alamat asal : Jl. Bali No. 17 Kota Blitar
NIM : 0810310008
Jurusan : Administrasi Publik
Tema : Upaya Pemerintah Kota Blitar Dalam Pemberdayaan UMKM Guna
Menciptakan Masyarakat Yang Mandiri
(Studi Pada Pemerintah Kota Blitar)
Lamanya : Bulan November - Selesai.
Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 4 November 2011

A.n. Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Publik

U.B. Sekretaris



Drs. Minto Hadi, M.Si

NIP. 196401270 198103 1003



Lampiran 2. Surat Keterangan Untuk Melakukan Penelitian/Survey/
Research Dari Pemerintah Kota Blitar



PEMERINTAH KOTA BLITAR
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH
Jl. Kalimantan No. 93 Telp. 0342-804063 Blitar

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 76 / 410.204 / 2011

UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN / SURVEY / RESEARCH

Memperhatikan : Surat dari Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas rawijaya Malang
Tanggal, 4 Nopember 2011 Nomor : 11048/UN 10.3/2011 Perihal Perihal
Permohonan Ijin Penelitian / Survey / Research.
Dengan ini menyatakan tidak keberatan Perihal Permohonan Ijin Penelitian /
Survey / Research. dilakukan oleh :

Nama : **ANDY SOFIAN**
NIM : 0810310008
Program Studi : Ilmu Administrasi
Jurusan : Administrasi Publik
Alamat : Jl. Bali No.17 Kota Blitar
Tempat Pelaksanaan : 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar
2. Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar
3. Badan Pusat Statistik Kota Blitar
Judul Skripsi/Penelitian : **" Upaya Pemerintah Kota Blitar Dalam Pemberdayaan UMKM Guna
Menciptakan Masyarakat Yang Mandiri "**.
Waktu Pelaksanaan : 8 Nopember 2011 s/d 30 Desember 2011

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala ketentuan yang berlaku ditempat Penelitian / Survey / Research.
2. Dalam setiap melakukan kegiatan selalu menggunakan identitas yang berlaku.
3. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
4. Setelah selesai melakukan kegiatan dimaksud, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah (Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat) mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud.
5. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Blitar , 8 Nopember 2011

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH
KOTA BLITAR**



H.Sy.GENDA, S.Sos. M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19561222 198101 1 007

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar.
2. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar
3. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Blitar
4. Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas rawijaya Malang
5. Yang bersangkutan

Lampiran 3. Surat Keterangan Survey di Dinas Koperasi dan UKM Daerah
Pemerintah Kota Blitar



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH

Jl. Cisadane no. 2 Telp. (0342) 802978 Blitar

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 187 / 422.410 / 2012

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. BUDIYONO
NIP. : 19580415 198303 1 017
Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar
Unit Organisasi : Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar
Instansi : Pemerintah Kota Blitar

Dengan ini menerangkan bahwa Saudara :

Nama : ANDY SOFIYAN
N I M : 0810310008
Pendidikan/ Jurusan : Adminitrasi Publik
Universitas : Brawijaya Malang
Alamat : Jl. Bali No. 17 Kota Blitar

Telah melaksanakan tugas penelitian/surve/Research di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar pada tanggal 08 Nopember s/d 30 Desember 2011, dan hasilnya di pergunakan untuk menyusun Skripsi yang berjudul :

"UPAYA PEMERINTAHAN KOTA BLITAR DALAM PEMBERDAYAAN UMKM
GUNA MENCIPTAKAN MASYARAKAT YANG MANDIRI"

Demikian surat keterangan ini untuk dapatnya dipergunakan seperlunya.

Blitar, 03 April 2012

An. KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM

KOTA BLITAR

Sekretaris



Drs. BUDIYONO

NIP. 19580415 198303 1 017

Lampiran 4. Surat Keterangan Survey di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Pemerintah Kota Blitar



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
Jln. Sumatra No.60 Telp. 0342 - 804430, Fax. 0342 - 814323 e-mail : diperindagkotablitar@yahoo.co.id
BLITAR
Kode Pos 66131

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 0471 / 410.108 / 2012

TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. HERMANSYAH PERMADI, M.Si
NIP : 19660423 199203 1 007
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Blitar

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANDY SOFIAN
NIM : 0810310008
Program Studi : Ilmu Administrasi
Jurusan : Administrasi Publik
Universitas : Universitas Brawijaya Malang

Telah melakukan penelitian untuk keperluan Skripsi dengan judul 'Upaya Pemerintah Kota Blitar Dalam Pemberdayaan UMKM Guna Menciptakan Masyarakat Yang Mandiri' pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Blitar pada tanggal 8 Nopember s/d 30 Desember 2011

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, 3 April 2012

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah
Kota Blitar


Drs. HERMANSYAH PERMADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660423 199203 1 007

CURICULUM VITAE

Nama : Andy Sofian
 NIM : 0810310008
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 23 September 1989
 Alamat : JL. Bali 17 Kota Blitar
 Agama : Islam
 E-mail : Sofianandy22@yahoo.co.id
 Pendidikan Formal :

Periode			PENDIDIKAN
Tahun		Tahun	
1996	-	2002	SDN Kepanjenkidul 7 Kota Blitar
2002	-	2005	SMPN 2 Kota Blitar
2005	-	2008	SMAN 3 Kota Blitar
2008	-	2012	Universitas Brawijaya Malang

Pendidikan Non Formal :

1. Dekstop Application Training Professional Level pada tahun 2011
2. Preparation TOEFL (TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE)
pada tahun 2012

Magang :

Dinas Perhubungan Kota Malang, yang berlokasi di JL. Raden Intan No. 1 Malang, Kota Malang, Jawa Timur, dengan judul “Mekanisme Tata Kelola Sistem Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Malang” selama 1,5 bulan.

Karya Tulis :

Skripsi

Upaya Pemerintah Kota Blitar Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Guna Menciptakan Masyarakat yang Mandiri (Studi Pada Pemerintah Kota Blitar).

